



Pemerintah Provinsi Gorontalo

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)



**Provinsi Gorontalo
Tahun 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini dapat disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja yang memuat hasil kinerja penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan laporan atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023. Hasil capaian kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dapat dicapai dengan baik. Laporan kinerja ini juga menguraikan implementasi pelaksanaan kinerja pembangunan yang telah direncanakan dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Periode 2023-2026.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan telah bersama-sama menjalankan proses pembangunan selama ini. Ucapan terima kasih juga kepada Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB beserta jajaran yang telah memberikan rekomendasi perbaikan serta bimbingan untuk Provinsi Gorontalo yang lebih maju dan berkinerja tinggi. Sinergi dan kolaborasi



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

akan terus dibangun dalam perwujudan pembangunan Provinsi Gorontalo yang lebih baik kedepan. Kami menyadari bahwa capaian pembangunan yang telah diraih masih jauh dari yang diharapkan, namun Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan keterbatasan sumber daya yang ada, tetap berupaya mewujudkan dan merealisasikan kinerja pembangunan daerah dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi bahan evaluasi atas kinerja pemerintah, serta menjadi rujukan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan yang strategis atas permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Provinsi Gorontalo pada tahun berikutnya. Masukan dan saran/koreksi serta rekomendasi dari Kementerian PANRB sangat diharapkan untuk pelaksanaan pembangunan dan kinerja Pemerintahan Daerah yang lebih baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo ini, diharapkan dapat menjadi media informasi eksternal publik sekaligus menjadi alat koreksi internal penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Gorontalo guna keberlanjutan pembangunan daerah dimasa yang akan datang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, (*Good Governance* dan *Clean Governance*).

Gorontalo, 28 Februari 2024

Pj. GUBERNUR GORONTALO

Ir. ISMAIL PAKAYA, ME



BAB 1

PENDAHULUAN

- **Penjelasan Umum tentang Pemerintah Provinsi Gorontalo**
- **Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan**
- **Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Gorontalo**
- **Isu-Isu Strategis dan Permasalahan Utama**

1.1. LATAR BELAKANG

Harapan pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sampai saat ini masih menjadi agenda prioritas Nasional. *Clean government* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk menata pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa tersebut merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, birokrasi yang merupakan unsur sumberdaya manusia penyelenggara sistem administrasi pemerintahan, menjadi salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan *clean government* dan *good governance* tersebut. Posisi dan peran birokrasi menjadi sangat kuat dan dominan, karena selain berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi juga berpengaruh terhadap kehidupan politik. Dalam kehidupan ekonomi, kinerja birokrasi berpengaruh pada tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kehidupan politik, kinerja birokrasi akan menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

Sebagai upaya mengaktualisasikan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) di Provinsi Gorontalo.

1.2. PENJELASAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

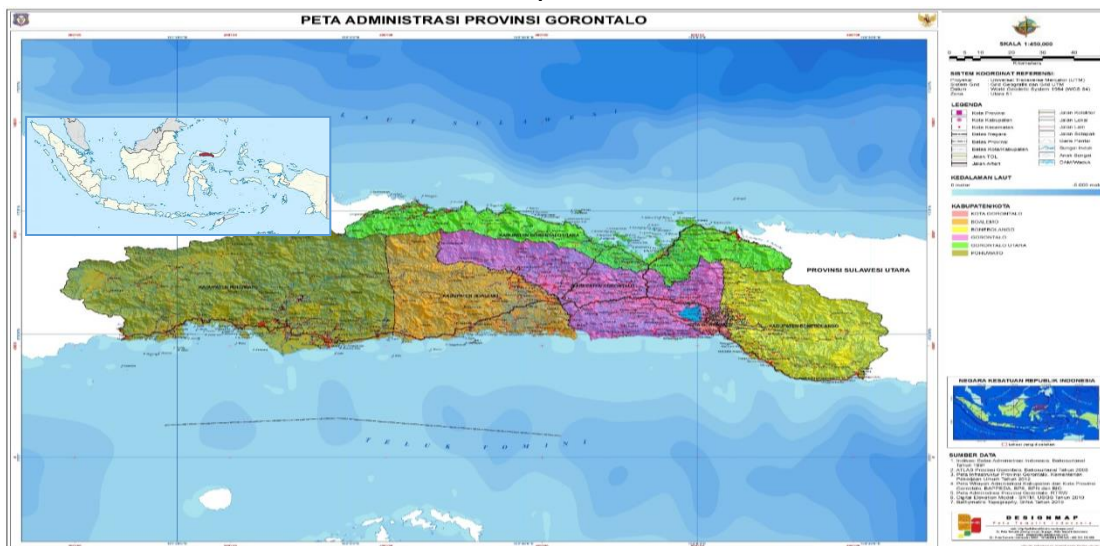
1.2.1. Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Gorontalo berada di jazirah utara Pulau Sulawesi, dan telah resmi menjadi sebuah provinsi pasca diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Sesuai koordinat, Provinsi Gorontalo terletak di antara 0°19' – 1°15' Lintang Utara dan 121°23' - 123°43' Bujur Timur artinya wilayah Provinsi Gorontalo tepat berada di belahan utara Garis Katulistiwa. Letak geografis Provinsi Gorontalo sangat strategis karena wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Buol dan Kabupaten Parigi Moutong) di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi (Laut ini berhubungan langsung dengan negara-negara Asia Pasific : Filipina, Taiwan, China dan Jepang) dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.

Sebagai sebuah provinsi, luas wilayah Provinsi Gorontalo terbilang kecil yaitu hanya 12.435,00 km², jika dibandingkan dengan Wilayah Indonesia luas Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 65,96 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.143,48 km², Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.736,61 km², Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.455,60 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.891,49 km² dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 2.141,86 km². Dari keenam wilayah ini, Kabupaten Pohuwato dengan menguasai 35,83% menjadikannya sebagai Kabupaten terluas di wilayah Provinsi Gorontalo disusul kemudian oleh Kabupaten Gorontalo dengan persentase luas wilayah terhadap Provinsi Gorontalo adalah 17,24%. Sedangkan Kota Gorontalo memiliki luas wilayah terkecil sebesar 0,53% dari total luas wilayah Provinsi Gorontalo.

Struktur daratan di wilayah Pulau Sulawesi khususnya Provinsi Gorontalo mempunyai topografi yang sebagian besar merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut. Di bawah ini adalah peta administrasi wilayah Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Gambar 1.2.1
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Gorontalo



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo, 2010-2030

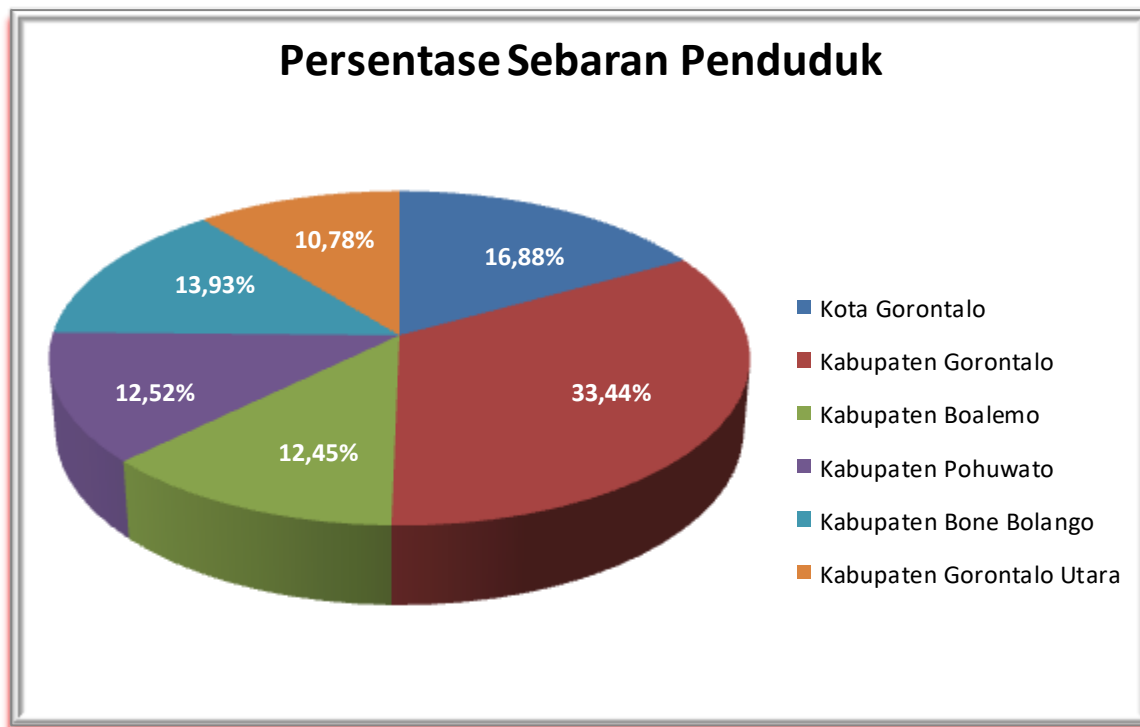
1.2.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil pemutakhiran data kependudukan, sampai dengan tahun 2022, jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 1.192.737 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,00 persen. Dimana jumlah penduduk perempuan sebanyak 585.115 jiwa atau 49,05 dan penduduk laki-laki sebanyak 595.833 jiwa atau 49,95 persen, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,83 yang berarti bahwa terdapat 101 hingga 102 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 398.801 jiwa atau 33,44 persen, diikuti oleh Kota Gorontalo dengan jumlah penduduk sebesar 201.350 jiwa atau 16,88 persen dan Kabupaten Bone Bolango sebesar 166.200 jiwa atau 13,93 persen serta Kabupaten Pohuwato sebesar 149.297 jiwa atau 12,52 persen dan Kabupaten Boalemo sebesar 148.526 jiwa atau 12,45 persen. Sementara itu, jumlah penduduk paling rendah terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sebesar 128.563 jiwa atau 10,78 persen dari jumlah penduduk Provinsi Gorontalo.

Jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada, maka Kota Gorontalo yang hanya memiliki luas wilayah sebesar 79,59 km² memiliki penduduk yang cukup besar mencapai 2.510 jiwa per kilometer persegi, hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo adalah wilayah terpadat penduduknya di Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi yang menyediakan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan yang memberikan daya tarik tersendiri bagi penduduk di Provinsi Gorontalo. Padatnya penduduk Kota Gorontalo terkait erat dengan fungsi sentral Kota Gorontalo disamping sebagai ibu kota provinsi (pusat pemerintahan), juga sebagai pusat ekonomi, pusat kesehatan, dan pendidikan serta hiburan.

Grafik 1.2.2
Sebaran Penduduk Provinsi Gorontalo
Tahun 2023

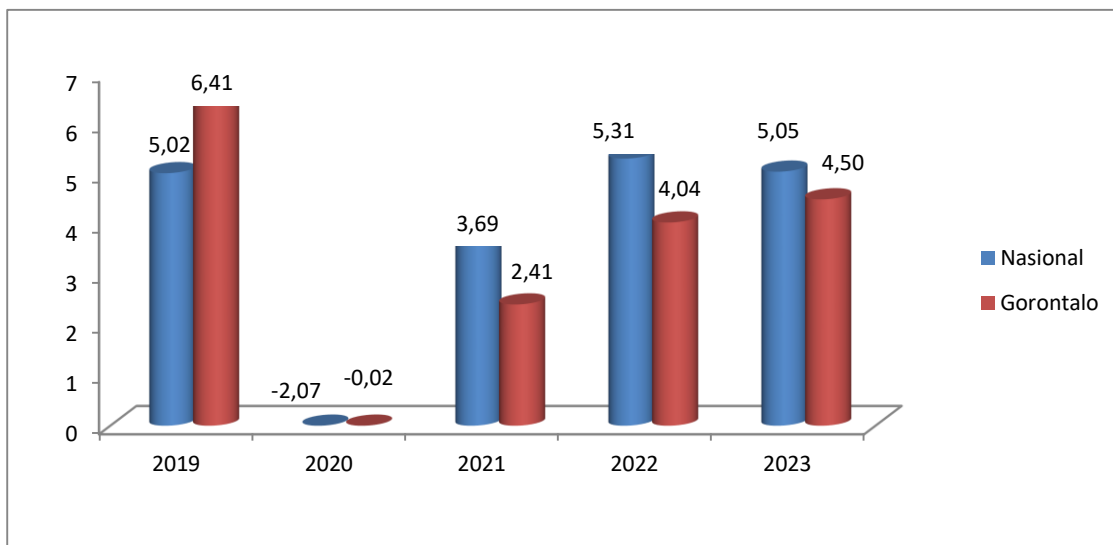


1.2.3 Kondisi Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Perekonomian Gorontalo tahun 2023 diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp. 51.374 milyar dan PDRB perkapita mencapai Rp. 42,35 juta. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sebesar Rp 47.574, dengan pertumbuhan sebesar 4,04 persen. Tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 4,50 persen.

Gambar 1.2.3.1 berikut akan memperlihatkan kondisi pertumbuhan ekonomi Gorontalo Tahun 2019-2023 di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional.

Gambar 1.2.3.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo
Tahun 2019 – 2023 (persen)



Sumber Data : BPS dan BPS Provinsi Gorontalo 2024

1.2.4 Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Pada Akhir tahun 2023 sampai dengan awal tahun 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo berjumlah 6.375 orang yang terdiri dari 5.075 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebanyak 1.298 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari jumlah PNS tersebut, PNS laki-laki sebanyak 2.208 Orang atau 43,51 persen dan PNS perempuan sebanyak 2.867 Orang atau 56,49. persen. Sementara itu, PPPK sebanyak 516 orang laki-laki atau 39,75 persen dan perempuan sebanyak 782 orang atau 60,25 persen.



Sumber daya aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo didukung pula oleh tenaga penunjang kegiatan atau honorer yang berjumlah 3.267 orang. Dari segi kuantitas jumlah aparatur, saat ini dianggap cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo, namun dari segi kualitas berdasarkan tingkatan dan latar belakang pendidikan formal serta dengan mempertimbangkan tuntutan kompetensi seorang pegawai dalam menangani bidang tugasnya masih perlu ditingkatkan, baik melalui pendidikan lanjutan pada jurusan yang masih langka dan strategis, terbatas atau melalui diklat-diklat teknis terutama terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

Selain hal tersebut, pasca penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang tentunya sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia, yang tentunya mengharapkan SDM harus berkualitas, berkeahlian, pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan hal ini maka diperlukan perbaikan komposisi dalam birokrasi untuk mengembangkan fokus SDM aparatur yang mengutamakan kompetensi dan keahlian. Agar simplikasi eselon tidak diartikan sebagai penghapusan jabatan, namun sebagai langkah untuk pembangunan SDM yang berkualitas dan berkeahlian. Selain itu, pemetaan jabatan administrator dan pengawas yang akan dialihkan menjadi jabatan fungsional ini bertujuan untuk memangkas rantai birokrasi yang panjang. Dengan langkah ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi efektif dan efisien.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memasuki fase ke tiga atau tahap terakhir dari tahapan penyederhanaan birokrasi yaitu penyesuaian sistem kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan telah merumuskan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi yang sudah masuk pada tahap fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.

1.2.5 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan

Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060),



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

yang merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah provinsi melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, pemerintah daerah provinsi juga melaksanakan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional yang meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kab/Kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kab/Kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kab/Kota dan/atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila di lakukan oleh Daerah Provinsi.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Gorontalo di pimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu oleh Wakil Gubernur. Dalam menyelenggarakan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas tersebut terdiri dari : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Pada awal tahun 2022, periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan 2017-2022 berakhir, tepatnya sejak tanggal 12 Mei 2022. Dengan berakhirnya Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini dipimpin oleh Penjabat Gubernur. Seperti diketahui, Pj Gubernur adalah orang yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur karena berakhir masa jabatannya untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Tugas dan Wewenang Pj Gubernur adalah diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tugas Pj. Gubernur sebagai kepala daerah yaitu :

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;



3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
 7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah, Pj. Gubernur memiliki wewenang sebagai berikut:
- a. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun menurut Pasal 132A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Pj Gubernur.

Berikut ini larangan bagi Pj Gubernur adalah:

- a. Melakukan mutasi pegawai;
- b. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;
- d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;
- e. Adapun ketentuan di atas sebagaimana termuat dalam huruf 1 sampai dengan d, dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Dalam menyelenggarakan tugas, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh perangkat Gubernur/perangkat daerah. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan asas:

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

Dengan susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf yang mempunyai fungsi pendukung urusan pemerintahan Provinsi Gorontalo, yang didalamnya terdapat 6 (enam) Biro yaitu :
 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Biro Hukum;
 - Biro Pembangunan dan Pengendalian Ekonomi;
 - Biro Organisasi;
 - Biro Pengadaan;
 - Biro Umum.
- b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi;



- c. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan, pada Pemerintah Provinsi Gorontalo terdiri atas :
1. Dinas pendidikan dan kebudayaan; yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemuda dan Olah Raga;
 3. Dinas Kesehatan dengan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 9. Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 11. Dinas Ketahanan Pangan dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
 12. Dinas Pariwisata dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

13. Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 14. Dinas Pertanian dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 15. Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 17. Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 18. Dinas Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, dan transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, ESDM dan transmigrasi;
 19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
- e. Badan Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Provinsi Gorontalo terdiri atas:
1. Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 2. Badan keuangan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;
 3. Badan kepegawaian yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian;
 4. Badan pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan;



5. Badan penghubung yang melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;

Selain perangkat daerah sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memiliki 2 (dua) perangkat daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 13 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo yang memiliki fungsi :
 - Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi dibidang pembinaan politik;
 - Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan serta fasilitasi dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi dibidang ketahanan sosial dan ekonomi;
 - Perumusan standar, norma, pedoman, criteria dan prosedur dibidang fasilitasi pembinaan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan serta fasilitasi bidang ketahanan sosial dan ekonomi;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain yang memiliki fungsi :
 - Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dan dianggap sebagai solusi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo serta permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan menjadi perhatian serius pemerintah utamanya yang berkaitan dengan pencapaian visi misi jangka panjang Pemerintah Provinsi Gorontalo,

maka isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan multidimensi. Tidak hanya disebabkan oleh satu factor akan tetapi oleh berbagai unsur kemiskinan menjadi masalah kompleks. Secara nasional, angka Kemiskinan Provinsi Gorontalo masuk di 5 provinsi terbesar persentase kemiskinannya. Meskipun demikian, angka Kemiskinan di Gorontalo terus mengalami penurunan walaupun agak melambat. Sehingga pengentasan Kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan besar yang perlu mendapat perhatian dan keseriusan semua pihak.

Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh positif pada beberapa tahun ini bahkan diatas rata-rata nasional kecuali pada saat pandemi covid 19. Begitupun dengan pengangguran di Gorontalo yang terus menurun. Namun belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka Kemiskinan. Pengentasan Kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan di Provinsi Gorontalo. bahkan pada agenda 2030 TPB/SDGs, Kemiskinan menjadi tujuan pertama.

Secara umum, tingkat Kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada periode Maret 2016- Maret 2023 mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Penurunan Kemiskinan paling signifikan terjadi pada September 2018, yakni 0,98 persen poin dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid 19 menyebabkan tingkat Kemiskinan mengalami kenaikan, mencapai 15,61 persen pada Maret 2021 dengan 186,29 ribu jiwa miskin. Olehnya, Kemiskinan ini menjadi permasalahan yang perlu dituntaskan bersama-sama karena dipengaruhi oleh banyak faktor dan multi dimensi. Sehingga diperlukan sinergi program, kegiatan dan anggaran semua pihak untuk memastikan masyarakat miskin mampu menikmati kehidupan yang berkualitas. Keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang ada di Provinsi Gorontalo perlu lebih di optimalkan dalam upaya mensinergikan program-program penanggulangan Kemiskinan yang di Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota.



2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian. Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk. Di sisi lain, produksi pangan dipengaruhi oleh faktor musim, ketersediaan sarana prasarana produksi termasuk pengairan/irigasi, pengelolaan pasca panen yang belum maksimal, serta akses terhadap lahan yang terbatas. Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dengan fluktuasi harga menyebabkan daya beli petani (Nilai Tukar Petani) relatif rendah khususnya untuk subsector perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya. NTP dan NTUP belum menverminkan kondisi ideal atau belum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan petani. Perubahan iklim global juga merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan.

Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH). Skor PPH Ketersediaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebesar 79,62 dan Skor PPH Konsumsi 76,80. Hal ini dipengaruhi oleh produksi kelompok bahan pangan umbi-umbian, kacang-kacangan serta sayur dan buah masih sangat rendah sehingga masih perlu mendapat perhatian khusus untuk pemenuhannya tanpa perlu mendatangkan dari wilayah lain di luar Provinsi Gorontalo.

3. Pembangunan Wilayah untuk Pengurangan Kesenjangan

Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu terkait ketimpangan antar wilayah. Tantangan pembangunan kewilayahan yaitu bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan antar wilayah Kabupaten/Kota melalui pengembangan potensi sumber daya masing-masing, meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.



Isu Strategis dan Permasalahan pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antar wilayah yang ditandai dengan:

a. Ketimpangan antar Wilayah:

- Masih tingginya angka kemiskinan pedesaan, Maret 2023 sebesar 23,73 persen, sementara perkotaan sebesar 4,47 persen.
- Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

b. Pengembangan dan Penguatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah/Kawasan:

- Pengembangan Kawasan strategis Provinsi belum optimal.
- Konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan yang rendah.
- Pengembangan kawasan belum terpusat
- Belum masuk pada kawasan strategis Nasional untuk pengembangan wilayah Ekonomi Pariwisata maupun Industri.

c. Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing Daerah.

- Belum optimalnya kualitas dan akses pelayanan dasar dikawasan pedesaan yang ditandai dengan cakupan akses sanitasi layak dikawasan pedesaan sebesar 68,36 persen, sementara di perkotaan sebesar 85,35 persen (rata-rata Provinsi sebesar 75,68 persen), cakupan akses air minum layak pedesaan sebesar 91,20 persen, cakupan akses air minum perkotaan sebesar 97,94 persen (rata-rata Provinsi sebesar 94,16 persen).
- Penanganan kawasan kumuh masih terbatas, tahun 2023 persentase rumah tangga kumuh sebesar masih sebesar 4,6 persen.

d. Pemanfaatan Ruang

- Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Belum adanya Roadmap pengembangan kawasan.
- Belum maksimalnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
-

4. Sumber Daya Manusia.

Modal utama dalam pembangunan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), Oleh karena itu perlu terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia yang difokuskan pada pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan budaya dan imtaq, pembinaan olahraga sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah. Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo selama 2 tahun terakhir ini mengalami peningkatan walaupun cenderung kecil. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen menjadi 69,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, angka ini masih lebih rendah dari capaian rata-rata secara nasional yaitu 72,29 persen. Pada tahun 2022, IPM Provinsi Gorontalo mencapai 70,62 dan pada tahun 2023 berada pada angka 71,25 meningkat 0,63 poin atau 0,89 persen dibanding tahun 2022. Selama 2020-2023, IPM Provinsi Gorontalo rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen per tahun.

Namun, dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten dapat dikatakan bahwa kualitas pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa awal daerah ini terbentuk menjadi provinsi pada tahun 2001. Akan tetapi masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian agar kualitas pembangunan manusia Provinsi Gorontalo menjadi lebih maksimal.

Dua dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia dibangun oleh kesehatan dan pendidikan. Secara umum, kedua dimensi ini membaik akan tetapi masih belum dirasakan oleh seluruh penduduk. Hal ini dapat disebabkan diantaranya belum meratanya SDM kesehatan pada puskesmas yaitu sebesar 26,9%. Bahkan masih terdapat 12,9% puskesmas yang belum memiliki dokter pada tahun 2020. Selain itu cakupan kunjungan nifas lengkap di Provinsi Gorontalo terendah bersama Papua dan Papua Barat (Profil Kesehatan 2020). Sementara itu cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi sebesar 72,5% masih berada dibawah rata-rata nasional.

Cakupan Kesehatan Semesta/Universal Health Coverage di Provinsi Gorontalo, sampai dengan Februari 2022 mencapai 89,4% dan yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan sebesar 10,6%. Sebagaimana besaran target Universal Health



Coverage (UHC) yang harus dicapai sebesar 95%, dimana masyarakat dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Tingkat Kesehatan Pertama (FKTP) dan pelayanan di rumah sakit kelas 3 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, baik rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta secara gratis serta masih rendahnya capaian UHC provinsi Gorontalo yang jauh berada di bawah rata-rata standard UHC.

Dibidang pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah merupakan indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat. Pada tahun 2023, HLS sebesar 13,16 dan RLS sebesar 8,02. Kedua indikator ini terusmeningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020-2023, HLS Provinsi Gorontalo rata-rata meningkat 0,20 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,18 persen per tahun.

Permasalahan yang dihadapi adalah lulusan pendidikan menengah adalah salah satu penyumbang pengangguran terbanyak. Data BPS pada bulan Agustus 2023 memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi sebesar 8,61 persen terdapat pada jenjang pendidikan SMK. TPT pada SMK memperlihatkan tren fluktuatif setelah di tahun 2021 sebesar 7,66 persen dan di tahun 2022 sebesar 8,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SMK yang diharapkan sebagai tenaga yang siap kerja ternyata belum mampu memenuhi pasar kerja atau berwirausaha sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajari selama di SMK. BadanPemeriksa Keuangan dalam pemeriksaannya memberikan rekomendasi salah satunya adalah sinergi organisasi perangkat daerah terkait untuk merumuskan penyelenggaraan program kependidikan dan ketenagakerjaan daerah, selain itu reformasi pendidikan vokasi SMK diantaranya kerjasama dengan dunia industri.

5. Depleksi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo masih cenderung rendah, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pencemaran air sungai; penurunan kualitas udara; kerusakan danau limboto berupa penyusutan dan penurunan kualitas air danau; kerusakan mangrove dan terumbu karang; dan jumlah



sampah yang cenderung meningkat dari aktivitas masyarakat. Dari Total 245.000 Ha Lahan di DAS Limboto- Bolango Bone, 140.487 Ha termasuk dalam kategori agak kritis, kritis dan sangat kritis. Hal ini diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi baik di sungai maupun di Danau Limboto. Dalam waktu 6 tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan hutan sebesar 2.100 Ha di Wilayah DAS Limboto dan Bone, menjadi Kawasan pemukiman, pertanian, semak belukar, dll. Perubahan lahan ini berkontribusi terhadap peningkatan koef pengaliran dan Indeks Erosi Tanah. Sempadan sungai belum efektif sebab pembangunan wilayah pemukiman masih dilaksanakan di wilayah sempadan sungai dan tanpa menerapkan konsep waterfront city. Hal ini menyebabkan tingginya kerawanan banjir di Kota Gorontalo, dimana 57% masyarakat tinggal di Kawasan rawan banjir di Pusat Kota Gorontalo (Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Banjir Provinsi Gorontalo, Bappenas RI Desember 2021).

Adapun beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo antara lain: Penyusunan Dokumen perencanaan berbasis KLHS, Membangun koordinasi dengan instansi terkait Pembangunan sarana sanitasi (Jamban, SPAL) secara bertahap, Memperketat proses perijinan berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Penguatan kapasitas masyarakat terkait lingkungan hidup, Rehabilitasi hutan dan lahan dengan Target Provinsi 1000 ha/tahun dan BP - DAS tahun 2020 2.500 ha, Pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial: pengembangan gula semut, jamur tiram, pembuatan handsanitizer, Pengelolaan DAS dan rehabilitasi, dan Pengembangan pertanian berbasis konservasi.

Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup sampah juga masih menjadi permasalahan dalam Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo, hal ini dibuktikan dengan Timbulan sampah 623,55 ton/hr atau 227.577,28 ton/thn dan 65% Limbah B3 belum terkelola dengan maksimal (Sumber : DLHK Provinsi Gorontalo). Adapun target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) sampai dengan tahun 2024 diharapkan mencapai 28 % (70.095,050 Ton/Tahun).



6. Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pembangunan Rendah Karbon

Emisi RAD-GRK Provinsi Gorontalo berasal dari 3 (tiga) bidang yaitu 1) Berbasis Lahan, 2) Berbasis Energi dan 3) Pengelolaan Limbah. Hasil proyeksi Business as Usual (BAU) Provinsi Gorontalo tahun 2020 tanpa intervensi aksi mitigasi, bidang berbasis lahan masih menempati porsi penyumbang emisi GRK terbesar sebanyak 95,8%. Sedangkan bidang berbasis energi dan limbah secara berturut-turut menyumbang 3,8% dan 0,9% dari total BAU 2020 di Provinsi Gorontalo.

7. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis yang terakhir adalah isu tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Isu ini setiap tahunnya selalu digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Prasyarat utama dalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang adalah dengan meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Hasil evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023 menunjukkan kenaikan nilai yang cukup signifikan yang diikuti dengan peningkatan kategori dari "B" menjadi "BB" dengan indeks reformasi birokrasi 77,75. Perolehan indeks di tahun 2023 ini naik sebesar 8,14 poin dibandingkan dengan indeks tahun 2022 dengan indeks 69,61.

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis. Pertama, terkait dengan profesionalitas PNSD, penerapan sistem merit belum optimal dilaksanakan serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan PNSD. Kedua, dari aspek tata laksana, perlu didorong penerapan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan. Ketiga, dari sisi akuntabilitas kinerja, sejak 5 (lima) tahun terakhir

Pemerintah Provinsi Gorontalo masih memperoleh predikat AKIP “B” atau implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo baik dengan nilai 68,66.

Untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 ini menunjukkan bahwa kualitas penerapan manajemen kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik pada sebagian unit kerja. Olehnya, pada tahun 2024 perlu terus didorong dan ditingkatkan implementasi AKIP ini ke seluruh Perangkat Daerah sehingga seluruh Perangkat Daerah mampu menerapkan AKIP ini dengan baik. Kedepan perlu juga terus dioptimalkan keterpaduan sistem akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaporan. Mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja serta menyelaraskan kinerja organisasi dengan kinerja individu dan lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu.

Selanjutnya dari sisi tata Kelola pemerintahan, isu strategis saat ini ditunjukkan pula pada penilaian MCP atau Monitoring Center for Prevention oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2023, MCP Provinsi Gorontalo mencapai 81, 50 persen. Dari 7 (tujuh) area penilaian MCP, masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan dan membutuhkan kinerja optimal, antara lain adalah pengawasan APIP dan pengelolaan BMD. Dibandingkan dengan nilai MCP Nasional, nilai MCP Provinsi Gorontalo berada diatas nilai MCP Nasional yakni sebesar 75 persen.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan



Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang gambaran umum Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan penekanan kepada aspek strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo serta permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023 yang diawali dengan uraian singkat mengenai rencana strategis, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan anggaran tahun 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU).

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (RPD);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1). Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023;
- 2). Dokumen Penetapan IKU Pemerintah Provinsi Gorontalo.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

- **Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo 2023-2026**
- **Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo**
- **Rencana Kinerja Dan Anggaran Pembangunan Daerah**
- **Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo**

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pada tahun 2022 terdapat perubahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021. Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 serta menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD), adalah merupakan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) Tahun yaitu mulai Tahun 2023 dan berakhir Tahun 2026, yang bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional dan jangka pendek dalam satu tahunan berupa RKPD Provinsi Gorontalo atau Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Gorontalo (RKT). RPD Pemerintah Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026. RPD 2023 - 2026 merupakan tahapan pembangunan 4 (empat) tahunan yang terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2007 - 2025. Periode terakhir dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu Gorontalo Maju dan Mandiri.

Selanjutnya, Rencana Strategis (RENSTRA) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja (RENJA) organisasi perangkat daerah atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perangkat daerah.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Gorontalo yang hendak dicapai dalam percepatan pencapaian pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1.2
Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran
1. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
	2. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian.
	3. Meningkatnya daya saing dan kemandirian Desa.
	4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan peayanan dasar.
	5. Pemenuhan hak social dasar Masyarakat.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan.
	2. Meningkatnya derajat kesehatan.
	3. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda.
	4. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama.
	5. Meningkatnya budaya literasi masyarakat.
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
	2. Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim
4. Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
	2. Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah

Sumber: RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

2.1.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengacu pada fokus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPJP Provinsi Gorontalo dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 serta menelaah rumusan isu-isu strategis daerah, maka kebijakan utama pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah :

➤ **Peningkatan Ekonomi Daerah.**

Pembangunan ekonomi akan dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industry, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digitalisasi.

➤ **Pengembangan Wilayah dan Pedesaan.**

Pembangunan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengoordinasi seluruh stakeholders pembangunan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.

➤ **Peningkatan Sumber Daya Manusia.**

Pembangunan sumber daya manusia dititikberatkan pada peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, juga mendorong upaya pengentasan Kemiskinan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

➤ **Peningkatan Kebudayaan dan Agama.**

Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya literasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.

➤ **Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis.**

Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur layanan dasar, pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.



➤ **Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.**

Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

➤ **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi.**

Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan kebijakan utama pembangunan Gorontalo, pembangunan Tahun 2023 di fokuskan pada penguatan sektor ekonomi, sumber daya manusia, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Tata kelola Pemerintahan yang baik, secara lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

❖ Peningkatan Ekonomi:

1. Meningkatkan nilai tambah sector pertanian dan pariwisata.
2. Meningkatkan sarana prasarana pertanian dan perikanan.
3. Memfasilitasi kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja.
4. Menjaga daya beli Rumah tangga khususnya masyarakat miskin.
5. Pembangunan infrastruktur dasar dan strategis.

❖ Peningkatan Sumber Daya Manusia:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
3. Meningkatkan sarana prasarana Rumah Sakit Ainun dan Labkesda serta sumber daya manusia kesehatan.
4. Terpenuhi layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
5. Menjamin pemenuhan hak anak dan kapasitas ekonomi perempuan.
6. Fasilitasi minat dan potensi Pemerintah Daerah.
7. Pengembangan pengelolaan Kebudayaan dan Agama.

❖ Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup:

1. Rehabilitasi hutan dan lahan.
2. Mewujudkan pengembangan pengelolaan persampahan dan limbah B3.



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

3. Meningkatkan pengelolaan penanggulangan bencana dan resiko bencana.
 4. Mendorong pembangunan yang rendah karbon.
- ❖ Tata Kelola Pemerintahan yang Baik:
1. Meningkatkan kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana.
 2. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur.
 3. Pelayanan public yang lebih berkualitas.
 4. Akuntabilitas kinerja dan perencanaan serta pengawasan yang handal.
 5. Meningkatkan sarana prasarana layanan publik untuk peningkatan PAD.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode waktu Tahun 2023 – 2026. IKU Pemerintah Provinsi Gorontalo yang juga termuat dalam dokumen RPD periode 2023-2026 ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo.

IKU Pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 425/5/XII/2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pertumbuhan Ekonomi	<p>Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara/Daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>Rumus :</p> $Gt = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_t} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>Gt = Pertumbuhan Ekonomi Periode t (triwulanan atau tahunan)</p> <p>PDB(t) = Produk Domestik Bruto periode t (berdasarkan harga konstan)</p> <p>PDB(t-1)= Produk Domestik Bruto periode sebelumnya</p> <p>Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo</p>



	2. Indeks Gini	<p>Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.</p> <p>Rumus dari koefisien Gini :</p> $GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(F_i + F_{i-1})$ <p>Dimana, GR : Koefisien Gini (Gini Ratio) P_i : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i F_i : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i F_{i-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1).</p> <p>Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo</p>
	3. PDRB Perkapita	<p>PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.</p> <p>Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita.</p> <p>Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo</p>
	4. Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja :</p> $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja} \times 100\%}{\text{jumlah penduduk angkatan kerja}}$ <p>Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo dan Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi</p>
	5. Inflasi	<p>Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.</p> <p>Rumusan:</p>



		$\text{Inflasin} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}(n-1)}{\text{IHK}(n-1)} \times 100$ <p>Dimana, Inflasin= Inflasi pada periode ke-n IHKn= Indeks Harga Konsumen pada periode ke-n IHKn-1= Indeks harga konsumen pada periode ke n-1</p> <p>Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo</p>
	6. Persentase Angka Kemiskinan	<p>adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana: $\alpha = 0$ z =gariskemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.</p> <p>Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo</p>
Peningkatan Sumber Daya Manusia	7. Indeks Pembangunan Manusia	<p>PM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umur panjang dan hidup sehat 2. Pengetahuan 3. Standar hidup layak <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.</p> $IPM = \sqrt[3]{\text{kesehatan} \times \text{pendidikan} \times \text{pengeluaran}} \times 100$ <p>Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo</p>



Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	<p>Gas Rumah kaca (GRK) merupakan gas di atmosfer, baik yang terbentuk secara alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan radiasi inframerah menyebabkan efek gas rumah kaca. Berbagai aktivitas manusia, khususnya sejak masa pra-industrialisasi, mendorong bertambahnya emisi GRK di atmosfer, sehingga konsentrasinya meningkat. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah pemanasan global dan perubahan iklim.</p> <p>Gas rumah kaca ini berfungsi seperti kaca yang meneruskan cahaya matahari tetapi menangkap energi panas dari dalamnya.</p> <p>Rumus:</p> $E = DA \times FE$ <p>Dimana: E = Emisi GRK (ton) DA= Data Aktivitas (Tj) FE= Faktor Emisi (ton/Tj)</p> <p>Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	9. Nilai MCP (Monitoring Center For Prevention)	<p>Adalah upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah melalui perbaikan sistem salah satunya melalui MCP yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.</p> <p>Sumber Data: Inspektorat dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI</p>



	10. Indeks Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penyelenggaraan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur 8 (delapan) area perubahan yaitu : Mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik. Sumber Data: LHE RB dari Kementerian PANRB
--	--------------------------------	---

Sumber: SK Gubernur Gorontalo Nomor 425/5/XII/2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2023-2026

2.3 RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada program sehingga perlu dioperasionalkan dengan perencanaan yang lebih fokus dan terinci sampai dengan penjabaran terakhir pada kegiatan dan sub kegiatan namun masih dalam satu kesatuan dari seluruh perencanaan pembangunan. Perencanaan yang lebih terinci tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 ini menjadi penjabaran tahun pertama atau tahun awal dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 - 2026 yang juga merupakan tonggak dari pondasi dasar upaya keberlanjutan pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun seluruh stakeholder yang ada di daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan Provinsi Gorontalo Maju dan Mandiri.

Dokumen RKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan dokumen tersendiri yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo ini, yang juga

merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPD, yang juga merupakan instrumen pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengoperasikan RPD serta memberikan gambaran konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran antara RKPD dengan RPD.

Ukuran keberhasilan/pencapaian pembangunan daerah Provinsi Gorontalo membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuannya. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan dan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2023 ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo. Rencana kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pertumbuhan Ekonomi	5,17
	2. Indeks Gini	0,419
	3. Inflasi	3,29
	4. PDRB Perkapita	35,94



	5. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,49
	6. Persentase Angka Kemiskinan	15,29
Peningkatan Sumber Daya Manusia	7. Indeks Pembangunan Manusia	71,15
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	30
Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	9. Nilai MCP (Monitoring Center For Prevention)	92,65
	10. Indeks Reformasi Birokrasi	65,1

Sumber : RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dan (* Penetapan target Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023 berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Tim KEMD Provinsi Gorontalo bersama jajaran Bappeda Provinsi Gorontalo)

Selain kinerja utama pemerintah Provinsi Gorontalo, terdapat pula kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung pencapaian kinerja utama dengan target-target yang telah ditetapkan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.3.2
Target Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomisebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	38,14
	2. Indeks Ketahanan Pangan	83,22
	3. Nilai Tukar Petani	104,97
	4. Nilai Tukar Usaha Pertanian	109,9
	5. Nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan	97,77
Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja dan Daya Saing Perekonomian	6. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	5,27
	7. Nilai Ekspor	18,03
	8. Realisasi PMA/PMDN	11,824



	9. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	2,4
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Desa	10. Kemiskinan Perdesaan	23,5
	11. Peningkatan status Desa dan Desa Mandiri	4
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	12. Persentase kondisi mantap jalan	60,4
	13. Rasio Elektrifikasi	99,5
	14. Persentase luasan kawasan kumuh	7,69
	15. Persentase cakupan air minum layak	95,35
	16. Persentase cakupan sanitasi layak	78,61
	17. Persentase kinerja irigasi kewenangan provinsi	60
	18. Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,553
Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan	19. Rata-rata lama sekolah	8,28
	20. Harapan lama sekolah	13,24
	21. Angka partisipasi sekolah	71,63
Meningkatnya Derajat Kesehatan	22. Angka Harapan Hidup	68,80
	23. Prevalensi Stunting	29
Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	24. Indeks Pembangunan Gender	87,03
	25. Indeks Perlindungan Anak	67,57
	26. Indeks Pembangunan Pemuda	51,59
Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	27. Indeks pembangunan literasi masyarakat	36,4
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	28. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,31
Meningkatnya Ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim	29. Indeks Resiko Bencana	123
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	30. Nilai SAKIP	BB
	31. Indeks Kematangan Organisasi	48
	32. Opini Pengelolaan Keuangan	WTP
	33. Indeks Sistem Merit	292

Sumber: RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

Sementara itu, dalam upaya pencapaian target kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo utamanya terhadap pencapaian kinerja utama, rencana pendanaan pembangunan daerah untuk tahun 2023, akan menggunakan proyeksi struktur APBD Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 2.3.3
Proyeksi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN
Pendapatan	1.774.597.025.452,62
Belanja	1.713.073.710.202,61
Pembiayaan	61.523.315.250,00

Sumber: RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 telah ditetapkan oleh Gubernur Gorontalo. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo memuat sasaran strategis daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lain yang relevan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pertumbuhan Ekonomi	5,17
		2. Indeks Gini	0,419
		3. Inflasi	3,29
		4. PDRB Perkapita	35,94
		5. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,49
		6. Persentase Kemiskinan	15,29
2.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia	7. Indeks Pembangunan Manusia	71,15
3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	30
		9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,31
4.	Terwujudnya <i>Good and Clean Governmen</i>	10. Nilia MCP	92,65
		11. Indeks Reformasi Birokrasi	65,1
		12. Opini Pengelolaan Keuangan	WTP

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Pada Tahun 2022, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo periode 2017-2022 telah berakhir tepatnya pada tanggal 12 Mei 2022 dan selanjutnya Pemerintah Provinsi Gorontalo di pimpin oleh Penjabat Gubernur. Penandatanganan perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan pada bulan Januari 2023 oleh Penjabat Gubernur



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

Gorontalo. Selanjutnya, pada bulan Mei Tahun 2023 Penjabat Gubernur Gorontalo di ganti dengan pejabat baru dan dilakukan penetapan perjanjian kinerja perubahan oleh Penjabat Gubernur Gorontalo yang baru. Penandatanganan Perjanjian Kinerja selanjutnya dilakukan juga secara berjenjang oleh seluruh Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 disajikan dalam Lampiran-1.



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- **Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo**
- **Upaya yang dilakukan dalam mencapai Kinerja**
- **Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja**
- **Realisasi Anggaran**

Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis, juga indikator pendukung lainnya yang mendukung pencapaian IKU. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (RPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Gorontalo, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Kinerja Tahun 2023 merupakan kinerja tahun pertama RPD atau tahun awal penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo periode 2023-2026. Adapun capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023 yang merupakan kinerja awal pelaksanaan RPD periode 2023-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo memuat sasaran strategis yang disertai dengan indikator kinerja utama serta indikator lain yang relevan atau indikator kinerja yang mendukung pencapaian IKU Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana telah diungkapkan di bab sebelumnya. Pada bab ini, akan di uraikan dan dijelaskan tentang capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Sebelum menguraikan lebih lanjut capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023, akan diuraikan terlebih dahulu rumus pengukuran kinerja yaitu dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*).

Selanjutnya, berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Perhitungan realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:



1. Tingkat Realisasi Positif (jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi capaian kinerja dan jika semakin rendah realisasi, menunjukkan semakin rendah capaian kinerja).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Tingkat Realisasi Negatif (jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja dan jika semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi capaian kinerja).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus perhitungan atas realisasi kinerja diatas, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Kategorisasi Kinerja

No	Kriteria	Interval Realisasi (%)	Kode
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat rendah	(= 50	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Selanjutnya pada tabel 3.1.2 di bawah ini akan disajikan realisasi dan capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
 Realisasi dan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo
 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pertumbuhan Ekonomi	5,17	4,50	87,04
	2. Indeks Gini	0,419	0,417	199,52
	3. Inflasi	3,29	3,88	82,07
	4. PDRB Perkapita	35,94	42,35	117,83
	5. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,49	3,06	112,32
	6. Persentase Angka Kemiskinan	15,29	15,15	100,92
Peningkatan Sumber Daya Manusia	7. Indeks Pembangunan Manusia	71,15	71,25	100,14
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	30	27,30	91,00
	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,31	79,52	107,01
Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	10. Nilai MCP (Monitoring Center For Prevention)	92,65	81,50	87,96
	11. Indeks Reformasi Birokrasi	65,1	77,75	119,43
	12. Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	100,00

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo, LHE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Dinas LHK Provinsi Gorontalo, Inspektorat Provinsi Gorontalo tahun 2023

Dari uraian tabel 3.1.2 diatas, Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, semua target tercapai dengan baik bahkan capaiannya melebihi 100 persen, yang digambarkan dengan warna "hijau tua". Namun, masih terdapat tiga indikator kinerja yang capaiannya masih memerlukan komitmen dan kerja keras lagi dari semua pihak dan semua stakeholder agar target tercapai yaitu pengendalian inflasi dan peningkatan nilai MCP, yang digambarkan dengan warna "hijau muda".

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab sebelumnya yaitu pada bab 2, terkait penetapan target kinerja utama tahun 2023, bahwa terdapat perubahan target terhadap beberapa indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penetapan target Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023 tersebut ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pembahasan tim penyusun Kerangka Makro Ekonomi Daerah (KEMD) Provinsi Gorontalo bersama jajaran Bappeda Provinsi Gorontalo. Perubahan target-target kinerja tersebut adalah terhadap indikator kinerja makro yang pencapaian kerjanya diperlukan kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan seluruh stakeholders yang terkait yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. Indikator kinerja yang mengalami perubahan target kinerja tersebut adalah pada indikator pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya ditetapkan sebesar 6,21 berubah menjadi 5,17. Indeks gini atau gini rasio sebelumnya ditetapkan target kinerja sebesar 0,398 berubah menjadi 0,419. Selanjutnya target pencapaian pengendalian inflasi 2,03 berubah menjadi 3,29. Target tingkat pengangguran terbuka sebelumnya ditetapkan sebesar 3,63 berubah menjadi 3,49, persentase kemiskinan semula 15,00 berubah menjadi 15,29 dan yang terakhir adalah target kinerja Indeks Pembangunan Manusia 69,68 menjadi 71,15.

Selanjutnya, terhadap berbagai target capaian kinerja utama tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan melakukan langkah-langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan masalah dimasa mendatang. Adapun hasil analisis pada pencapaian masing-masing sasaran strategis dan kinerja pendukungnya akan disajikan sebagai berikut :



Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat dicapai dan diukur dengan menetapkan 6 (enam) indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, pengendalian inflasi, PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka dan penanggulangan kemiskinan, dimana keenam indikator kinerja utama ini dianggap mampu menggambarkan pencapaian atas sasaran strategis Meningkatnya Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Selanjutnya, akan dianalisis per indikator kinerja utama tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPD

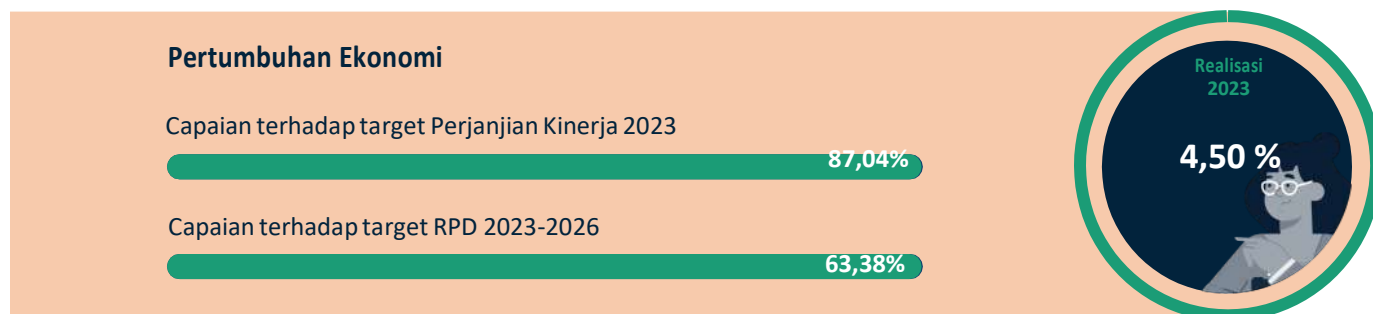
No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s.d Akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,41%	4,04 %	5,17%	4,50%	87,04	7,1	63,38
2	Indeks Gini	0,409	0,423	0,419	0,417	199,52	0,390	93,08
3	PDRB Perkapita	37,46	39,87	35,94	42,35	117,83	37,68	112,39
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,28%	2,58 %	3,49%	3,06%	112,32	2,90	94,48
5	Inflasi	2,59%	5,15%	3,29%	3,88%	82,07	1,82	-13,19
6	Persentase Angka Kemiskinan	15,41%	15,51%	15,29%	15,15%	100,92	13,92	91,16

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Dari tabel 3.1.3 diatas dapat dilihat bahwa dari enam indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023 yang juga merupakan capaian kinerja makro daerah, terdapat lima indikator yang capaiannya sangat baik dimana capaian kerjanya berada diatas 100 persen. Tercapainya kinerja makro daerah ini tak luput dari baiknya sinergitas dan kolaborasi program dari seluruh stakeholders yang terkait, baik tingkat Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya akan diuraikan dan dianalisis setiap indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi

A. Capaian Kinerja

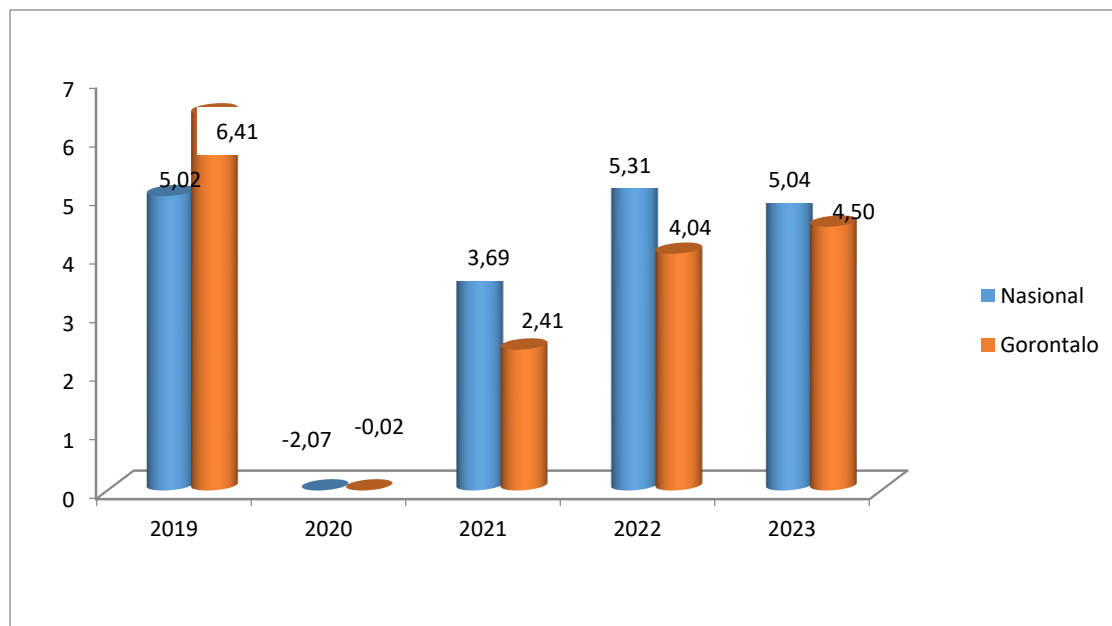


Ekonomi Gorontalo tahun 2023 tumbuh sebesar 4,50 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori perdagangan besar dan eceran. Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,95 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 6,81 persen.

Dari tabel 3.1.3 diatas, perbandingan realisasi kinerja dan capaian s.d akhir RPD tahun 2026, dapat diketahui bahwa pada pertumbuhan ekonomi Gorontalo mulai kembali bergeliat pasca pandemi covid-19 yang sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,02%, di tahun 2021 mulai lagi tumbuh sebesar 2,41 persen dan ekonomi Nasional tumbuh sebesar 3,69 persen. Di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Gorontalo mulai berjalan dan bertumbuh hingga mencapai 4,04 persen dari target yang ditetapkan sebesar 6,3 persen dan ekonomi nasional pada tahun 2022 bertumbuh sebesar 5,31 persen.

Selanjutnya, pada tabel 3.1.4 berikut ini dapat dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Gorontalo dan Nasional selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Gambar 3.1.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo dan Nasional
Tahun 2019 – 2023 (persen)



Sumber Data : BPS dan BPS Provinsi Gorontalo 2024

Meskipun masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional, tetapi sudah terdapat geliat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, yang naik sebesar 0,46 poin dari tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini adalah indikator kinerja makro sehingga banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhi capaian kinerjanya yaitu antara lain kinerja ekspor luar negeri dalam hal ini adalah potensi ekspor komoditas jagung, perbaikan iklim investasi di Provinsi Gorontalo, tingkat permintaan masyarakat, konsumsi pemerintah dan pertumbuhan lapangan usaha. Di awal tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah dimulai program pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan mampu berperan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi sampai ke daerah sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus beranjak naik.

B. Upaya yang dilakukan

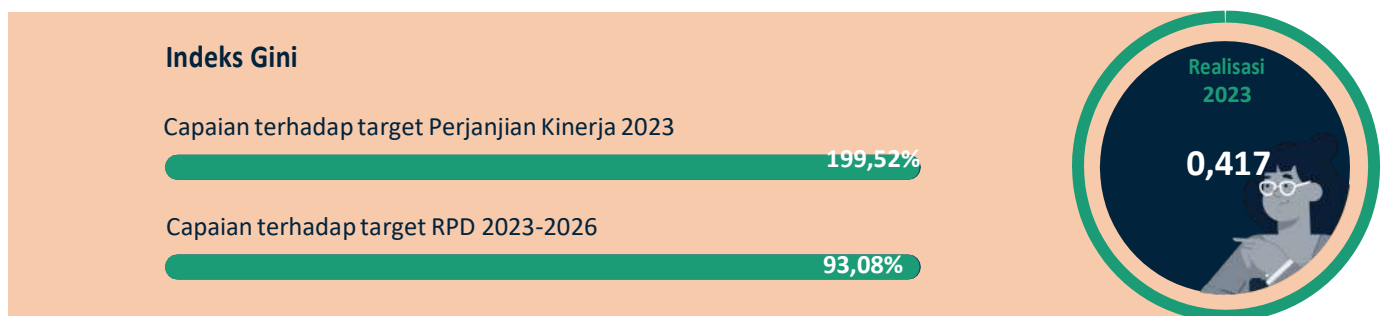
Untuk terus memulihkan pertumbuhan ekonomi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo menempuh upaya meningkatkan potensi ekspor komoditas jagung, melakukan

perbaikan terhadap iklim investasi di Provinsi Gorontalo, meningkatkan peran UMKM, meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan dan subsidi BBM, Listrik juga pelaksanaan pasar murah yang secara rutin di gelar. Mendorong konsumsi pemerintah daerah melalui percepatan penetapan APBD dan membelanjakannya di dalam darah di Provinsi Gorontalo. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berlokasi di Wilayah Provinsi Gorontalo sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan.

Dalam pemulihan ekonomi Gorontalo ini, tentunya Pemerintah Provinsi Gorontalo bersinergi dengan para stakeholders lain diantaranya dengan Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo dan Bank SulutGo.

Indikator Kinerja Indeks Gini

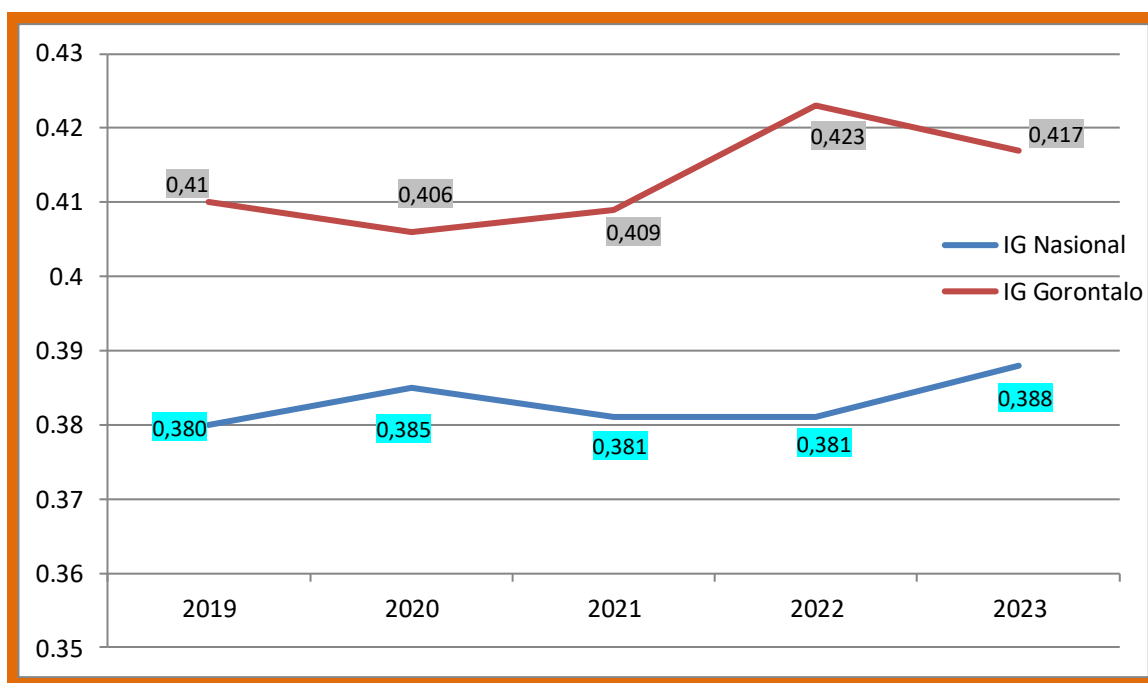
A. Capaian Kinerja



Indeks gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0-1. Semakin tinggi nilai, menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Indeks Gini adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna atau dengan kata lain terjadi ketimpangan yang sempurna.

Dari tabel 3.1.3 diatas, dapat dilihat bahwa indeks gini Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebesar 0,409 dan pada tahun 2022 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Gorontalo sebesar 0,423 meningkat sebesar 0,014 poin dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023, indeks gini Provinsi Gorontalo tercatat berada pada 0,417 dari target sebesar 0,419. Angka tahun 2023 ini mengalami penurunan sebesar 0,006 poin jika dibandingkan dengan September 2022. Jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2022, angka ini menurun sebesar 0,001 poin.

Grafik 3.1.5
Indeks Gini Nasional dan Provinsi Gorontalo
Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Menurut daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2023 sebesar 0,403. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 0,003 poin dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,406. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, terjadi penurunan sebesar 0,006 poin dari *Gini Ratio* sebesar 0,409. Untuk daerah perdesaan, *Gini Ratio* pada Maret sebesar 0,403, meningkat 0,008 poin dibandingkan Maret 2022 dan September 2022. Nilai *Gini Ratio* Maret 2023 di daerah perdesaan sama dengan *Gini Ratio* di

wilayah perkotaan, menunjukkan pemerataan yang sama antara wilayah di perdesaan dan wilayah perkotaan.

Perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila peningkatan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode September 2022-Maret 2023 diantaranya adalah:

- a. Berdasarkan data Survei Sosial Nasional (Susenas), tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Gorontalo periode September 2022-Maret 2023 mengalami penurunan 1,31 persen.
- b. Penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami penurunan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya, yaitu mencapai 1,91 persen poin. Adapun penurunan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 40 persen menengah adalah sebesar 1,31 persen poin dan kelompok 40 persen terbawah mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 1,00 persen.
- c. Jika dibedakan menurut tempat tinggal, daerah perkotaan mengalami penurunan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 5,82 persen. Namun, daerah mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 5,34 persen. Oleh karena itu, ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan semakin sempit.

B. Upaya yang dilakukan

Ketimpangan sosial merupakan masalah yang kompleks dan meluas di berbagai daerah bahkan di berbagai negara, termasuk Gorontalo, Indonesia. Untuk mengatasi ketimpangan sosial dan mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, pemerintah Gorontalo yang telah menggulirkan berbagai upaya yang tentunya sejalan dengan kebijakan Nasional yaitu:

1. Program Bantuan Sosial

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Program-program seperti Program Keluarga Harapan



(PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di bawah garis kemiskinan.

2. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta memperbaiki konektivitas dan aksesibilitas yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

3. Penyediaan Pendidikan yang Berkualitas

Pemerintah terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Program wajib belajar 12 tahun, pemberian beasiswa, dan pembangunan sekolah di daerah dan desa-desa terpencil adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Dengan meningkatnya akses ke pendidikan yang berkualitas, diharapkan kesempatan untuk meraih pekerjaan yang lebih baik akan menjadi lebih merata.

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

Pemerintah telah meluncurkan program-program pemberdayaan ekonomi seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Padat Karya Tunai (PKT) untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Program ini memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan akses terhadap modal usaha bagi masyarakat miskin sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi.

5. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Koperasi dan UMKM memainkan peran penting dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Pemerintah terus mendorong pengembangan koperasi dan UMKM dengan memberikan akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan dukungan teknis.

6. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

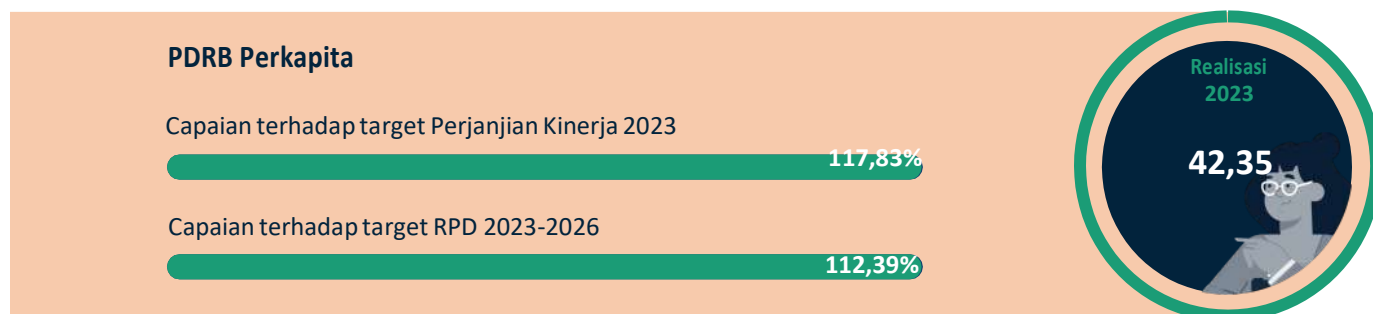
Pemerintah juga melakukan upaya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program seperti penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian, dan pelatihan keterampilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Upaya mengatasi ketimpangan sosial adalah tugas yang kompleks dan memerlukan komitmen jangka panjang.

Dengan adanya kerjasama dan upaya bersama, Gorontalo dapat mencapai tujuan

pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indikator Kinerja PDRB Perkapita

A. Capaian Kinerja



PDRB Perkapita indikator yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro yang di ukur berdasarkan indikator pendapatan/percapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan factor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Namun demikian peningkatan PDRB perkapita belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum, karena PDRB perkapita yang di hitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku yang masih dipengaruhi oleh factor inflasi.

Pada dasarnya, pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil-hasilnya dan mengusahakan pergeseran proses kegiatan ekonomi dari sektor primer kearah sekunder dan tersier. Dalam usaha pembangunan nasional yang berkelanjutan dan tepat sasaran dilakukan perencanaan pembangunan yang baik dan didukung oleh sarana dan prasarana perekonomian suatu wilayah. Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan nasional atau regional.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam satu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang duhasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal didaerah itu, maka akan dihasilkan suatu pendapatan perkapita.

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun disuatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut dipangaruhi oleh kedua variabel tersebut.

Dari tabel 3.1.3 diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo mulai tahun 2021, PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 37,464,438, dimana aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen PK-RT (pengeluaran konsumsi rumah tangga) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Gorontalo yaitu 61,80 persen. Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 28,21 persen, ekspor barang dan jasa sebesar 26,06 persen serta komponen P-KP (pengeluaran konsumsi pemerintah) sebesar 19,77 persen. Pada tahun 2022, PDRB per Kapita Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 39.886.776,66. Capaian ini naik dibandingkan capaian PDRB per Kapita tahun 2021 yang sebesar Rp. 37,464,438. Struktur PDRB Gorontalo tahun 2022 masih didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 37,99 persen. Pada tahun 2023 mencapai Rp. 42.346.820,80 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 35,94 juta. Struktur PDRB tahun 2023 menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 37,75 persen. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,78 persen serta konstruksi sebesar 11,13 persen.

B. Upaya yang dilakukan

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan terus mendorong beberapa langkah di daerah, yaitu untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri dan konsumsi serta beberapa sektor diharapkan bisa terus dipacu antara lain adalah:

- Sektor pariwisata sebagai mesin ekonomi, termasuk pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata serta memperbaiki investasi di sektor pariwisata.
- Mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat.
- Menjaga inflasi, utamanya terhadap beberapa komoditas yaitu harga beras dan cabai.
- Komitmen untuk terus menaikkan nilai investasi di Provinsi Gorontalo.

Pada tabel 3.1.6 di bawah ini akan di gambarkan nilai PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo Tahun 2019 sampai dengan 2023, sebagai berikut:

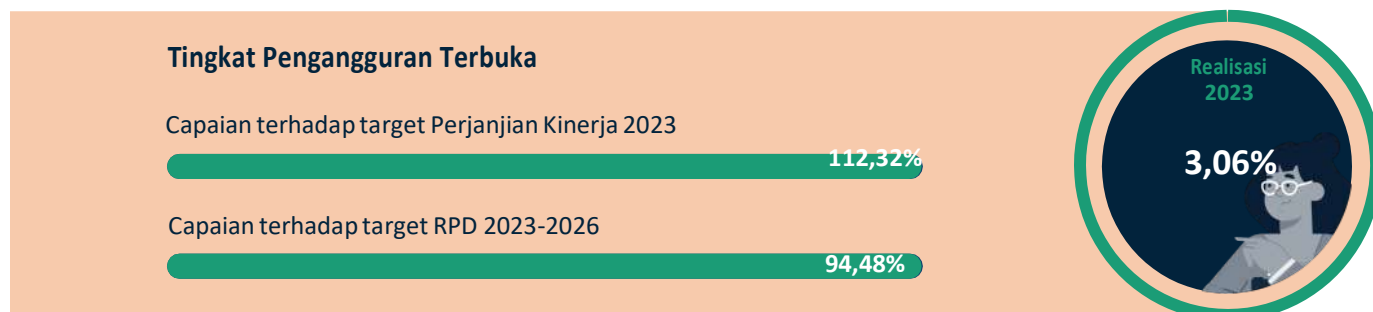
Tabel 3.1.6
Nilai PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Gorontalo
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai (Rupiah)	34.211.290,19	35.693.264,29	37.170.549,65	39.886.776,66	42.346.820,80
Nilai (US\$)	2.418,15	2.452,16	2.597,75	2.686,36	2.779,11
Persentase Kenaikan	7,48%	4,33%	4,14%	7,31%	6,17%

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

A. Capaian Kinerja



Tingkat pengangguran (terbuka) dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen dengan rumus jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.

Kondisi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 sebagaimana pada tabel 3.1.3 di atas, sebesar 3,01 persen atau capaian sebesar 124,94 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,01 persen. Angka pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo di tahun 2021 ini turun sebesar 1,27 persen dibandingkan tahun 2020.

Pada tahun 2022, dimana covid-19 sudah melandai dan terus mengalami penurunan, maka angka pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo sudah mulai menurun yang juga bermakna bahwa intervensi terhadap pengangguran yang selama dua tahun terakhir terus meningkat, maka di tahun 2022 pengangguran di Provinsi Gorontalo menurun dan berada pada 2,58 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebesar 3,06 persen, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 651.425 orang.

Pada tabel 3.1.7 dibawah ini akan menggambarkan/menginformasikan tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo selama 5 (lima) tahun terakhir ini, sebagai berikut :

Tabel 3.1.7
Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo
Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Angkatan Kerja	585.896	593.97	596.968	630.534	651.425
	• Bekerja	562.087	568.56	579.009	614.250	631.521
	• Penganggur	23.809	25.41	17.959	16.284	19.904
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,06	4,28	3,01	2,58	3,06
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,83	66,46	65,94	68,91	70,71

Sumber: BPS Prov. Gorontalo Tahun 2024

Dari tabel 3.1.7 dapat diketahui perkembangan ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo selama 5 (lima) tahun terakhir. Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo tahun 2019, jumlah angkatan kerja sebanyak 585.896 orang naik 7.016 orang dibandingkan tahun 2018. Sebanyak 562.087 orang penduduk bekerja, naik sebesar 6.554 orang dibandingkan tahun 2018 dan sebanyak 23.809 orang menganggur bertambah 462 orang dibandingkan tahun 2018. Dari kondisi tersebut, terdapat pengangguran terbuka sebesar 4,06 persen, naik sebesar 0,03 poin dibandingkan kondisi tahun 2018 dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,83 persen menurun sebesar 0,51 poin dibandingkan kondisi tahun 2018. Pada tahun 2020, dimana pandemic covid-19 mulai melanda, pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo mencapai 4,28 persen. Dibandingkan dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dimana tingkat pengangguran terbuka pada Agustus tahun 2020 sebesar 7,07 persen dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 138,22 juta orang. Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang dan 9,77 juta orang penganggur.

Tahun 2021, kondisi ketenagakerjaan mulai bergeliat ditengah masih merebaknya pandemi covid-19. Angkatan kerja di tahun 2021 tepatnya di Agustus sebesar 596.968 orang dengan rincian 579.009 orang penduduk bekerja dan 17.959 orang pengangguran, dimana 21,13 persen diantaranya merupakan pengangguran karena dampak covid-19. Tingkat

pengangguran terbuka tahun 2021 menurun sebesar 1,27 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo kembali menurun menjadi 2,58 persen, angka ini turun sebesar 0,43 dibandingkan dengan kondisi pengangguran tahun 2021 sedangkan TPT tahun 2023 sebesar 3,06 persen dengan TPAK 70,71 persen.

Penduduk usia kerja merupakan orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke dalam pasar kerja. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo. Penduduk usia kerja meningkat pada Agustus 2023 sebanyak 920.273 orang, meningkat sebanyak 5.322 orang dibandingkan Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 70,79 persen atau 651.425 orang, sisanya merupakan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus Rumah tangga, dan kegiatan lainnya).

Tabel 3.1.8
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama
Provinsi Gorontalo, Agustus 2021, Agustus 2022 dan Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan 2 Tahun Agst 21- Agst 23	Perubahan 1 Tahun Agst 22-Agst 23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja (AK+BAK, orang)	905.361	914.951	920.273	14.912	5.322
Angkatan Kerja (AK, orang)	596.968	630.534	651.425	54.457	20.891
Bekerja	579.009	614.250	631.521	52.512	17.271
Pengangguran	17.959	16.284	19.904	1.945	3.260
Bukan Angkatan Kerja (BAK, orang)	308.393	284.417	268.848	-39.545	-15.569
Sekolah	64.609	61.506	62.447	-2.162	941
Mengurus Rumah Tangga	200.250	180.088	169.968	-30.282	-10.120
Lainnya	43.534	42.823	36.433	-7.101	-6.390
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT, persen)	3,01	2,58	3,06	0,05	0,48
Perkotaan	4,34	3,52	4,13	-0,21	0,61
Perdesaan	2,01	1,86	2,14	0,13	0,28
Laki-laki	3,05	2,28	2,79	-0,26	0,51
Perempuan	2,94	3,07	3,46	0,52	0,39

TingkatPartisipasiAngkatanKerja(TPAK, persen)	65,94	68,91	70,79	4,85	1,88
Perkotaan	64,42	67,11	70,71	6,29	3,60
Perdesaan	67,12	70,37	70,85	3,73	0,48
Laki-laki	81,60	85,30	85,34	3,74	0,04
Perempuan	50,41	52,64	56,07	5,66	3,439

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo 2024

B. Upaya yang dilakukan

Intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo khusus disektor ketenagakerjaan, seperti pelatihan melalui Balai latihan Kerja (BLK), Pemagangan Berbasis pengguna yang mampu menekan angka pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo, membuat kebijakan tentang kemudahan dalam memperoleh informasi ketanaga kerjaan, membangun aplikasi yang memudahkan para pencari kerja. Selanjutnya, melakukan sinergi antara Perangkat Daerah pengampu untuk melaksanakan program kependidikan dan ketenagakerjaan daerah, selain itu reformasi pendidikan vokasi SMK juga perlu mendapat perhatian yaitu diantaranya kerjasama dengan dunia industri. Upaya-upaya yang telah dilakukan secara terinci dapat diungkapkan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja (Job Fair) dengan peserta sebanyak 3.047 Orang dan 30 Perusahaan.
- Pelatihan Vokasi kepada 225 orang.
- Lanjutan Magang Dalam Negeri 244 orang.
- Sosialisasi magang luar negeri 150 orang.
- Magang Luar Negeri 90 Orang pendaftar, kuota 150 orang.
- Penempatan tenaga kerja dalam negeri 250 Orang.
- Bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam Peningkatan Kompetensi 30 Pekerja Sulaman Karawo.





LKIP 2023

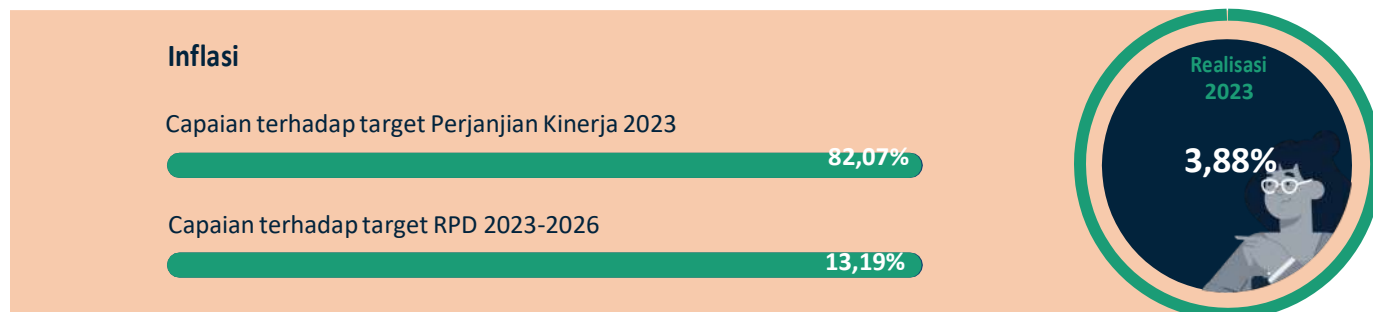
Provinsi Gorontalo

- pemberian bantuan produksi bagi 263 UMKM.
- Penetapan UMP 2024 sebesar Rp 3.025.100 melalui SK Gubernur Gorontalo Nomor 446/32/XI/2023. Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 1,19 % dibandingkan tahun 2023.
- Cakupan layanan tingkat Kepesertaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Provinsi Gorontalo, sebesar 61.73 persen (8 provinsi di wilayah Sulawesi dan Maluku, Gorontalo menduduki peringkat kedua).
- Bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja RI, Membuka kembali pendaftaran program pemagangan luar Negeri (jepang) sebanyak 150 Orang.
- Pembinaan peserta hasil Magang Dalam Negeri sebanyak 144 orang yang melibatkan 19 Perusahaan di Kabupaten/kota.
- Pemberian bantuan produksi bagi 8.057 UMKM.
- Memfasilitasi operasional BLK Komunitas (Nurul Hidayah dan Al Huda) Provinsi Gorontalo kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
- Integrasi layanan Ketenagakerjaan dengan Kemnaker.
- Melanjutkan Program Magang Dalam Negeri.
- Melanjutkan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
- Kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengembangan sektor ketenagakerjaan dan pelatihan keterampilan tahun 2024.
- Menargetkan layanan BPJS Tenaga Kerja bisa mencapai 80% total *Worker Coverage*.



Indikator Kinerja Inflasi

A. Capaian Kinerja



Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Inflasi merupakan indikator penting dan tolok ukur perekonomian yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan stabilitas makro. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa didalam wilayah tersebut mengalami kenaikan.

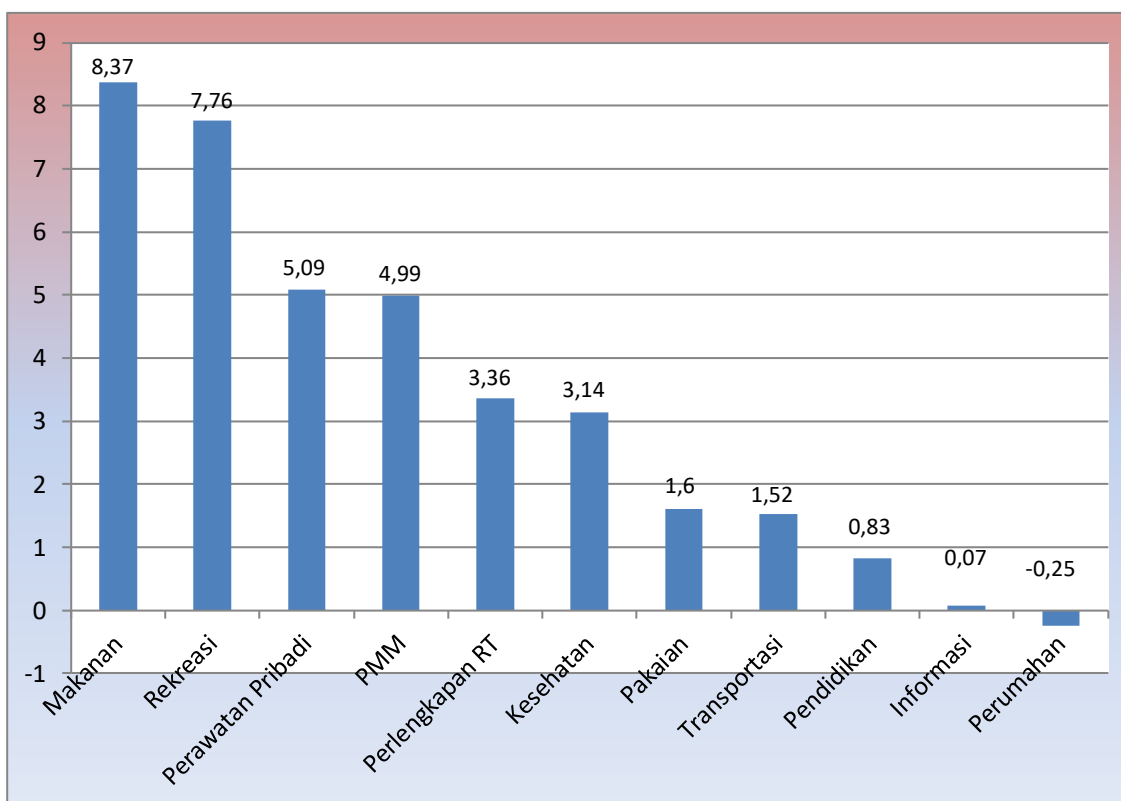
Laju inflasi tahun kalender Provinsi Gorontalo yang dihitung di wilayah Kota Gorontalo pada Desember 2023 dan laju inflasi year on year sebesar 3,88 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari 112,64 pada Desember 2022 menjadi 117,01 pada Desember 2023. Inflasi Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 10 kelompok pengeluaran dan penurunan pada 1 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 8,37 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,60 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin Rumah tangga sebesar 3,36 persen. Kelompok kesehatan sebesar 3,14 persen, kelompok transportasi sebesar 1,52 persen. Kelompok



informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen, kelompok rekreasi, olah raga, dan budaya sebesar 7,76 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,83 persen, kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 4,99 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,09 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar Rumah tangga sebesar 0,55 persen.

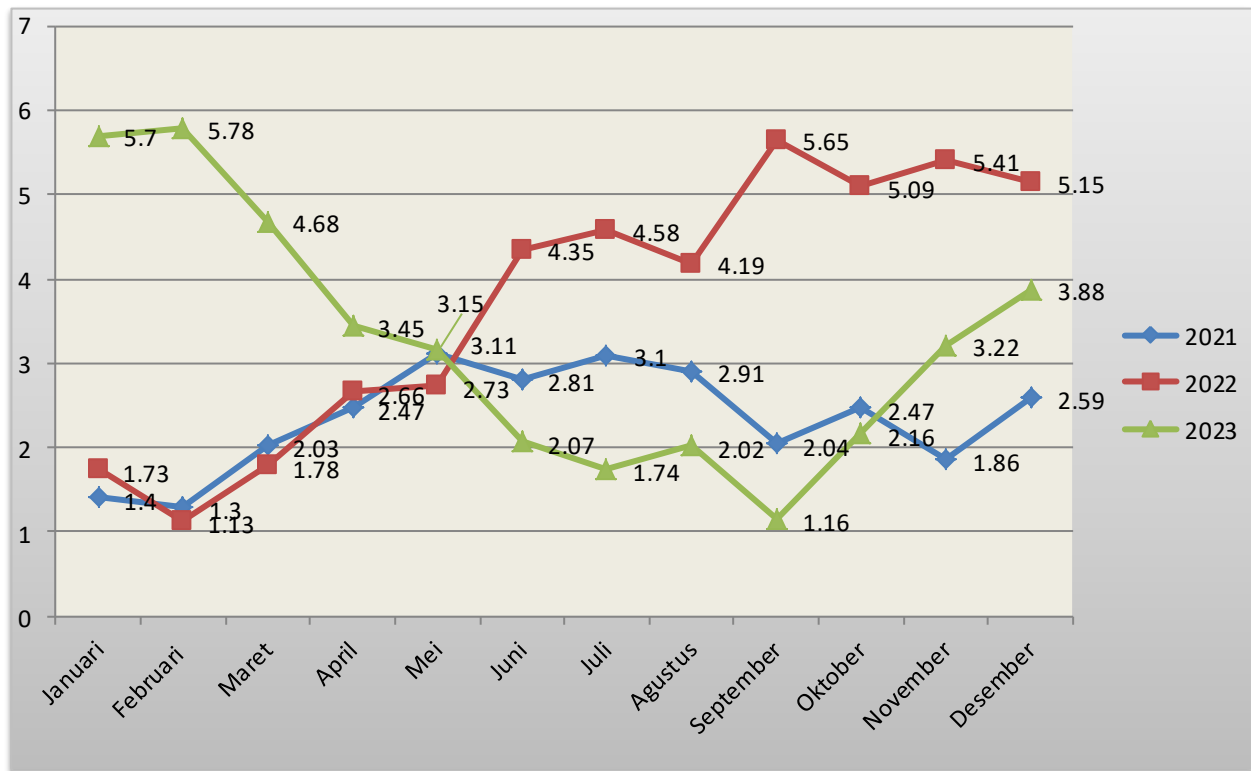
Adapun tingkat inflasi *mont to mont* Desember 2023 sebesar 1,32 persen, dimana Komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Gorontalo Desember 2023 adalah bahan makanan yaitu sebesar 9,00 persen.

Grafik 3.1.9
Inflasi *year to year* Gorontalo menurut kelompok pengeluaran
Desember 2023



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Grafik 3.1.10
Perkembangan Inflasi *year to year* Kota Gorontalo
Januari 2021-Desember 2023



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Indeks harga konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang di konsumsi oleh Rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi di ukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke public setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam kurun waktu 5 tahun, inflasi tahunan Gorontalo sangat berfluktuasi jika dibandingkan dengan laju inflasi tahunan daerah lain di Indonesia maupun terhadap inflasi nasional. Di tahun 2022, tingkat inflasi Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke 13 tingkat inflasi di Kawasan Timur Indonesia dan urutan 8 Nasional. Di tahun 2023, dibandingkan dengan inflasi di kawasan Timur Indonesia, Gorontalo berada pada urutan ke 2 setelah Ternate yang

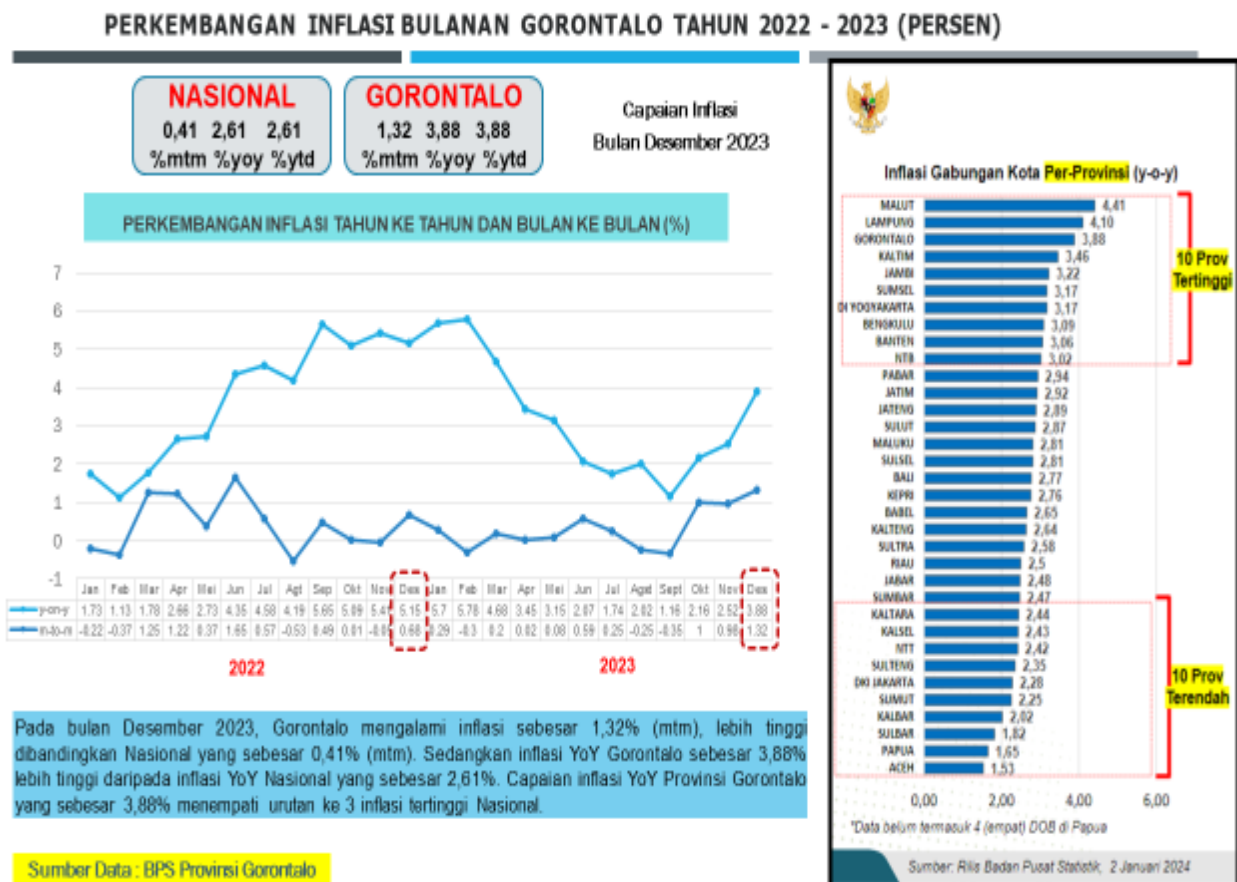


LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

tercatat sebesar 4,41 persen. Dan jika dibandingkan dengan realisasi inflasi Nasional yang sebesar 2,61, tingkat inflasi Kota Gorontalo masih relatif tinggi.

Grafik 3.1.11
Perkembangan Inflasi Bulanan Gorontalo
Tahun 2022-2023



Perbandingan indeks harga konsumen dan tingkat inflasi di Kawasan Timur Indonesia, sebagaimana terlihat pada tabel 3.1.11, sebagai berikut:



Tabel 3.1.11
Perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan tingkat inflasi
di Kawan Timur Indonesia Desember 2023

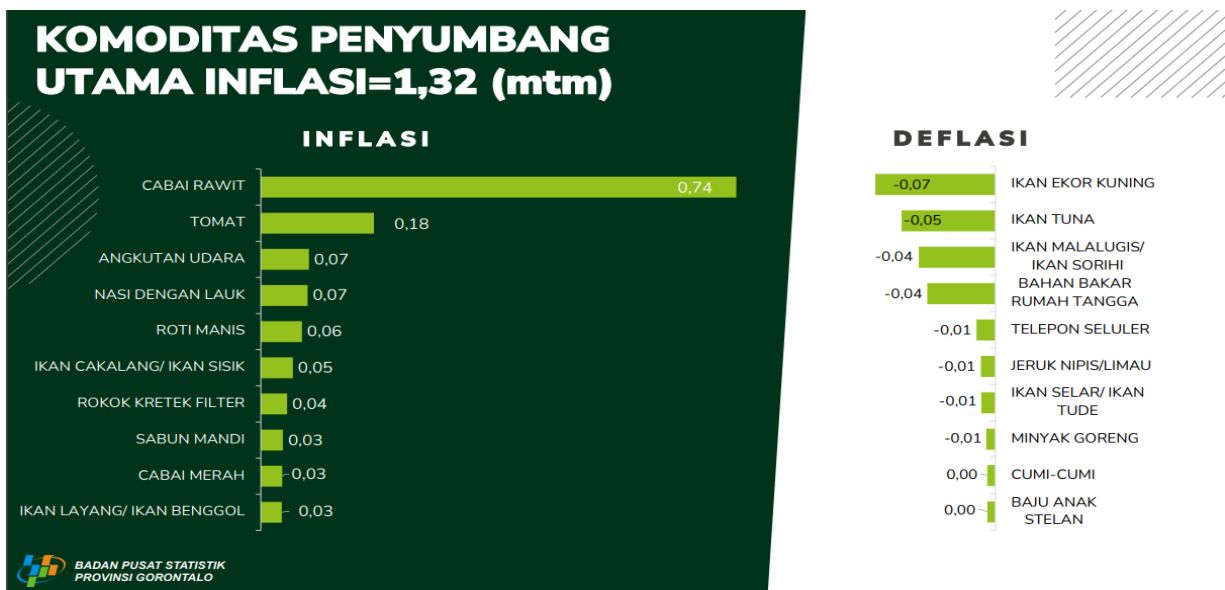
No.	Kota	IHK	Inflasi MtM (%)	Inflasi YoY (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	TERNATE	117,18	1,64	4,41
2	GORONTALO	117,01	1,32	3,88
3	MANOKWARI	120,89	1,13	2,39
4	BAU-BAU	117,61	1,01	2,48
5	TUAL	119,16	0,98	3,32
6	KOTAMOBAGU	120,06	0,94	3,40
7	MERAUKE	116,22	0,78	4,67
8	JAYAPURA	113,87	0,78	1,65
9	MAKASSAR	117,49	0,77	2,89
10	MANADO	116,14	0,68	2,87
11	WATAMPONE	115,77	0,65	2,84
12	LUWUK	122,58	0,59	4,35
13	BULUKUMBA	116,67	0,52	2,78
14	PALOPO	115,60	0,50	2,21
15	PARE-PARE	118,55	0,42	2,22
16	AMBON	120,05	0,37	2,77
17	TIMIKA	119,96	0,36	3,51
18	KENDARI	119,23	0,31	2,61
19	SORONG	114,38	0,23	3,09
20	MAMUJU	115,96	0,14	1,82
21	PALU	117,94	0,13	1,87

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Sementara itu, komoditas penyumbang utama inflasi baik *month to month* dan *year on year* salah satunya adalah cabai rawit. Selengkapnya sebagaimana di gambarkan pada gambar 3.1.12 di bawah ini:

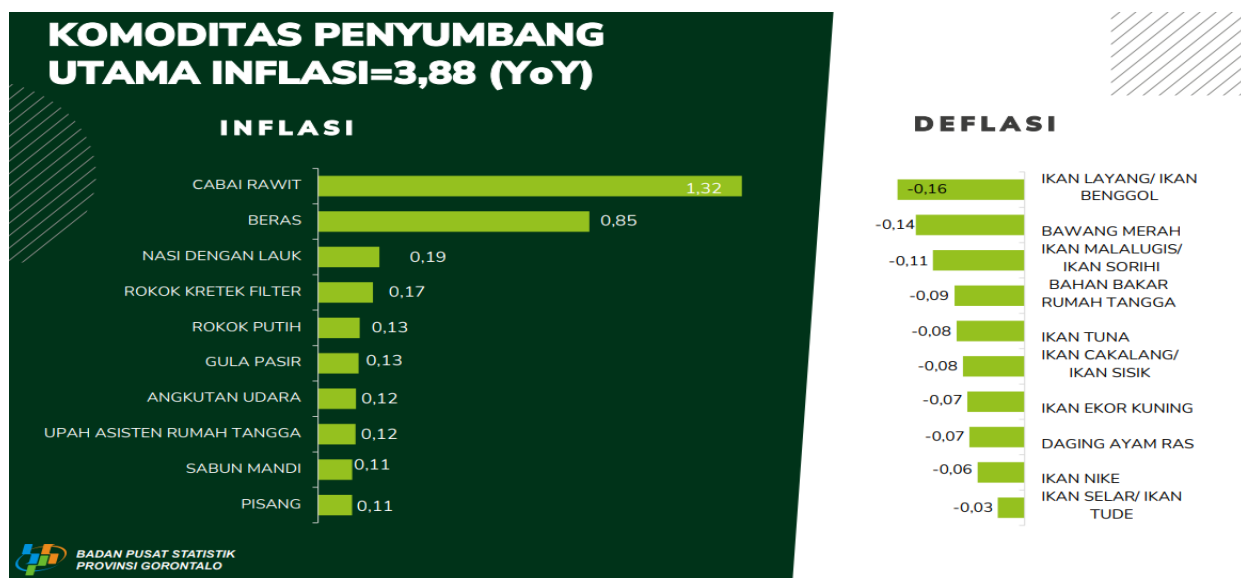


Gambar 3.1.12
Komoditas Penyumbang Utama/Andil inflasi dan Deflasi *Year On Year*
Gorontalo Bulan Desember 2023



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Gambar 3.1.13
Komoditas Penyumbang Utama/Andil inflasi dan Deflasi *Month To Month* Gorontalo Bulan Desember 2023



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Langkah-langkah yang telah di tempuh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka pengendalian Inflasi di Provinsi Gorontalo Tahun 2023:

Dalam rangka menjaga kestabilan inflasi di Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Forkopimda, KPw Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Bulog Gorontalo, dan Perangkat Daerah serta instansi terkait lainnya terus bersinergi dan berkolaborasi dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Beberapa upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 melalui strategi 4K diantaranya:

1. Keterjangkauan Harga

a. Pelaksanaan pasar murah bersubsidi, dengan menjual komoditas penyumbang inflasi, sudah dilaksanakan sebanyak 69 kali di Kab/Kota dengan mencover 65,516 KK.

b. Pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang sudah dilaksanakan sebanyak 24 kali di Kab/Kota.

c. Pelaksanaan sidak ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di distributor, bulog dan pasar tradisional, dilaksanakan secara berkala.

d. Bantuan social kepada masyarakat yang tidak mampu melalui program Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) sebanyak 10.000 KPM, penyaluran tahun 2023 sebanyak 4 kali/triwulan, dengan komoditas (beras 10 Kg, Telur 10 butir, minyak goreng 1 liter dan gula 2 Kg).

e. Pelaksanaan gelar pasar murah menjelang hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru 2024 untuk komoditi cabai rawit dan tomat di pasar sentral, Kota Gorontalo. Cabai rawit sebanyak 3.150 Kg dan tomat sebanyak 2.016 Kg.





- f. Pemantauan harga dan stok di pasar tradisional, pasar modern dan distributor yang dilaksanakan setiap hari.
 - g. Penguatan secara psikologis kepada masyarakat terkait stabilitas harga kebutuhan pokok yang disampaikan melalui media cetak.
 - h. Penyaluran bantuan pangan beras Tahun 2023 sebanyak 9.166.510 Kg di Kabupaten/Kota.
 - i. Bazar perikanan menjelang hari besar keagamaan (Ramadhan dan Idul Fitri).
 - j. Bantuan bahan pangan ikan untuk lembaga kesejahteraan social anak sebanyak 6 Bulan.
 - k. Peninjauan ketersediaan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan Natal dan tahun baru 2024 yang dipimpin langsung Pj. Gubernur Gorontalo pada gudang distributor dan gudang bulog Gorontalo.
2. Ketersediaan Pasokan.
- a. Memberikan bantuan saprodi untuk kampung cabai seluas 100 ha dan bantuan benih cabai seluas 50 ha.
 - b. Pemberian bantuan saprodi untuk kawasan bawang merah seluas 30 ha.
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana pertanian antara lain pupuk, pestisida dan sarana pendukung lainnya.
 - d. Kegiatan germas batari bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK.
 - e. Pencanaan Desa/Kelurahan siaga inflasi kerjasama TP PKK, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - f. Pemberian bantuan bahan pangan ikan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
3. Kelancaran Distribusi



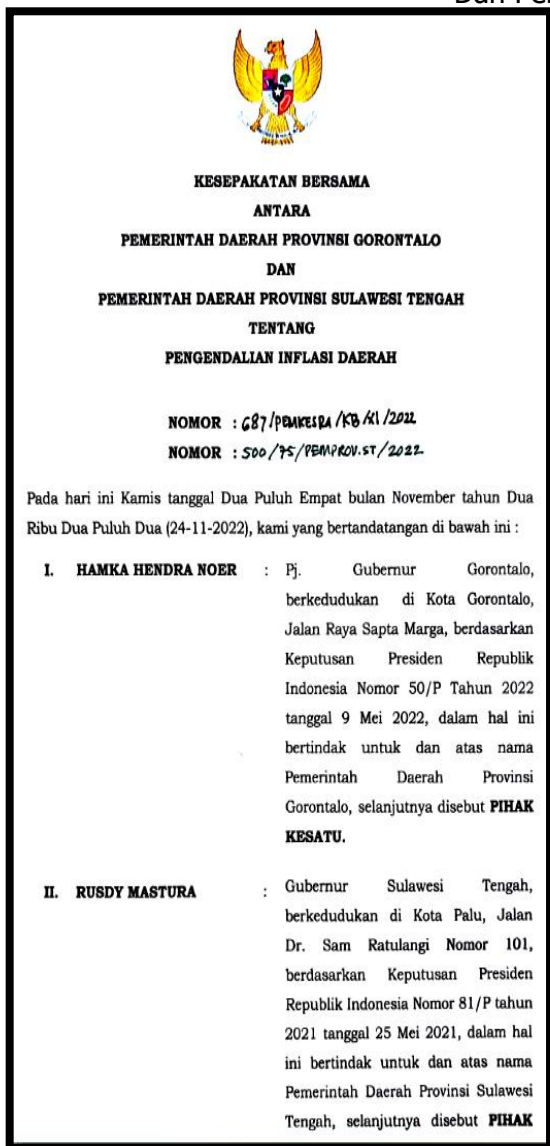


- a. Layanan subsidi angkutan keperintisan jalan, diantaranya adalah layanan subsidi angkutan BRT (2 koridor). Layanan subsidi angkutan perintis (4 lintasan), layanan subsidi bus siswa SMA NKRI gratis (5 wilayah), layanan subsidi bus pariwisata (2 koridor).
 - b. Bantuan sarana motor sayur sebanyak 42 unit.
 - c. Pemberian bantuan motor ber coolbox (motor ikan) sebanyak 173 unit.
 - d. Pemberian bantuan mesin temple 15 PK sebanyak 25 unit.
4. Komunikasi Efektif
- a. Pelaksanaan *High Level Meeting* TPID menjelang haribesar keagamaan Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H, menjelang Idul Adha 1444 H, serta menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2024.
 - b. KPw BI Provinsi Gorontalo bersama TPID Provinsi, Kota dan Kabupaten se Gorontalo melaksanakan *Capacity Building* ke TPID Provinsi Jawa Barat.
 - c. Penandatanganan Kerjasama antar daerah antara UD Rahman (Gorontalo) dengan Usaha Perdagangan cabai rawit Bpk. Erwin (Sulawesi Tengah) pada tanggal 23 Juli 2023.
 - d. Pemantauan dan penyebaran luasan informasi harga komoditi ekonomis penting perikanan melalui media cetak dan media elektronik.





Gambar 3.1.14
Komunikasi yang efektif bersama stakeholders
Dan Perjanjian Kerjasama



Sumber: Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi

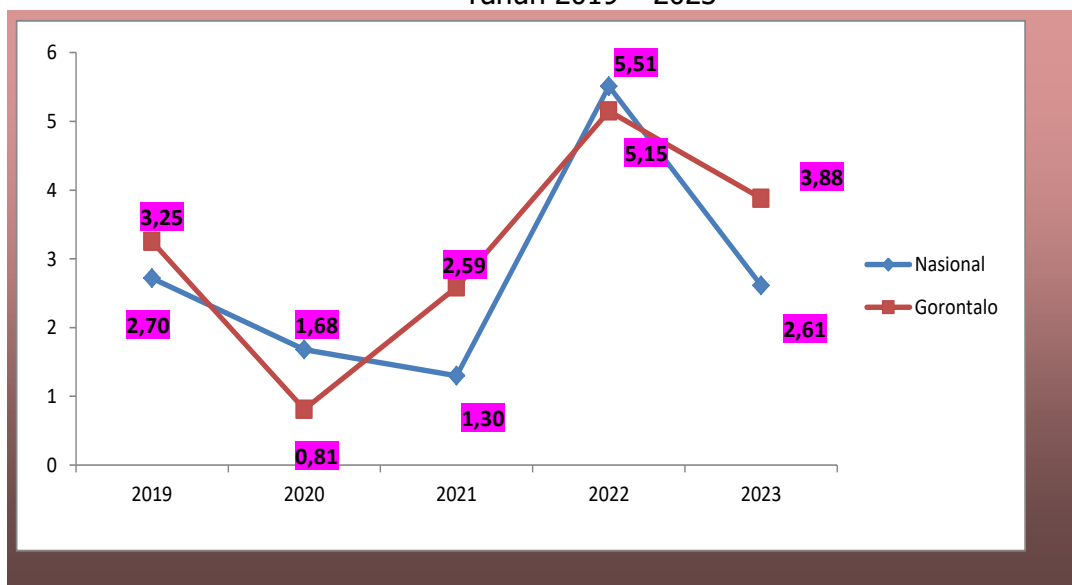
B. Upaya yang dilakukan

Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo terus dilaksanakan dan Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Gorontalo dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan bergejolak khususnya beras, cabai rawit, bawang merah dan tomat melalui pemanfaatan early warning system atau pemantauan langsung TPID seiring dengan risiko meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 sesuai dengan pola historis/musiman.
 - b. Mendorong keterjangkauan harga komoditas bahan pokok melalui pelaksanaan operasi pasar murah atau gelar pangan murah yang lebih intensif jelang HBKN Nataru.
 - c. Menjaga ekspektasi masyarakat untuk tidak melakukan konsumsi secara berlebihan (belanja bijak) melalui penyampaian moral suasion (komunikasi efektif) kepada masyarakat oleh TPID kabupaten dan kota.
 - d. Memanfaatkan peran bulog untuk membantu pengendalian harga terutama beras dan minyak goreng dan disiapkan 4 ton daging sapi untuk wilayah tertentu jelang HBKN Nataru.
2. Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi di Kabupaten/Kota sebanyak 29 kali dengan mengcover 21.077 KPM.
3. Penyaluran Bahan Pangan Beras oleh Perum Bulog Gorontalo sebanyak 1.307.890 Kg.
4. Penjualan Beras SPHP kepada Masyarakat sebanyak 461.880 Kg.
5. Pelaksanaan Gelar Pasar Murah Menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2024 untuk komoditi Cabai Rawit dan Tomat di Pasar Sentral, Kota Gorontalo. Cabai Rawit sebanyak 3.150 Kg dan Tomat sebanyak 2.016 Kg.
6. Sidak BBM dan LPG 3 kg di SPBU dan Pangkalan LPG 3 kg yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama TNI/POLRI dan Pertamina Gorontalo.
7. Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Melalui Program Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) sebanyak 10.000 KPM.

Perkembangan inflasi Gorontalo dibandingkan dengan Nasional selama 5 (lima) tahun terakhir tergambar pada grafik 3.1.15 sebagai berikut :

Grafik 3.1.15
Perkembangan Inflasi Tahunan Nasional dan Gorontalo (persen)
Tahun 2019 – 2023

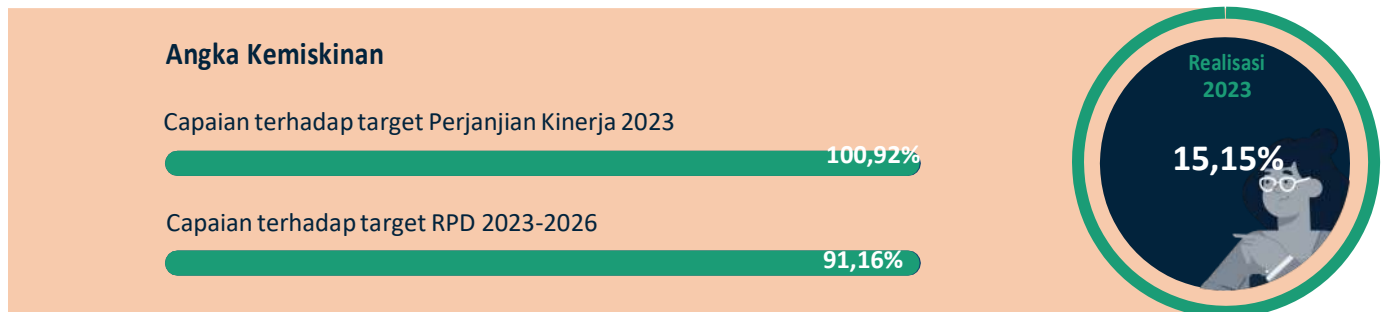


Sumber Data : BPS dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Grafik 3.1.15 tersebut diatas menunjukkan bahwa, pola inflasi Kota Gorontalo fluktuatif bila dibandingkan dengan inflasi nasional yang cenderung dibawah, kecuali di tahun 2023 ini inflasi Nasional turun yang pada tahun sebelumnya berada pada 5,51 persen menjadi 2,61 persen. Hal ini terlihat dari laju inflasi tahunan, selama periode tahun 2019 – 2023, dimana terdapat tiga periode waktu yang menunjukkan nilai inflasi Kota Gorontalo lebih tinggi dibandingkan nasional, yaitu pada tahun 2019, tahun 2021 dan tahun 2023.

Indikator Kinerja Persentase Angka Kemiskinan

A. Capaian Kinerja



Dari tabel 3.1.3 diatas dapat dilihat bahwa, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo tahun 2022 yang juga merupakan kondisi akhir perencanaan jangka menengah daerah periode 2017-2022 berada pada 15,51 persen atau capaian sebesar 95,98 persen. Dibandingkan dengan keadaan Kemiskinan di tahun 2021 yang sebesar 15,41 persen, kondisi di tahun 2022 meningkat sebesar 0,10 poin. Dan pada tahun 2023, kemiskinan Provinsi Gorontalo sebesar 15,15 persen, menurun 0,27 persen terhadap maret 2022.

Persentase penduduk miskin adalah salah satu indikator kinerja dalam rangka mengidentifikasi atau mengetahui sejauh mana program-program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat mampu mengentaskan/menanggulangi kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 187,35 ribu orang naik sebesar 2,75 ribu orang di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Pada Maret 2023 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 4,47 persen, menurun 0,02 persen poin dari kondisi September 2022 yang tercapat sebesar 4,49 persen. Penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 23,73 persen, menurun 0,79 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 24,52 persen.

Garis kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp. 442.194,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp. 339.799,-(76,84 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp. 102.395,0 (23,16 persen).

Selanjutnya akan digambarkan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1.16
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Rincian	Indikator	
	Persentase Penduduk Miskin (%) (2)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) (3)
(1)		
Perkotaan	4,47	24,12
Perdesaan	23,73	159,60
Jumlah	15,15	183,71

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Gambar 3.1.17
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2016-Maret 2023

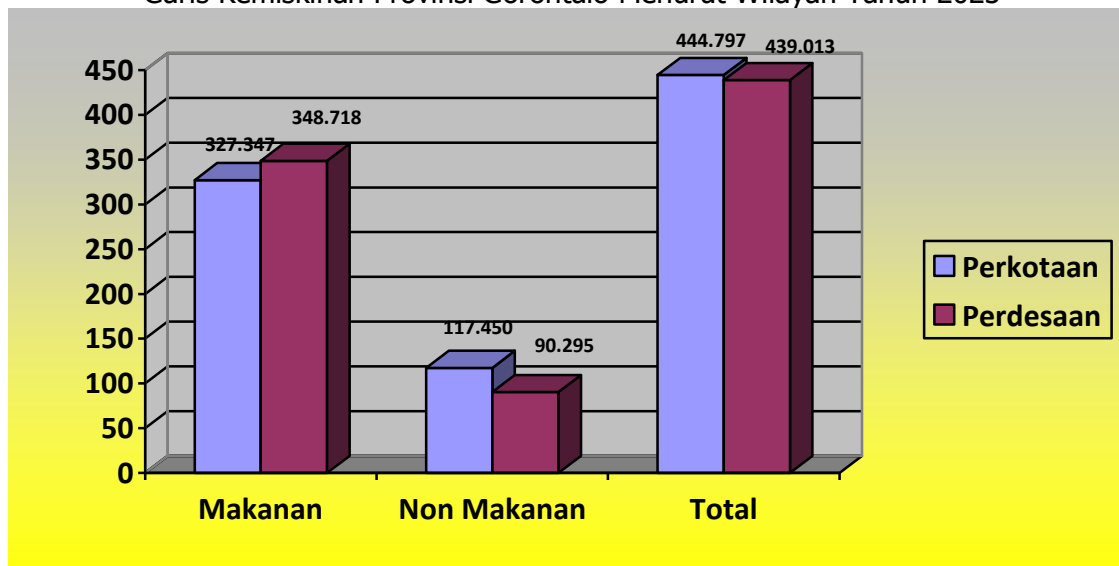


Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Dalam menentukan kategori kemiskinan atau miskin, tak lepas dari unsur garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan sangat menentukan besar kecil jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinsn Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis kemiskinan Provinsi Gorontalo pada September 2022 tercatat sebesar Rp 439.961,- per kapita per bulan dan pada Maret 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp. 442.194,0 per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp. 7.233,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 1,66 persen. Pada Maret 2023, GKM untuk daerah perkotaan tercatat sebesar Rp. 327.347,- dan perdesaan sebesar Rp. 348.718,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan di daerah perdesaan kurang mengandung kalori dibandingkan pola konsumsi di perkotaan, sehingga untuk mendapatkan kalori yang standar (2100kkl/hari) diperlukan harga yang lebih mahal.

Dibawah ini akan digambarkan garis kemiskinan di wilayah provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebagai berikut :

Gambar 3.1.18
Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo Menurut Wilayah Tahun 2023



Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Dari tabel 3.1.18 terlihat bahwa pada Maret 2023, GKNM daerah perkotaan adalah sebesar Rp 117.450,- dan perdesaan sebesar Rp. 90.295,- maka terlihat bahwa di daerah perkotaan, GKNM cenderung lebih tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa penduduk di daerah perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi daripada penduduk di daerah perdesaan. Hal ini tentu di pengaruhi oleh konsumsi kebutuhan non makanan di perkotaan yang lebih banyak dengan harga relative lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, seperti komoditi perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan, serta jasa. Bila dibedakan garis kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka garis kemiskinan di daerah perkotaan pada Maret 2023 adalah sebesar Rp. 444.797,- per kapita per bulan dan garis kemiskinan di daerah perdesaan sebesar Rp. 439.013,- per kapita per bulan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Kemiskinan di Provinsi Gorontalo selama periode Maret-September tahun 2023 antara lain:

- a. Selama periode September 2022-Maret 2023, angka inflasi umum Kota Gorontalo tercatat sebesar 0,83 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional pada periode yang sama tercatat sebesar 1,32 persen. Kota Gorontalo menempati urutan kedua angka inflasi umum terendah, setelah Mamuju, dari 13 kota IHK di Pulau Sulawesi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada periode September 2022-Maret 2023 mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1,72 persen, jauh lebih rendah daripada kenaikan indeks harga pada periode Maret 2022-September 2023 yang tercatat sebesar 4,58 persen.
- b. Nilai Tukar Petani (NTP) kondisi Maret 2023 tercatat sebesar 104,35, mengalami kenaikan sebesar 1,49 poin dibandingkan September 2022 yang tercatat sebesar 102,86. NTP sector tanaman pangan pada periode yang sama mengalami kenaikan 4,23 poin.
- c. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo Februari 2023 sebesar 3,07 persen, mengalami penurunan dibandingkan Februari 2022 yang tercatat sebesar 3,25 persen. Tingkat pengangguran terbuka di perdesaan pada periode yang sama mengalami penurunan dari 3,03 persen pada Februari 2022 menjadi 2,88 persen pada Februari 2023. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan pada periode yang sama mengalami penurunan dari 3,55 persen pada Februari 2022 menjadi 3,33 persen pada Februari 2023.
- d. Ekonomi Gorontalo triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 tumbuh sebesar 4,23 persen. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki kontribusi sebesar

38,02 persen pada triwulan I-2023, mengalami pertumbuhan sebesar 3,95 persen terhadap triwulan I-2022.

Terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan menghadapi permasalahan kemiskinan di Provinsi Gorontalo ini, pemerintah Gorontalo telah menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui strategi dan program yang diarahkan pada sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan berdasarkan data P3KE berbasis nama, alamat dan no induk. Adapun strategi dan program penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

2. Strategi

- ❖ Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
- ❖ Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
- ❖ Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi makro dan kecil.
- ❖ Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

3. Program

- ❖ Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- ❖ Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.
- ❖ Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Selain itu, optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Gorontalo juga terus dilakukan, dimana TKPK memiliki peran yang penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Adapun peran TKPK adalah:

1. Menjadi koordinator pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem agar pelaksanaan program antar OPD tidak tumpang tindih dan lebih tepat;

2. Menjembatani koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program lintas OPD dan lintas kementerian termasuk kepada pihak swasta, masyarakat dan perguruan tinggi;
3. Menganalisis karakteristik kemiskinan di wilayah masing-masing dan menemukan program pengentasan kemiskinan yang tepat sesuai dengan karakteristik wilayah dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
4. Memastikan ketersediaan anggaran program pengentasan kemiskinan dan memastikan program tersebut tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui sumber-sumber pendanaan yang sah (CSR, BUMD, NGO dan sebagainya);
5. Sebagai wadah pembentukan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang memuat wilayah prioritas dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Meskipun telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, tetapi Pemerintah Provinsi Gorontalo masih perlu berupaya lebih maksimal lagi, meningkatkan daya ungkit utamanya terhadap program dan kegiatan serta kebijakan-kebijakan lainnya yang berdampak, yang langsung dirasakan oleh masyarakat miskin. Terdapat beberapa permasalahan yang sampai dengan saat masih diperlukan solusi dan kebijakannya yaitu:

1. Basis data kemiskinan yang belum terpadu;
2. Program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya terintegrasi;
3. Kolaborasi dengan stakeholders belum optimal;
4. Kebijakan dan prosedur persyaratan penerima bantuan masih relatif rumit dan memberatkan masyarakat miskin, salah satu contoh: Petani miskin yang layak menerima bantuan, disyaratkan harus memiliki lahan sendiri, sementara mereka ini merupakan buruh tani. Pemilik lahan adalah orang-orang yang hidupnya berkecukupan.

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan strategi dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan ekstrem, sebagai berikut:



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

Gambar 3.1.19

Strategi dan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Konvergensi Program dari 3 (Tiga) Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

1. Menurunkan Beban Pengeluaran

- Bantuan Sosial:**
 - Program Sembako/BPNT
 - Program Keluarga Harapan
 - Program Indonesia Pintar
 - Program Bantuan dan Asistensi Lansia
 - Program Bantuan dan Asistensi Penyandang Disabilitas
- Jaminan Sosial:**
 - PBI-JKN
- Komitmen Subsidi:**
 - Subsidi Listrik
 - Subsidi LPG
- Lanjutan JPS Covid-19**
 - BST, BLT-D, Bantuan Presiden

2. Meningkatkan Pendapatan

- Produktivitas dan Inklusi Keuangan**
 - Pengembangan Potensi**
 - Prudes-BUMDes-inkubasi-Kluster
 - Pemberdayaan**
 - Pendampingan-PLUT
 - Transfer Aset**
 - Lahan-Sarana Produksi-Ternak
 - Pelatihan & Akses Pekerjaan**
 - Padat Karya & Pelatihan K/L-Pra-Kerja
 - Akses Modal & Asuransi**
 - KUR-UMI -Mekaar
 - Asuransi Tani, Ternak dan Nelayan
 - Akses dan Informasi Pasar**
 - Keperentaraan-Digitalisasi

3. Pengurangan Kantong-Kantong Kemiskinan

Terdapat lokasi percontohan antara Program Perumahan dan Perbaikan layanan Dasar:

- Program Sanitasi Berbasis Masyarakat
- Program Penyediaan Air Minum
- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- Program Kotaku
- Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak huni

Terdapat 8 lokasi konvergensi dan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah serta BUMN, pihak swasta maupun masyarakat

Sumber: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2023

Gambar 3.1.20

Intervensi Penanggulangan kemiskinan Ekstrem

Intervensi Berbasis Data Untuk Penurunan Kemiskinan Ekstrem

T FAKTA

- Nama : Pak Sudjadi
- Tinggal : Kab.Gorontalo
- Pekerjaan : Buruh tani
- Penghasilan : Rp 10-20 ribu/hari atau Rp 400.000/bulan.
- ART : 7 (tujuh) orang, 3 (tiga) anak (bekerja sebagai buruh tani)
- Pendidikan KRT : tidak ada.
- Pendidikan anak : SMP
- Program : PKH Rp 600.000/per triwulan, sembako, subsidi listrik.

ANALISIS KONDISI

- Status ekonomi : Miskin ekstrem (5% persentil terbawah) Rata-rata total **penerimaan Rp. 280 ribu/kapita** (1,9PPP= Rp.345.000,-).
- Bansos sudah tepat. Diusulkan masuk PBI-JKN
- Intervensi berikutnya: **usulan kepada Data Kewirausahaan untuk** keterampilan/ keahlian pengelolaan empon-empon.

T+1 FAKTA

- Nama : Pak Sudjadi
- Tinggal : Kab.Gorontalo
- Pekerjaan : Buruh tani, Wirausaha
- Penghasilan KRT : Rp. 400.000
- Penghasilan anak : Rp 1.800.000/bulan** (tambahan). Rp. 2,2 juta total
- ART : tidak berubah
- Pendidikan KRT: tidak berubah
- Pendidikan anak : tidak berubah
- Program : PKH, sembako, PBI, subsidi listrik, Program kewirausahaan (informal).

ANALISIS KONDISI

- Status ekonomi : Miskin (**penerimaan Rp. 378 ribu/ kapita**) (di bawah 10% persentil)
- Bansos PKH **transisi** graduasi, sembako dan subsidi listrik masih tepat.
- Intervensi berikutnya: akses permodalan dan pendampingan menuju wirausaha formal.

T+2 FAKTA

- Nama : Pak Sudjadi
- Tinggal : Kab.Gorontalo
- Pekerjaan : Buruh tani, Wirausaha
- Penghasilan KRT : Rp. 400.000
- Penghasilan anak : Rp 6.000.000/bulan** (tambahan), Rp. 6,4 juta total
- Program : PKH, sembako, PBI, subsidi listrik, Program kewirausahaan (informal).

ANALISIS KONDISI

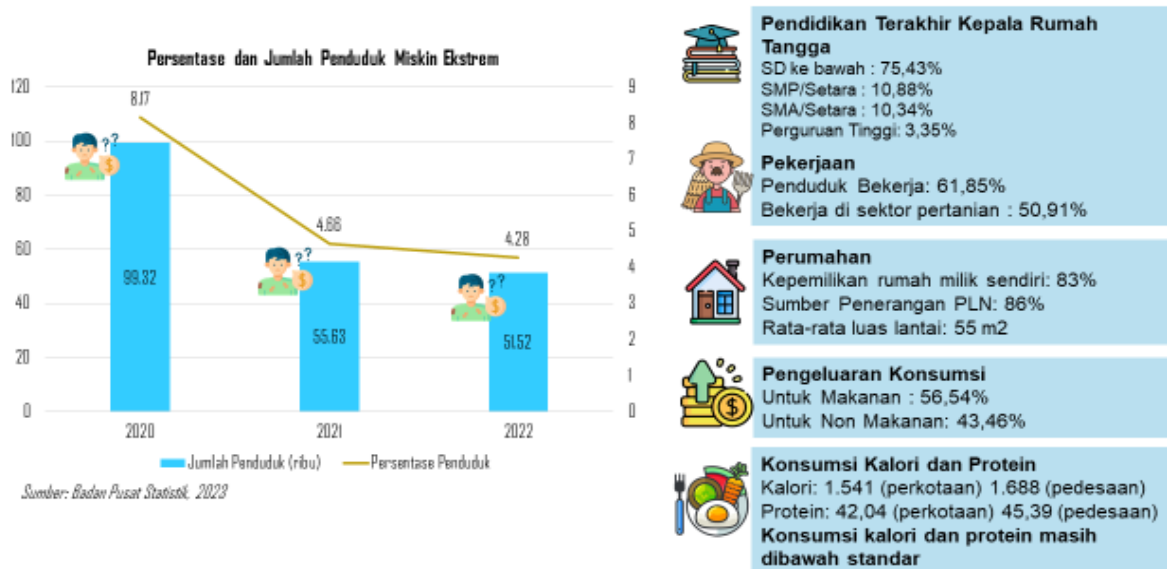
- Status ekonomi : Menuju menengah (**penerimaan Rp. 970 ribu/ kapita**) (di atas 16% persentil)
- Bansos PKH sembako, dan subsidi listrik, musdes mengusulkan graduasi ke DTKS.
- Intervensi berikutnya: perluasan usaha dan formalisasi. Keperantaraan dengan PT Bintang Toedjoe dan KUR untuk permodalan.

Sumber: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2023

Dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memetakan dan mengetahui karakteristik penduduk miskin ekstrem. Karakteristik penduduk miskin ekstrem di Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1.20
Karakteristik Penduduk Miskin Ekstrem

Karakteristik Penduduk Miskin Ekstrem di Provinsi Gorontalo

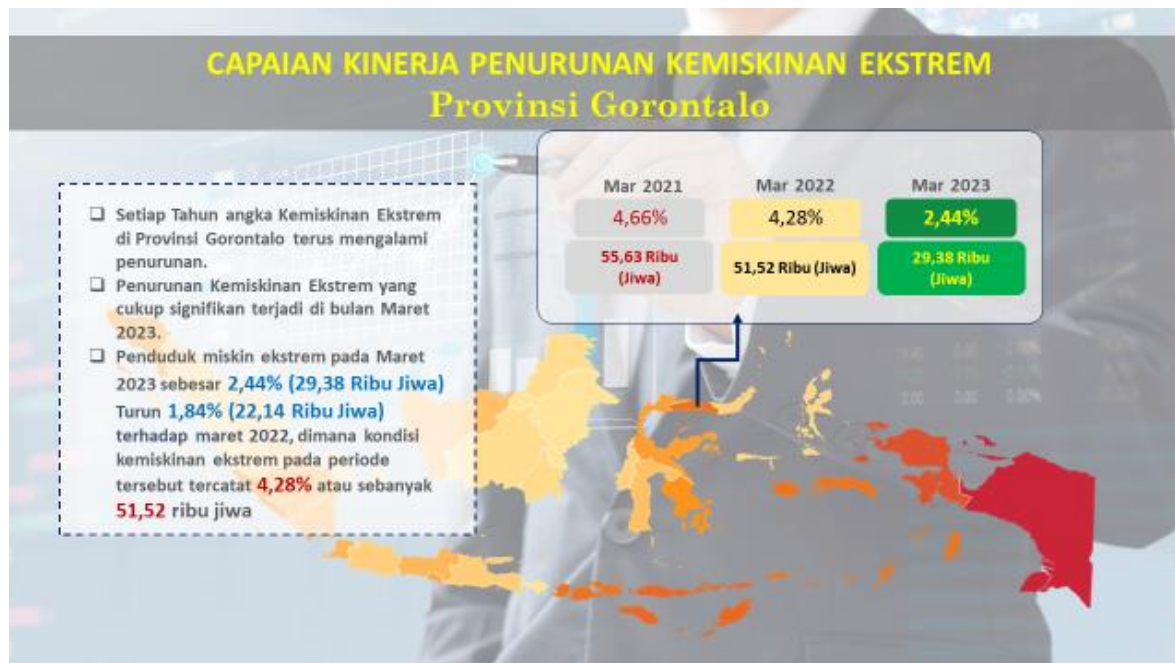


Sumber: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2023

Dengan tiga strategi yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan serta berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut, maka kemiskinan ekstem Provinsi Gorontalo tahun 2023 turun sebesar 1,84 persen dari 4,28 persen pada Maret 2022 menjadi 2,44 persen pada Maret 2023 atau sebanyak 29,38 ribu jiwa dari sebelumnya sebanyak 51,52 ribu jiwa penduduk miskin ekstrem. Capaian kinerja penurunan kemiskinan ekstrem akan di gambarkan sebagai beriku:



Gambar 3.1.21
Penurunan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Gorontalo



Sumber: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2023

Gambar 3.1.22
Penurunan Kemiskinan Ekstrem di setiap Pulau



Sumber: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2023

Untuk memastikan tercapainya target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, maka terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholders serta penyediaan data sasaran program yang mutakhir, akurat, dan berdasarkan status/tingkat kesejahteraan, melalui:

- pemanfaatan data sasaran yang sudah tersedia;
- validasi identitas penduduk berbasis NIK;
- pendataan penduduk berdasarkan nama, lokasi dan tingkat kesejahteraan;
- pendaftaran mandiri;
- integrasi berbagai jenis dan sumber data sosial dan ekonomi, baik data keluarga maupun data UMKM; dan
- selama belum tersedianya data yang termutakhirkan dan memiliki pemeringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk, maka dapat menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
 - ❑ Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat Data P3KE merupakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
 - ❑ Data P3KE digunakan sebagai sumber data untuk mempertajam pensasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (Kepmenko PMK No.30 Tahun 2022)
 - ❑ Data P3KE dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen membutuhkan upaya *extraordinary* dan koordinasi lintas KL/OPD dan lintas lapis pemerintahan.

B. Upaya yang dilakukan

Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo yang terus dilakukan sampai dengan saat ini adalah mengoptimalkan program/kegiatan daerah yang ada dalam rangka pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan, anata lain adalah:

- Penguatan peran TKPK sebagai *coordination-hub* penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah sesuai Permendagri No. 53/2020;
- Penguatan basis data dengan meminimalkan *exclusion error* (menjangkau RT miskin ekstrem);
- Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem (menyasar RT miskin ekstrem);
- Konvergensi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (melalui TKPK) untuk memastikan efektivitas, efisiensi dan keberlanjutan program;
- Memberikan bantuan yang bersumber dari APBD kepada kelompok miskin ekstrem yang tidak tercakup oleh program pusat;
- Penguatan kolaborasi kerja dengan sektor non-pemerintah;
- Memastikan program, baik terkait penurunan beban pengeluaran maupun peningkatan pendapatan tercakup dalam APBD.

Selanjutnya, akan digambarkan perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama yang juga merupakan indikator makro daerah dengan target Nasional, sebagaimana pada tabel 3.1.23 berikut ini :

Tabel 3.1.23
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Nasional	Capaian (%)
1	3	4	5	6
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,50%	5,7%	78,95
2	Indeks Gini	0,417	0,374	88,50
3	PDRB Perkapita (US\$)	2.779	5.810	47,83
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,06%	4,3%	128,84
5	Inflasi	3,88%	2,7%	56,30
6	Persentase Angka Kemiskinan	15,15%	6,0%	-52,50

Sumber Data : RPJMN 2020-2024 dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Dari tabel 3.1.23 dapat dilihat bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dibandingkan dengan target Nasional rata-rata capaiannya masih dibawah target Nasional. Meskipun demikian untuk tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo sudah melebihi target Nasional sebesar 3,06 persen dari target Nasional sebesar 4,3 Persen.

Terdapat capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mendukung kinerja utama tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Kinerja ini tentunya sangat menentukan pencapaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kinerja pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.24
Capaian Kinerja Pendukung Pemerintah Provinsi Gorontalo
Yang mendukung Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	38,14	37,75	98,98
2.	Indeks Ketahanan Pangan	80	80,35	100,43
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	104,46	104,97	111,32
4.	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	105,01	109,9	115,84
5.	Nilai Tukar Nelayan – Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	97,77	95,44	97,62
6.	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	5,27	4,42	83,87
7.	Nilai Ekspor (juta USD)	14.102.573	37.959.205	269,17
8.	Realisasi PMA/PMDN (milyar)	2.600	5.515	212,13
9.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,5	2,4	96,11
10.	Kemiskinan perdesaan (%)	23,5	23,75	98,93
11.	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	62,96	70,23	111,54
12.	Rasio Elektrifikasi	99,50	99,99	100,49
13.	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	25	4,6	18,40
14.	Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	59	79,31	134,00
15.	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,5	0,553	100,00
16.	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	91%	83,59%	91,86
17.	Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial	21	11,42	54,38

Sumber: Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

C. EFISIENSI



Dalam mencapai Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat yang realisasi kinerjanya didukung oleh 6 (enam) indikator kinerja utama dan 17 (tujuh belas) indikator pendukung dengan berbagai program dan kegiatan, maka persentase realisasi anggaran dihitung dari rata-rata realisasi anggaran program yang mendukung semua indikator tersebut. Sementara itu, capaian kinerja dihitung dari rata-rata capaian kinerja dari semua indikator kinerja tersebut.

Efisiensi dihitung dengan membandingkan antara capaian realisasi anggaran dengan capaian kinerja.

Capaian kinerja Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat dari rata-rata capaian indikator kinerja adalah 116,62 persen. Sementara itu, Alokasi anggaran terhadap program-program dalam mendukung kinerja ini adalah sebesar Rp. 279.203.123.795,00 dengan realisasi Rp. 275.367.457.916,00 atau 97,91 persen. Adapun program-program yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja ini adalah sebagai berikut: 1) program pengelolaan perikanan tangkap, 2) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, 3) program perencanaan dan pembangunan industry, 4) program pengelolaan system informasi industry Nasional, 5) program pengembangan ekspor, 6) program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, 7) program penanganan kerawanan pangan, 8) program pengawasan keamanan pangan, 9) program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, 10). program pemasaran pariwisata, 11) program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, 12) program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, 13) Program penyelenggaraan jalan, 14) program pengelolaan dan pengembangan drainase, 15) program peningkatan kerja

sama desa, 16) program administrasi pemerintahan desa, 17) program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, 18). program pengembangan iklim penanaman modal, 19) program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, 20) program promosi penanaman modal, 21) program pelayanan penanaman modal, 22) program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, 23) program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, 24) program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, 25) program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, 26) program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, 27) program penyuluhan pertanian, 28) program kawasan permukiman, 29) program perlindungan dan jaminan sosial, 30) program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, 31) program penempatan tenaga kerja, 32) program hubungan industrial, 33) program pengelolaan ketenagalistrikan, 34) program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, 35) program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, 36) program pendidikan dan pelatihan perkoperasian, 37) program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, 38) program standarisasi dan perlindungan konsumen, 39) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha makro, serta 40) program pengembangan UMKM.

Dengan demikian, jika dinilai dari sisi efisiensi anggaran, didapatkan nilai sebesar 0,83 persen poin yang berarti bahwa penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja ini telah "efisien" (nilai hasil perbandingan realisasi anggaran dengan nilai kinerja kurang dari 1 poin).



Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Meningkatkan Sumber Daya Manusia ini akan dijabarkan atau dicapai dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.25
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPD

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s.d Akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,00	70,62	71,15	71,25	100,14	72,17	98,72

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Dari tabel 3.1.25 diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 71,25 dari target yang ditetapkan sebesar 71,15 atau capaian sebesar 100,14 persen. Pada tahun 2022 IPM Provinsi Gorontalo sebesar 70,62 dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 69,62 atau capaian sebesar 100,27 persen. Pada table 3.1.24 tersebut dapat dilihat IPM Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebesar 69,00. Dari angka-angka diatas dapat dilihat bahwa IPM Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa IPM Provinsi Gorontalo terus membaik dan mengalami kemajuan seiring dengan makin pesatnya perkembangan zaman yang dibarengi dengan semakin majunya teknologi informasi.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia

A. Capaian Kinerja

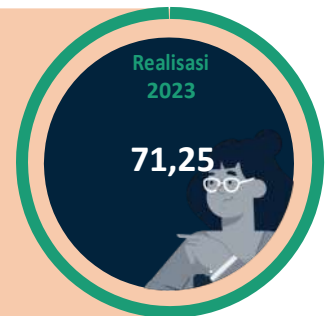
IPM

Capaian terhadap target Perjanjian Kinerja 2023

100,14%

Capaian terhadap target RPD 2023-2026

98,72%



Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo. IPM Provinsi Gorontalo Tahun 2023 meningkat 0,63 poin (0,89 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (70,62). Selama 2020-2023, IPM Provinsi Gorontalo rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen per tahun. Peningkatan IPM 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Pertumbuhan Indeks pembangunan manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningklatan, terutama pengetahuan.

- Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,50 tahun, lebih lama 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.
- Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk berusia 7 tahun meningkat 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. dari 13,12 menjadi 13,16 sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,02 tahun menjadi 8,10 tahun pada tahun 2023.
- Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 382 ribu rupiah (3,57 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo terus mengalami kemajuan sejak tahun 2022, status pembangunan manusia Provinsi Gorontalo sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020-2023, IPM Provinsi Gorontalo rata-rata meningkat 0,83 persen per tahun, dari 69,51 pada tahun 2020 menjadi 71,25 pada tahun 2023.

Dibawah ini akan digambarkan IPM Provinsi Gorontalo beserta komponennya selama lima tahun terakhir.

Gambar 3.1.26
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo
beserta komponennya

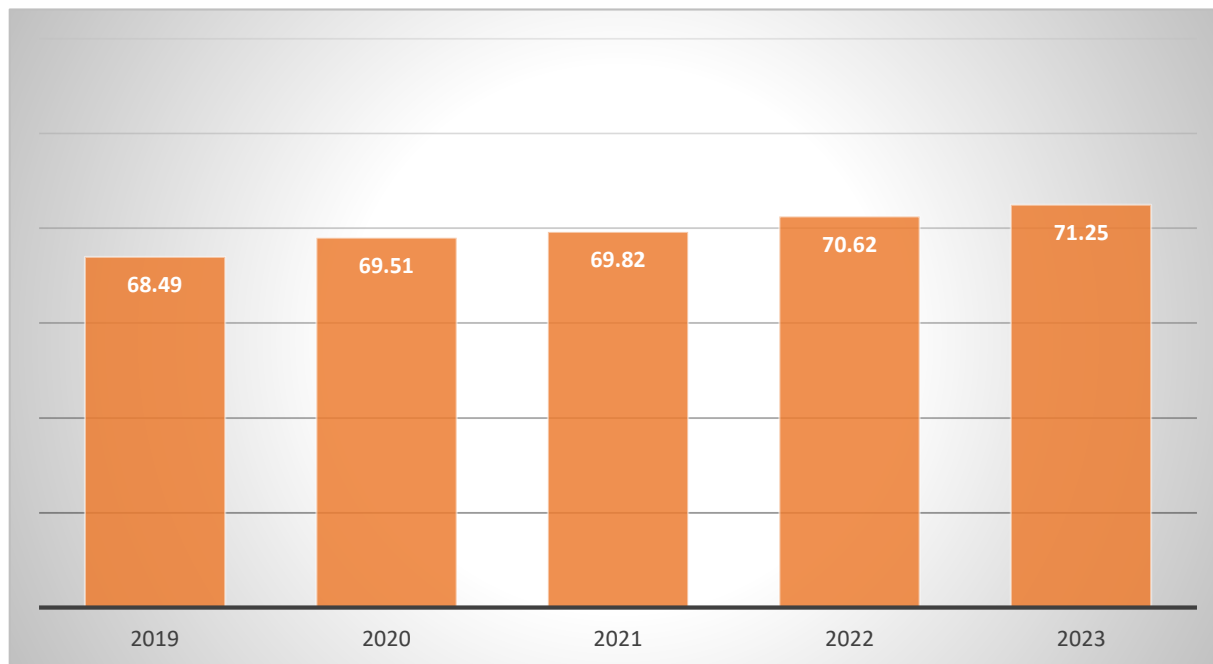
Komponen	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	67,45	68,07	68,19	68,51	70,50
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,06	13,08	13,11	13,12	13,16
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,11	7,82	7,90	8,02	8,10
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	10,075	10,020	10,157	10,157	11.069
IPM		68,49	68,68	69,00	69,81	71,25
Pertumbuhan IPM	%	1,15	0,28	0,47	1,17	0,89

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam satu periode, sedangkan status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode yang di namai dengan level Rendah ($IPM < 60$), Sedang ($60 \leq IPM < 70$), Tinggi ($70 \leq IPM < 80$) dan Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$).

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama pengetahuan. Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhannya yaitu Harapan Lama Sekolah sebesar 0,30 persen disbanding tahun sebelumnya sebesar 0,08 persen. Sementara Umur Harapan Hidup saat lahir pertumbuhannya sedikit melambat dari 0,41 persen menjadi 0,40 persen. Demikian juga Rata-rata Lama Sekolah pertumbuhannya juga melambat dari 1,52 persen menjadi 1,00 persen dan Pengeluaran Riil per Kapita dari 5,22 persen menjadi 3,57 persen. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunannya selama tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Gambar 3.1.27 dibawah ini.

Gambar 3.1.27
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat di Provinsi Gorontalo terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,67 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,32 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Provinsi Gorontalo adalah 69,83 tahun, dan pada tahun 2023 mencapai 70,50 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,28 tahun (0,40 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,28 persen per tahun).

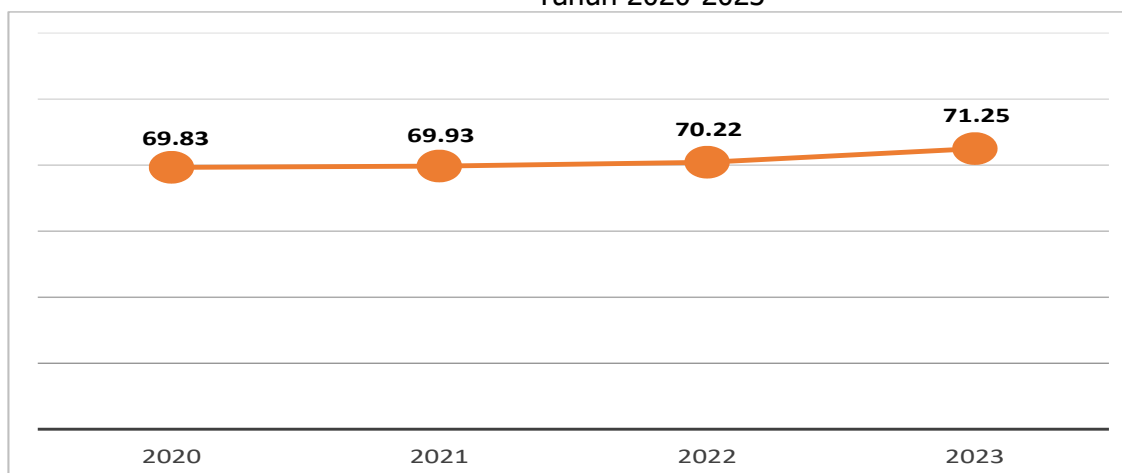
Usia Harapan Hidup, selain sebagai salah satu komponen dalam penetapan indeks pembangunan manusia, usia harapan hidup juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program bidang kesehatan yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk terus mengawal dan terus mendukung pencapaian kinerja

peningkatan UHH ini, dilakukan upaya-upaya melalui pelaksanaan program-program kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat yang antara lain adalah sebagai berikut :

- Program penguatan intervensi stunting;
- Program kesehatan masyarakat;
- Program pelayanan kesehatan dan JKN;
- Program pencegahan dan pengendalian penyakit;
- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan UHH Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut :

Gambar 3.1.28
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Gorontalo
Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

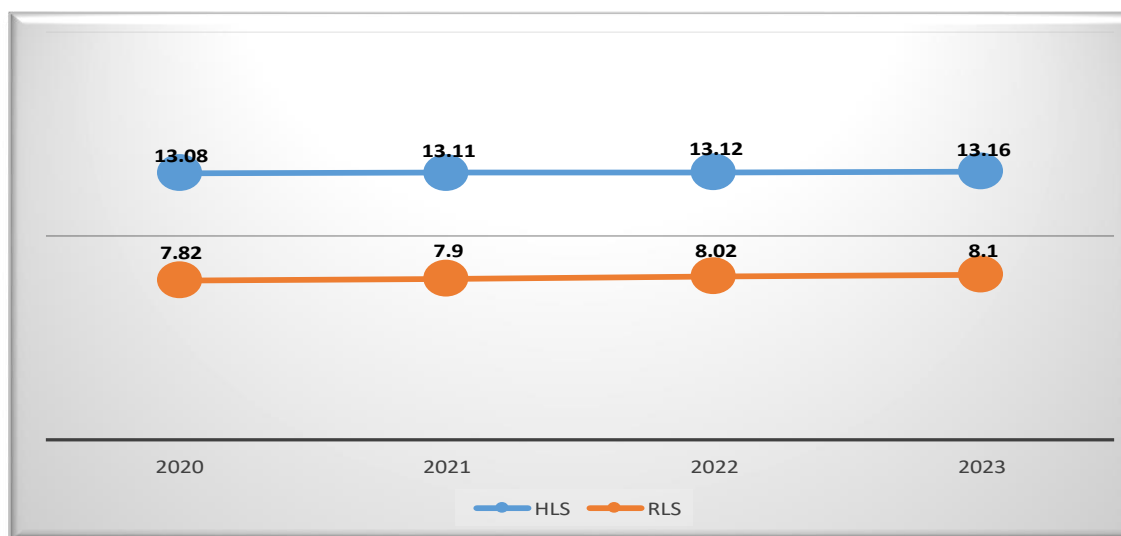
Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang diharapkan mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Kedua indicator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Provinsi Gorontalo rata-rata meningkat 0,20 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,18 persen

per tahun. HLS tahun 2023 meningkat 0,04 tahun (0,30 persen) dibandingkan tahun 2022, mengalami percepatan dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,15 persen).

Dibawah ini akan digambarkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

Gambar 3.1.29
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
di Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2023



Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Program-program pemerintah dalam rangka mendukung dan meningkatkan IPM di provinsi Gorontalo yaitu program pendidikan untuk rakyat merupakan salah satu program pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi sekolah sehingga dapat meningkatkan harapan lama sekolah di Provinsi Gorontalo. Begitu pula program pemerintah lainnya yaitu Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Beberapa kegiatan nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka pencapaian kinerja ini antara lain adalah :

- Menuntaskan Gorontalo bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal;
- Melakukan pembinaan terhadap guru dan tenaga kependidikan;
- Memberikan pendidikan gratis, meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.

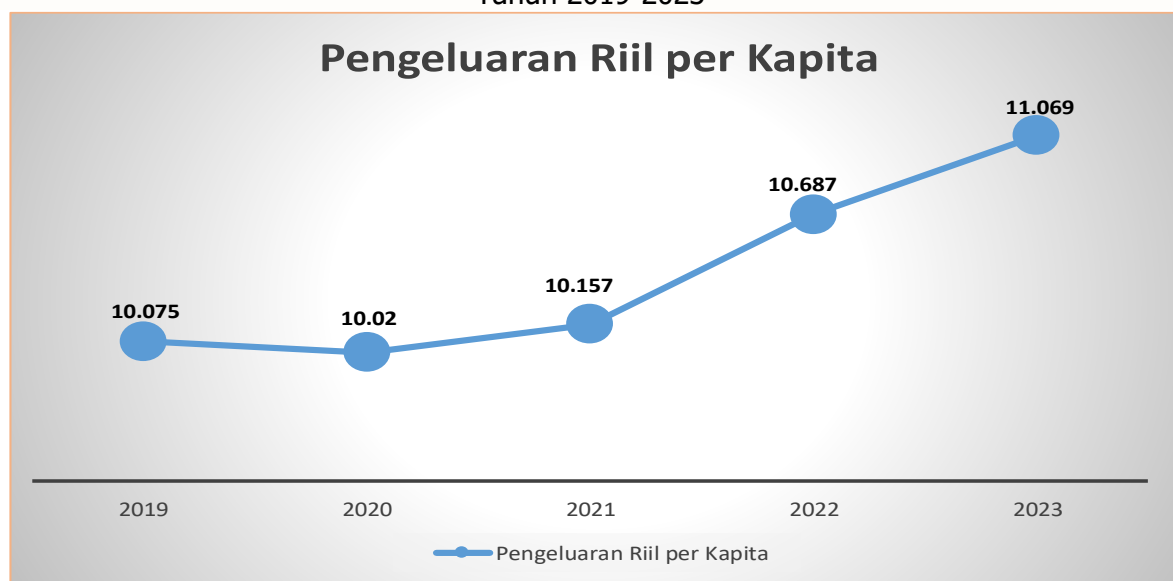
Dimensi Standar Hidup Layak

Purchasing Power Parity / Paritas Daya Beli merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah. Untuk mengukur dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga kinstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023 pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Provinsi Gorontalo mencapai Rp. 11,07 juta per tahun. Capaian ini meningkat 382 ribu rupiah (3,57 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 3,29 persen per tahun.

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan pengeluaran per kapita per tahun di Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Gambar 3.1.30
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun di Provinsi Gorontalo
Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Selama sepuluh tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat meningkat sebesar 2,31 persen per tahun. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan di Provinsi Gorontalo sebesar 10,020 ribu rupiah. Pengeluaran per kapita tahun 2020 turun sebesar Rp. 55.000 atau -0,55 persen. Penurunan nilai pengeluaran per kapita masyarakat tersebut diakibatkan adanya pandemi Covid-19. Hal itu menjadi salah satu pemicu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo tahun 2020 yang hanya sebesar 68,68 atau hanya tumbuh 0,28 persen, dimana pertumbuhan tahun 2020 merupakan pertumbuhan terendah dalam satu dekade terakhir. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sehingga berdampak pada pengeluaran per kapitapun turun.

Pada tahun 2023, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota cukup bervariasi. IPM pada level Kabupaten/Kota berkisar antara 68,00 (Kabupaten Gorontalo Utara) hingga 78,64 (Kota Gorontalo). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur harapan hidup saat lahir berkisar antara 69,40 tahun (Kabupaten Pohuwato) hingga 73,25 tahun (Kota Gorontalo). Sementara pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah berkisar antara 12,46 tahun (Kabupaten Pohuwato) hingga 14,58 tahun (Kota Gorontalo), serta rata-rata lama sekolah berkisar antara 7,17 tahun (Kabupaten Gorontalo Utara) hingga 10,40 tahun (Kota Gorontalo). Pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat Kabupaten/Kota berkisar antara 9,94 juta rupiah per tahun (Kabupaten Boalemo) hingga 13,35 juta rupiah per tahun (Kota Gorontalo). Status pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari 3 Kabupaten yang berstatus "sedang" yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara, dan 3 wilayah yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo yang berstatus "tinggi" pada tahun 2023. Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level Kabupaten/Kota. Pada periode 2022-2023, tercatat dua kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Boalemo (1,36 persen) dan Kabupaten Gorontalo (1,24 persen).

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan capaian dan status pembangunan manusia menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2023, sebagai berikut:

Gambar 3.1.31
Capaian dan Status Pembangunan Manusia Kab/Kota
Se-Provinsi Gorontalo 2023

Kab/Kota	IPM	Kemajuan IPM (%)	Status IPM
Kota Gorontalo	78,64	0,54	Tinggi
Kabupaten Gorontalo	70,37	1,24	Tinggi
Kabupaten Boalemo	68,78	1,36	Sedang
Kabupaten Pohuwato	69,30	0,92	Sedang
Kabupaten Bone Bolango	71,97	0,81	Tinggi
Kabupaten Gorontalo Utara	68,00	0,88	Sedang

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Sementara itu, penyumbang Peningkatan IPM tahun 2023 Kabupaten/Kota yang didukung oleh dimensi penyusunnya yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak, rata-rata mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Pada table dibawah ini akan menggambarkan IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, 2022-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1.32
Komponen IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
Tahun 2022-2023

Kab/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kota Gorontalo	72,88	73,25	14,57	14,58	10,39	10,40	13.077	13.351
Kabupaten Gorontalo	70,54	70,81	13,19	13,21	7,61	7,79	9.850	10.336
Kabupaten Boalemo	70,94	71,24	12,46	12,48	7,03	7,30	9.543	9.543
Kabupaten Pohuwato	69,07	69,40	12,39	12,46	7,35	7,59	10.913	11.018
Kabupaten Bone Bolango	69,90	70,19	13,66	13,67	8,33	8,35	10.679	11.114
Kabupaten Gorontalo Utara	69,33	69,65	12,47	12,49	7,16	7,17	9.636	10.037

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

B. Upaya yang dilakukan

Dimensi Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk, artinya jika angka harapan hidup meningkat, maka derajat kesehatan penduduk juga meningkat serta memperpanjang usia harapan hidupnya. Sebagai salah satu dimensi dalam penilaian IPM di Indonesia, Angka Harapan Hidup memiliki beberapa unsur yang harusnya dapat menunjang lamanya usia masyarakat. Unsur yang paling penting adalah kesehatan masyarakat. Pada dasarnya kesehatan masyarakat memiliki banyak unsur dan tidak lepas dari jasa pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, bidan dan jasa kesehatan lainnya.

Banyak upaya telah dilakukan dalam peningkatan AHH di Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan masyarakat antara lain adalah:

- penyebaran tenaga medis serta pemerataan ilmu kesehatan sampai ke desa-desa terpencil.
- membuat pos kesehatan atau puskesmas dengan radius yang memadai, sehingga pertolongan pertama dapat dilakukan.
- memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat atau organisasi di desa sebagai kader kesehatan. Hal ini untuk mengurangi resiko kematian serta membuat pelayanan kesehatan semakin dekat dan murah.

Dalam dimensi pendidikan terdapat 2 hal yang dinilai dalam IPM yaitu Rata Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Pendidikan yang lama menciptakan peluang dalam mengasah keterampilan dan menciptakan rasa ingin tahu yang tak terbatas.

Upaya yang terus dilakukan adalah meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi.

Dimensi ke 3 adalah Standar Hidup Layak Standar Hidup Layak diukur menggunakan pengeluaran per kapita setiap tahunnya. Sehingga perlu adanya segmentasi komoditas kepada masyarakat untuk mendukung kebutuhan yang ada. Upaya yang terus dilakukan salah satunya adalah membuat masyarakat utamanya masyarakat desa untuk mengurangi daya beli terhadap kebutuhan pokok, dengan memanfaatkan lahan sebagai sumber makanan sehari hari, maka daya beli untuk komoditas lain akan meningkat. Selain itu penggunaan lahan yang tepat juga dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Selanjutnya, pada tabel 3.1.33 di bawah ini akan digambarkan perbandingan antara IPM Provinsi Gorontalo dan capaian IPM Nasional sebagai berikut :

Tabel 3.1.33
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Nasional	Capaian (%)
1	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,25	75,54	94,32

Sumber Data : RPJMN 2020-2024 dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Dari tabel 3.1.33 tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja atas pencapaian indeks pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo tahun 2023 dibandingkan dengan target Nasional mencapai 94,32 persen. Sementara jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional, IPM Gorontalo masih dibawah IPM Nasional yang sebesar 74,39.

Terdapat capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mendukung kinerja utama tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Kinerja ini tentunya sangat menentukan pencapaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu pencapaian indeks pembangunan manusia. Kinerja pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.34
Capaian Kinerja Pendukung Pemerintah Provinsi Gorontalo
Yang mendukung Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka partisipasi sekolah	100%	86,05%	86,05
2.	Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B	100%	65,38	65,38
3.	Persentase Penyandang disabilitas yang bersekolah	100%	100%	100,00
4.	Angka harapan hidup	68,80	68,83	100,04
5.	Prevalensi Stunting	26,00	23,80	91,54
6.	Indeks pembangunan Gender	87,03	88,12	101,25
7.	Indeks Perlindungan Anak	67,47	66,36	98,35
8.	Indeks pembangunan literasi Masyarakat	59,20	70,39	118,90

Sumber: Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

C. EFISIENSI



Dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebagai kinerja utama yang didukung oleh 8 (delapan) indikator kinerja pendukung dengan berbagai program dan kegiatan, maka persentase realisasi anggaran dihitung dari rata-rata realisasi anggaran program yang mendukung semua indikator tersebut. Sementara itu, capaian kinerja adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023.

Efisiensi dihitung dengan membandingkan antara capaian realisasi anggaran dengan capaian kinerja.

Capaian kinerja indeks pembangunan manusia mencapai 100,14 persen. Sementara itu, Alokasi anggaran terhadap program-program dalam mendukung kinerja ini adalah sebesar Rp. 303.097.181.952,00 dengan realisasi Rp. 290.814.731.943,00 atau 95,95 persen. Adapun program-program yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja ini adalah sebagai berikut: 1) program pengelolaan pendidikan, 2) program pengembangan kurikulum, 3) program perlindungan khusus anak, 4) program pemenuhan hak anak, 5) program pengelolaan system data gender dan anak, 6) program peningkatan kualitas keluarga, 7) program perlindungan perempuan, 8) program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, 9) program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, 10). program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, 11) program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, 12) program pembinaan keluarga berencana, 13) program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, 14) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, 15) program pembinaan perpustakaan.



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

Dengan demikian, jika dinilai dari sisi efisiensi anggaran, didapatkan nilai sebesar 0,95 persen poin yang berarti bahwa penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja ini telah "efisien" (nilai hasil perbandingan realisasi anggaran dengan nilai kinerja kurang dari 1 poin).



Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur dengan menetapkan indikator 1). Penurunan emisi gas rumah kaca, dan 2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Gubernur (Pemerintah Provinsi Gorontalo) Tahun 2023. Sasaran strategis ini akan dijabarkan atau dicapai dengan kinerja utamanya adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.34
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s.d Akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	-	-	30	27,30	91,00	30	91,00
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,32	79,79	74,31	79,52	107,01	75,83	104,87

Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan indikator penurunan gas rumah kaca dalam lima tahun kedepan yang dimulai sejak tahun 2023 ini dipandang penting oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyikapi global warning yang mengakibatkan berbagai akibat, salah satunya adalah perubahan iklim yang nyata-nyata sudah terjadi saat ini, terutama perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil. Gas yang dilepaskan ini akan menangkap panas di atmosfer dan menyebabkan peningkatan suhu global, yang menghasilkan berbagai dampak negatif pada kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi.

Perubahan iklim yang kita alami saat ini adalah kenaikan temperatur yg signifikan, adanya iklim anomali, kemudian terjadi beberapa kenaikan permukaan air laut, dan sekarang sudah kita alami adalah terjadinya kelangkaan air, energi, dan pangan.

Indikator Kinerja Penurunan Gas Rumah Kaca

A. Capaian Kinerja

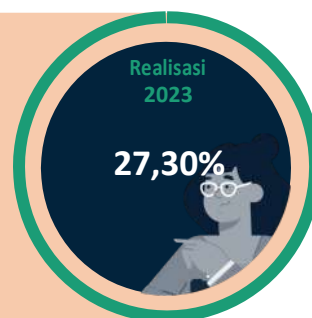
Penurunan Gas Rumah Kaca

Capaian terhadap target Perjanjian Kinerja 2023

91,00%

Capaian terhadap target RPD 2023-2026

91,00%



Perubahan iklim juga berdampak negatif yaitu menyebabkan bencana alam seperti badai, kekeringan, dan banjir, yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan kerusakan properti. Perubahan iklim juga mempengaruhi produktifitas pertanian dan keamanan pangan, karena pola cuaca yang berubah membuat sulit untuk menanam tanaman dan memelihara hewan ternak. Hal ini juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan ancaman terhadap populasi manusia.

Selain itu, penetapan indikator kinerja ini didorong oleh tingginya komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendukung target kinerja Nasional terhadap penurunan emisi GRK utamanya di sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi yaitu Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yakni meningkatkan emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030. Kemudian mendukung net zero emission sektor kehutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen NET 2030 LTS – LCCR 2050.

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas-gas di atmosfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah dan ikut menentukan suhu atmosfer. Gas ini yang terdiri dari Karbon Dioksida

(CO₂), Metana (CH₄), *Dinitrogen Mono Oksida* (N₂O), *Hidro Fluorocarbon* (HFCs), *Sulfur Hexafluorida* (SF₆), *Perfluoro Karbon* (PFCs), dan gas-gas turunan lainnya. Pemerintah telah berkomitmen ikut serta dalam pengendalian perubahan iklim dengan menurunkan emisi GRK. Inventarisasi GRK dilakukan untuk monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang telah dilakukan. Emisi GRK Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 mencapai sekitar 1.407,27 Gg CO₂e.

Dalam upaya penurunan emisi GRK, Provinsi Gorontalo juga telah didukung dengan tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Di bentuknya Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja penyusunan RAD-GRK Provinsi Gorontalo yang disahkan sejak tahun 2012, melalui SK Gubernur Gubernur Nomor 185/20/IB/2012, dengan melibatkan beberapa perangkat daerah terkait, unsur perguruan tinggi, LSM, BUMN/BUMD dan organisasi kemasyarakatan, dimana Pemerintah Provinsi Gorontalo memandang bahwa dalam mendukung penurunan emisi GRK ini diperlukan pula kebijakan untuk aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu terus ditingkatkan dan lebih terstruktur lagi, mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga Kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya. Aksi bersama ini atau kolaborasi ini sangat penting untuk melindungi, melestarikan serta memulihkan alam dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sembari memastikan perlindungan sosial dan lingkungan.

Selanjutnya, untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim, perlu mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti mempromosikan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi deforestasi. Penting juga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dengan berinvestasi dalam infrastruktur yang dapat bertahan dalam peristiwa cuaca yang lebih ekstrem dan dengan menerapkan kebijakan yang melindungi populasi rentan. Kenaikan konsentrasi gas rumah kaca ini karena kegiatan manusia, pembangunan semakin meningkat, jumlah penduduk yg semakin meningkat, jadi kerusakan ini diakibatkan oleh ulah manusia sendiri.

Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menurunkan emisi GRK diawali dengan pelaksanaan inventarisasi GRK yang menggambarkan seluruh emisi maupun rosot yang dihasilkan. Upaya-upaya pengendalian melalui pelaksanaan RAD GRK dapat menurunkan jumlah emisi GRK tetapi belum tentu menurunkan emisi GRK secara keseluruhan jika sektor-sektor lain yang terkait tidak

dikendalikan emisi GRK-nya. Informasi ini hanya dapat diketahui apabila dilakukan inventarisasi emisi GRK yang mencakup berbagai sektor, baik yang dikendalikan maupun tidak. Upaya inventarisasi emisi GRK ini dapat dikuantifikasikan untuk menjadi pertimbangan bagi arah pengendalian emisi GRK yang lebih efektif. Penyusunan inventarisasi emisi GRK dilakukan menurut Pedoman Inventarisasi Emisi GRK Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021. Sesuai peraturan ini, penyusunan inventarisasi GRK menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Inventarisasi GRK bertujuan untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kedua, memberikan informasi pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional. Inventarisasi GRK yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo meliputi beberapa sector yakni:

1. Pengadaan dan penggunaan energi;
2. Proses dan produk industri;
3. Pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan; serta
4. Pengelolaan limbah.

- Kecenderungan Emisi dan Serapan Agregat Gas Rumah Kaca.

Secara agregat, emisi GRK di Provinsi Gorontalo pada periode tahun 2017 - 2022 mengalami fluktuatif. Jumlah ini terus mengalami kenaikan pada tahun 2022 emisi agregat GRK Gorontalo mencapai 1.407,27 Gg CO₂e. Pada tahun 2017, emisi GRK agregat mencapai 387,52 Gg CO₂e. Hal ini menunjukkan dalam kurun waktu 6 tahun, kenaikan emisi GRK di Gorontalo mencapai 1.019,75 Gg CO₂e. secara lengkap akan di gambarkan dalam table 3.1.35 dibawah ini:



Tabel: 3.1.35
Emisi GRK Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022

NO.	ITEM	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	ENERGI	1.051,66	1.045,50	1.046,07	1.046,07	1.045,77	1.045,77
2.	IPPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PERTANIAN	1.569,86	1.267,19	1.268,11	1.286,84	1.240,07	1.138,72
4.	KEHUTANAN	-2.381,68	-1.600,62	18,51	4.155,97	2.633,22	-974,84
5.	LIMBAH	147,68	153,10	184,33	192,03	196,62	197,62
	TOTAL	387,52	865,18	2.517,01	6.680,91	5.115,69	1.407,27

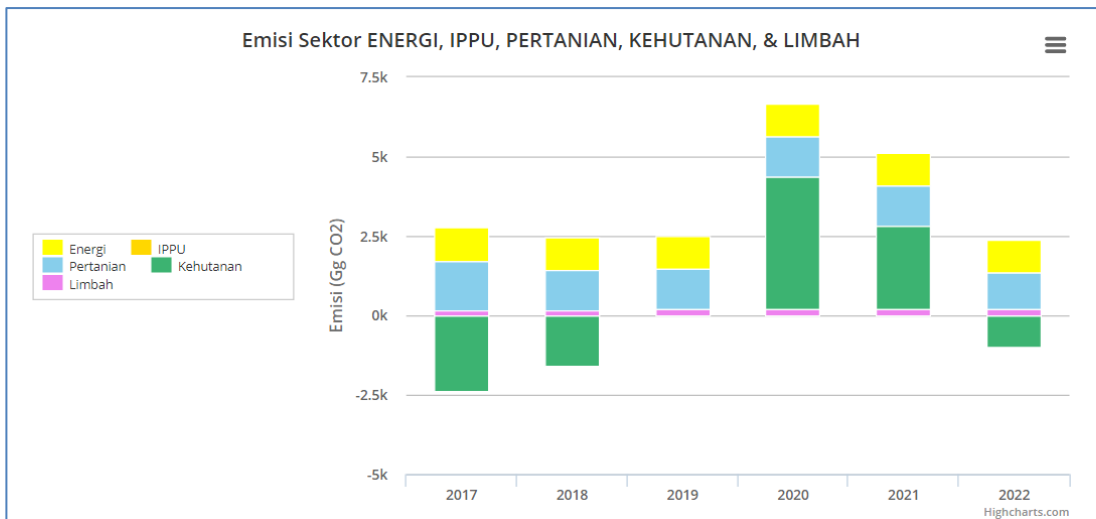
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Urutan sektor penyumbang emisi GRK pada tahun 2022 adalah sektor pertanian, sektor energi, sektor limbah. Sedangkan sektor kehutanan menghasilkan penyerapan emisi GRK. Kontributor utama penyumbang emisi GRK Provinsi Gorontalo adalah sektor pertanian pada tahun 2022 mencapai 47 persen atau 1138,72 Gg CO₂e. Penyumbang emisi kedua adalah sektor energi dengan kontribusi sebesar 1.045,77 Gg CO₂e atau sekitar 43,9 persen dari total emisi. Sektor limbah merupakan penyumbang emisi GRK ketiga dengan kontribusi sebesar 8,3 % pada tahun 2022 yaitu 197,2 CO₂e.



Tabel: 3.1.36

Profil Emisi GRK Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2023

- Kecenderungan Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca Berdasarkan Kategori yang ada di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan kategori, penyumbang emisi terbesar berasal dari pertanian. Sumber utama emisi GRK dari sektor pertanian adalah dari subsektor emisi N₂O langsung dari pengelolaan tanah, diikuti fermentasi enterik dan emisi N₂O langsung dari pengelolaan tanah. Emisi masing-masing subsektor ini secara berurutan adalah 664 Gg CO₂e, 203 Gg CO₂e, 135 Gg CO₂e. Kecenderungan emisi sektor pertanian adalah agak menurun.

Sumber utama emisi sektor energi adalah penggunaan energi rumah tangga dan perkantoran, diikuti oleh penggunaan energi subsektor transportasi. Emisi GRK subsektor rumah tangga dan perkantoran sebesar 518 Gg CO₂e dan subsektor transportasi 512 Gg CO₂e. Kecenderungan emisi GRK sektor energi relatif tetap.

Sumber utama emisi sektor limbah adalah sub sektor Limbah cair domestik 120,32 CO₂e. Subsektor berikutnya adalah pembakaran sampah dan pengelolaan limbah padat masing-masing 63,5 Gg CO₂e dan 13,4 Gg CO₂e. Kecenderungan emisi GRK sektor limbah adalah meningkat.

Sementara itu, Sektor pengadaan dan penggunaan energi terdiri dari tiga kategori yaitu kegiatan pembakaran bahan bakar, emisi fugitif, dan transportasi dan penyimpanan CO₂. Kategori transportasi dan penyimpanan CO₂ secara umum tidak terdapat di Indonesia sehingga tidak dibahas dalam laporan ini. Kategori emisi fugitif bersumber dari penambangan bahan bakar padat, minyak dan gas bumi serta emisi lainnya dari pengadaan energi. Kegiatan penambangan jenis bahan bakar ini dalam jumlah terbatas di Provinsi Gorontalo yakni berupa penambangan minyak dan panas bumi. Namun data kegiatan untuk kategori ini sampai dengan saat ini belum bisa diperoleh sehingga laporan ini lebih banyak membahas tentang kegiatan pembakaran bahan bakar.

Kategori pembakaran bahan bakar merupakan kategori yang menghasilkan emisi signifikan dari sektor pengadaan dan penggunaan energi. Emisi di sektor ini teridentifikasi berasal dari berbagai sub kategori yakni industri penghasil energi, industri pengolahan dan konstruksi, transportasi, dan kegiatan lainnya.

Kategori pembakaran bahan bakar, terdapat lima sub-kategori sumber emisi yakni industri energi, industri pengolahan dan konstruksi, transportasi, sektor lainnya, serta lain-lain sebagaimana digambarkan dalam table berikut ini:

Tabel 3.1.37
Emisi GRK Provinsi Gorontalo Sektor Energi Tahun 2017 - 2022

NO.	ITEM	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	INDUSTRI ENERGI	17,58	11,42	11,99	11,99	11,99	11,99
2.	MANUFAKTUR & KONSTRUKSI	3,63	3,63	3,63	3,63	3,33	3,33
3.	TRANSPORTASI	512,18	512,18	512,18	512,18	512,18	512,18
4.	PERKANTORAN & PEMUKIMAN	518,28	518,28	518,28	518,28	518,28	518,28
5.	INDUSTRI LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	INDUSTRI BATU BARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	MINYAK & GAS BUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.051,66	1.045,50	1.046,07	1.046,07	1.045,77	1.045,77

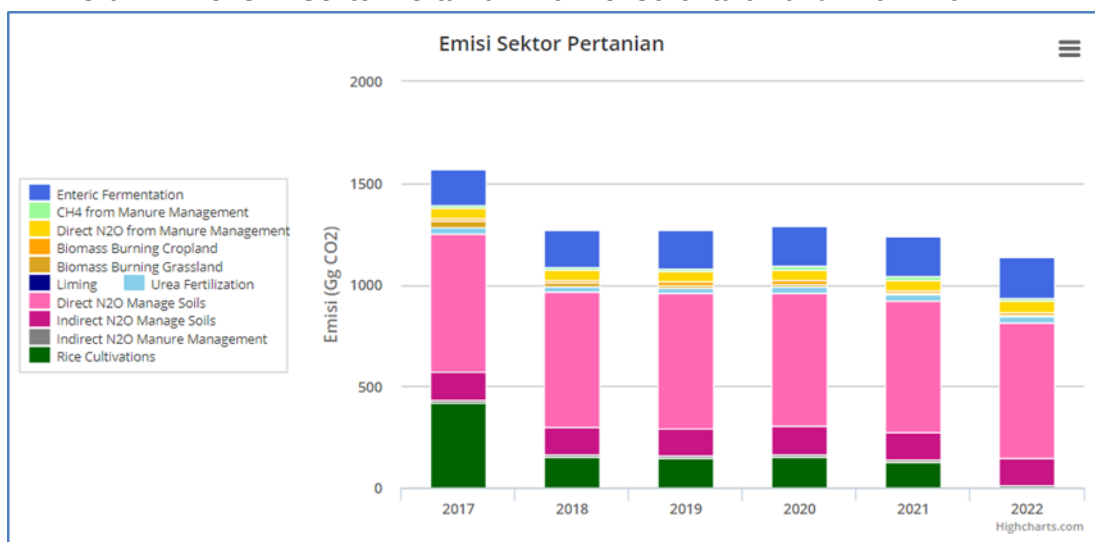
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

Sumber utama emisi sektor energi adalah penggunaan energi rumah tangga dan perkantoran, diikuti oleh penggunaan energi subsektor transportasi. Emisi GRK subsektor rumah tangga dan perkantoran sebesar 518 Gg CO₂e dan subsektor transportasi 512 Gg CO₂e.

Sementara itu, emisi GRK dari sektor pertanian di Provinsi Gorontalo berasal dari beberapa kegiatan yaitu: (1) Pembakaran biomasa, (2) pemakaian kapur, (3) pemakaian urea, (4) N₂O langsung dan tak langsung dari pengolahan tanah, dan (5) CH₄ dari budidaya padi sawah. Dibawah ini akan digambarkan emisi GRK sector pertanian, sebagai berikut:

Gambar: 3.1.38

Grafik Emisi GRK Sektor Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

Dalam menghitung emisi dari sektor pertanian dengan menggunakan data aktivitas seperti luas tanam, luas panen, jenis tanah, dan data hasil penelitian seperti dosis pupuk dan kapur pertanian. Data aktivitas tersebut bisa diakses dari berbagai sumber.

Sumber utama emisi GRK dari sektor pertanian adalah dari sub sektor emisi N₂O langsung dari pengelolaan tanah, diikuti fermentasi enterik dan emisi N₂O langsung dari pengelolaan tanah. Emisi masing-masing subsektor ini secara berurutan adalah 664 Gg CO₂e, 203 Gg CO₂e, 135 Gg CO₂e. Emisi GRK Provinsi Gorontalo Sektor Pertanian Tahun 2017 – 2022 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: 3.1.39

Emisi GRK Provinsi Gorontalo Sektor Pertanian Tahun 2017 - 2022

NO.	Kategori	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Gg CO ₂ e	Gg CO ₂ e	Gg CO ₂ e	Gg CO ₂ e	Gg CO ₂ e	Gg CO ₂ e
1	Emisi Langsung N ₂ O Pengelolaan Tanah	681	663	662	659	652	664
2	Fermentasi Enterik	179	181	187	196	200	203
3	Emisi Tak Langsung N ₂ O Pengelolaan Tanah	142	138	138	138	134	135
4	Emisi Langsung N ₂ O Pengelolaan Kotoran Ternak	47	48	50	52	53	54
5	Pemupukan Urea	27	27	27	27	30	34
6	CH ₄ Pengelolaan Kotoran Ternak	15	15	16	17	17	18
7	Pembakaran Biomassa Lahan pertanian	17	17	16	18	14	15
8	Emisi Tak Langsung N ₂ O Pengelolaan Kotoran Ternak	12	12	13	13	13	13
9	Pemberian kapur pada lahan	1	1	1	1	1	1
10	Pembakaran Biomassa Padang rumput	31	14	14	14	2	0
11	Penanaman Padi	418	151	145	151	125	0
	Total	1.570	1.267	1.268	1.287	1.240	1.139

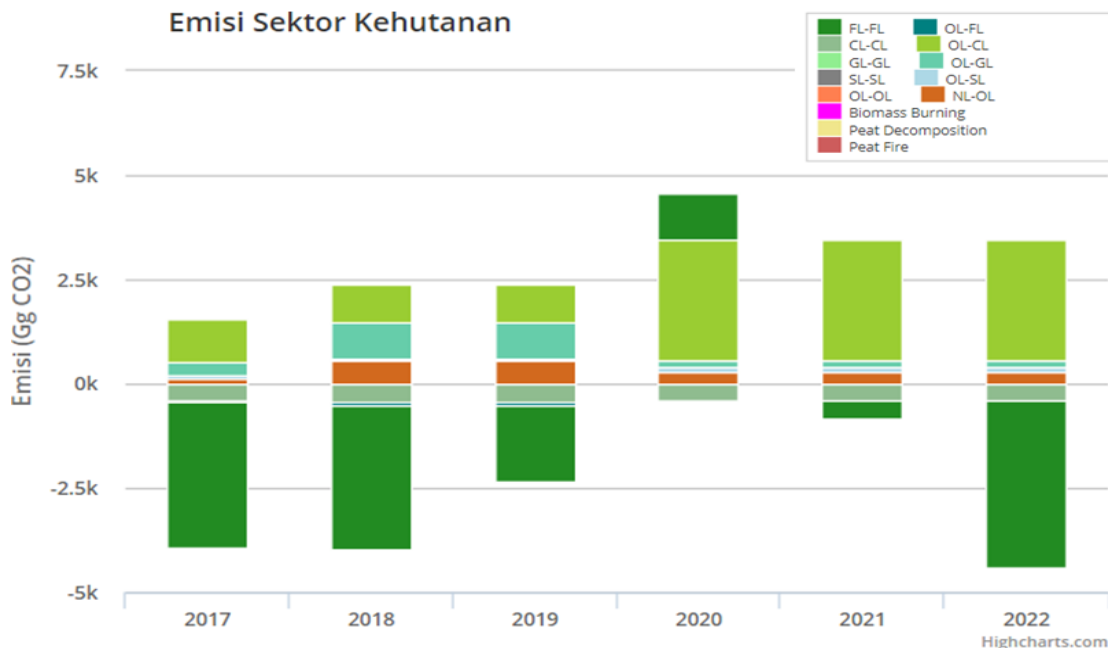
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

Sub-sektor yang menyumbang emisi GRK di Provinsi selanjutnya adalah sector kehutanan. Kehutanan merupakan salah satu penyumbang emisi GRK yang signifikan dalam bentuk serapan atau rosot emisi GRK. Emisi GRK sub sektor Kehutanan pada tahun 2022 adalah -974,8 Gg CO₂e, artinya secara keseluruhan terjadi serapan GRK.

Kegiatan kehutanan ada yang menghasilkan emisi dan ada yang menghasilkan serapan. Emisi GRK Subsektor Kehutanan timbul dari perubahan lahan non pertanian menjadi lahan pertanian (*Non-Cropland to Cropland*), perubahan non padang rumput menjadi padang rumput. Sedangkan serapan atau rosot emisi terjadi dari lahan hutan tetap menjadi lahan hutan, lahan non hutan menjadi hutan, dan lahan pertanian tetap menjadi lahan pertanian (*Cropland Remaining Cropland*). Grafik dibawah ini akan menggambarkan emisi GRK sector kehutanan Provinsi Gorontalo sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut:

Gambar: 3.1.40

Grafik Emisi GRK Sektor Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

Selanjutnya, emisi GRK dari sektor limbah yang mencakup kategori Limbah Cair Domestik, Pembakaran, Limbah Padat, Pengolahan Secara Biologis, Limbah Cair Industri, Limbah Padat Industri. Emisi GRK dari sektor limbah Provinsi Gorontalo tahun 2022 mencapai 197,62 Gg CO₂e. Di Provinsi Gorontalo, emisi GRK dari kategori Limbah Cair Domestik mencapai 60,9 persen dari total emisi GRK sektor limbah. Diikuti kategori Pembakaran sampah 32,1 persen, dan Pengelolaan Limbah Padat di TPA 7 persen.



Tabel: 3.1.41

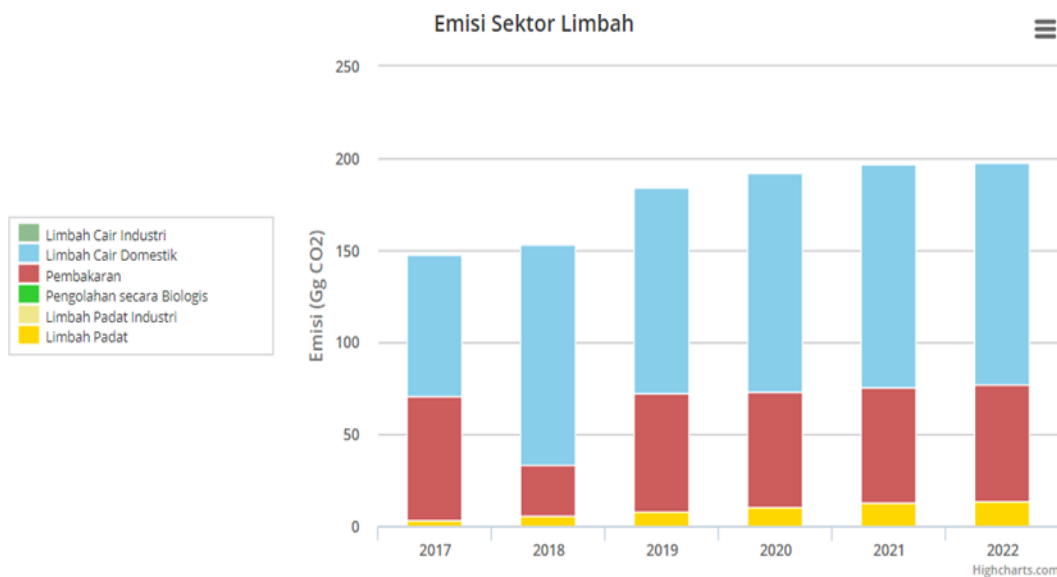
Emisi GRK Provinsi Gorontalo Sektor Limbah Tahun 2017 – 2022

NO.	ITEM	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	LIMBAH CAIR INDUSTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	LIMBAH CAIR DOMESTIK	77,36	120,16	112,21	119,03	121,33	120,32
3.	PEMBAKARAN	67,21	27,15	64,10	62,36	62,85	63,48
4.	PENGOLAHAN SECARA BIOLOGIS	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5.	LIMBAH PADAT INDUSTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	LIMBAH PADAT	3,10	5,79	8,01	10,62	12,42	13,81
TOTAL		147,68	153,10	184,33	192,03	196,62	197,62

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

Gambar: 3.1.42

Grafik Emisi GRK Sektor Limbah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023



- Pengelolaan akhir sampah.

Emisi dari kategori pengelolaan akhir sampah ditimbulkan oleh proses dekomposisi material organik secara anaerob. Proses ini menghasilkan gas CH₄ dan CO₂ dan gas-gas lainnya seperti CO, N₂, O₂, H₂, dan H₂O. Gas-gas ini umumnya disebut landfill gas (LFG). Emisi untuk kategori pembuangan sampah di TPA dihitung menggunakan metode First Order Decay (FOD) dimana sampah akan menghasilkan emisi CH₄ dalam rentang waktu yang panjang. Di samping itu juga terdapat jeda antara waktu pertama kali sampah dibuang dengan waktu pertama emisi muncul.

Jenis sistem TPA mempengaruhi timbulan CH₄ karena terkait dengan kontak udara luar terutama oksigen. Jenis-jenis TPA meliputi tak dikelola dan dangkal (< 5 meter), tak dikelola dan dalam (> 5 meter), dikelola, dikelola semi- aerobik, dan tidak dikategorikan. Emisi CH₄ juga dipengaruhi oleh jumlah dan komposisi sampah dimana semakin besar jumlah fraksi yang mudah terdegradasi maka peluang pembentukan CH₄ semakin besar.

Timbulan sampah di Provinsi Gorontalo diperhitungkan dengan menggunakan timbulan sampah per kapita sebesar 0,2 ton per kapita per tahun. Penggunaan nilai 0,2 Ton per kapita adalah berdasarkan pertimbangan bahwa sampah yang dihasilkan per kapita masih lebih kecil dari sampah rata-rata perkapita untuk kategori kota metropolitan. Hasil perhitungan Signsmart menunjukkan emisi GRK tahun 2022 dari sub kategori sampah di TPA sebesar 13,8 Gg CO₂e.

- Pembakaran Sampah

Kategori pembakaran sampah salah satu penghasil emisi GRK berupa CO₂, CH₄, dan N₂O. Kategori ini terdiri dari kegiatan insenerasi dan pembakaran sampah terbuka. Kegiatan insenerasi tidak terdata dikarenakan di wilayah Gorontalo belum memiliki fasilitas incinerator sampah sehingga tidak diperhitungkan. Kegiatan TPS 3R dan Bank sampah yang telah berjalan di Gorontalo diasumsikan mengurangi jumlah sampah yang dibakar. Dengan adanya TPS 3R dan Bank Sampah, fraksi sampah yang dibakar mengalami penurunan meskipun penurunan tersebut masih sangat kecil.

- **Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah**

Kategori pengelolaan dan pembuangan air limbah terdiri dari dua sub kategori yakni pengolahan dan pembuangan air limbah domestik dan industri. Di Provinsi Gorontalo hanya berfokus pada air limbah domestik. Emisi dari pengolahan air limbah domestik timbul dari pengolahan limbah tinja. Berdasarkan perhitungan Signsmart total emisi CH₄ pada tahun 2022 yakni sebesar 120,32 Gg CO₂e. Selain menghasilkan CH₄, pengolahan air limbah domestik menghasilkan N₂O dari sisa protein yang tidak terserap tubuh dan keluar bersama limbah. Konsumsi protein rata-rata 17,76 Kg/kapita/tahun dan protein yang tidak dikonsumsi dan masuk limbah sebesar 1,1 Kg/kapita/tahun. Fraksi Nitrogen dalam protein sebesar 16% dan faktor emisi nitrogen dalam limbah mencapai 0,005 Kg N₂O-N/Kg N. Besarnya emisi N₂O dipengaruhi juga jumlah penduduk dimana pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah penduduk dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. Upaya yang dilakukan

Bahwa, timbulnya permasalahan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo, disebabkan oleh tingginya konsumtif masyarakat yang menimbulkan timbunan sampah yang meningkat berdampak pada tingginya tingkat emisi GRK. Selain beberapa aksi yang telah dilakukan tersebut, terdapat upaya lain yang telah dan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu:

1. Melakukan penelitian terhadap potensi emisi gas rumah kaca dari TPA Talumelito dengan metode IPCC 2006, untuk mengetahui berapa besar sumbangan limbah sampah terhadap karbon dioksida. Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan pedoman Intergovernmental Panel on Climate change (IPCC) tahun 2006. Jumlah wilayah sebanyak 3 wilayah kerja TPA Talumelito (Kota Gorontalo, Kabupaten Bonebolango, Kabupaten Gorontalo). Data diolah menggunakan IPCC 2006 dengan tahapan : proyeksi jumlah penduduk, pengukuran timbunan sampah, pengukuran komposisi sampah. Sampel Komposisi sampah berdasarkan SNI 19-3964-1994. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi emisi GRK di sektor pengelolaan sampah dari TPA Talumelito tahun 2022-2026 terus mengalami peningkatan sebesar 488 Gigagram pada tahun 2022 dan 1.776 Gigagram pada tahun 2026. Dengan asumsi jumlah penduduk sebesar 1.193.413 dan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan



tahun 2022 sebesar 85.925.736 kilogram serta asumsi jumlah penduduk tahun 2026 sebesar 1.244.604 dengan asumsi jumlah timbulan sampah 89.611.488 kilogram. Simpulan potensi emisi gas metana di TPA Talumelito setiap tahunnya mengalami peningkatan dan berbanding lurus dengan asumsi jumlah penduduk.

2. Sosialisasikan kebijakan Penurunan emisi gas rumah kaca (GKR) Nasional. Melalui sosialisasi tersebut, mengajak seluruh elemen masyarakat dalam menekan tingkat emisi gas rumah kaca di Provinsi Gorontalo dan memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan inventarisasi GRK dan monitoring, pelaporan dan verifikasi melalui optimalisasi aplikasi SIGN-SMART.
3. Pelaksanaan Program kampung iklim yaitu program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Melalui program kampung iklim ini akan dapat mengidentifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal. Serta untuk mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil di daerah lain sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
4. Menjalinkan kerja sama dengan perusahaan asal Jepang dari Matsusita Gobel Foundation dan Sumitomo Corporation, untuk menjajaki kerjasama pengelolaan limbah jagung dan budidaya mangrove. Proyek itu diharapkan dapat mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik, khususnya dalam mengurangi karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca.

Dari data dan informasi yang terkait dengan sektor dan sub sektor penyumbang emisi GRK di Provinsi Gorontalo sebagaimana tersebut diatas, Provinsi Gorontalo masih perlu bekerja keras membangun komitmen, menciptakan kebijakan yang berpihak pada pengelolaan lingkungan hidup juga upaya-upaya nyata guna keberlangsungan kondisi lingkungan hidup yang baik. Sehingga penurunan emisi GRK sebagaimana yang telah ditargetkan dapat terwujud di tahun 2026 sebesar 30 persen. Dengan kerja keras, komitmen dan kolaborasi dengan semua pihak, maka target ini diharapkan akan mudah diwujudkan.

Sementara itu, dibandingkan dengan capaian penurunan GRK Nasional dimana Pemerintah Indonesia berhasil mencapai realisasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), sebagaimana data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mencatat capaian penurunan emisi menorehkan catatan positif. Pada 2023, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) mencapai 127,67 juta ton atau melebihi target 109,64 persen dari yang ditetapkan sebesar 116 juta ton CO₂e. Oleh karena itu, pemerintah mematok target pengurangan GRK menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan negara lain, sesuai penetapan Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) pada tahun 2030. Tahun 2017 realisasi penurunan GRK mencapai 29 juta ton, 2018 sebesar 40 juta ton, tahun 2019 sebesar 54,8 juta ton, 2020 sebesar 64,4 juta ton, tahun 2021 sebesar 70 juta ton, tahun 2022 sebesar 91,5 juta ton, dan tahun 2023 penurunan GRK mencapai 127,67 juta ton. Upaya menurunkan emisi GRK Untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2060, pemerintah disebut akan melakukan beberapa aksi mitigasi sektor energi berkaitan dengan penurunan GRK. Antara lain dengan mengimplementasi energi baru terbarukan (EBT), aplikasi efisiensi energi, penerapan bahan bakar rendah karbon (gas alam), dan penggunaan teknologi pembangkit bersih.

Dukungan semua pihak, stakeholder dan pelaku usaha jadi faktor penentu atas keberhasilan pencapaian target tersebut. Dengan melibatkan pelaku usaha dalam upaya ini, dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan mendukung tujuan global untuk mengatasi perubahan iklim.

Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

A. Capaian Kinerja

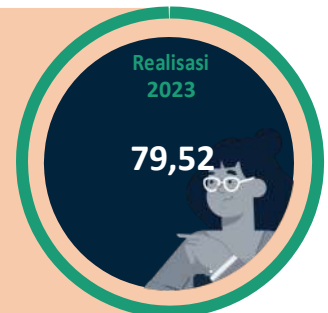
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian terhadap target Perjanjian Kinerja 2023

107,01%

Capaian terhadap target RPD 2023-2026

104,87%



Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi perhatian penting bagi pemerintah, khususnya perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang harus dilakukan dengan sinergitas pemantauan kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diukur dengan Angka yang digunakan sebagai representasi kualitas lingkungan hidup agar mudah dipahami oleh masyarakat.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO₃-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Dalam perkembangannya (tahun 2009 – 2019) penghitungan IKLH telah mengalami penyempurnaan sebanyak 4 kali. Pada tahun 2012 – 2014 pengembangan metodologi telah dilakukan dengan melakukan pembobotan untuk menghasilkan keseimbangan dinamis antara isu hijau (green issues) dan isu coklat (brown issues). Isu hijau berkenaan dengan status, mutu, dan kelimpahan sumber daya hayati (organisme biotik) yang timbul atau terjadi akibat aktivitas kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik suatu masyarakat. Adapun isu coklat berkenaan dengan status, mutu, dan kelimpahan sumber daya non hayati (abiotik), termasuk dalam hal ini berbagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan.

Tahun 2016 – 2017 dilakukan penyempurnaan kembali dengan pengembangan metodologi perhitungan IKA. Pada periode ini status mutu air yang digunakan adalah status mutu air kelas I PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, sehingga nilai maksimum berada di angka 100 dan nilai minimum di angka 20. Selain itu juga dilakukan penyempurnaan metodologi perhitungan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan aspek rehabilitasi yang mempengaruhi perubahan tutupan lahan/hutan, serta karakteristik wilayah secara spasial. Indikator yang digunakan adalah:

- Luas tutupan hutan dan perubahan tutupan hutan;
- Kondisi tutupan tanah. Indeks ini terkait dengan parameter C (tutupan lahan) dalam perhitungan erosi air limpasan;
- Konservasi sepadan sungai/danau/pantai;
- Kondisi habitat. Tingkat fragmentasi hutan/habitat.

Penyempurnaan IKLH pada tahun tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 yang menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara, dan tutupan lahan yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Dan pada tahun 2023, sesuai dengan RPJMN KLHK Tahun 2020 – 2024 bahwa perhitungan nilai IKLH mengalami perubahan perhitungan kembali. Perhitungan nilai IKLH

menambah parameter Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), selanjutnya untuk perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKA) yang semula menggunakan 2 parameter NO₂ dan SO₂ ditambahkan nilai PM_{2.5}, kemudian untuk parameter kualitas air yang menjadi parameter kunci untuk perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) bertambah dari 7 parameter menjadi 8 parameter, demikian juga untuk perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang keseluruhannya menggunakan hasil perhitungan KLHK sehingga nilai IKTL dan IKAL menggunakan hasil perhitungan IKLH Nasional.

Terhadap perubahan-perubahan pengukuran parameter nilai IKLH tersebut, pemantauan kualitas udara di Provinsi Gorontalo masih menggunakan 2 parameter SO₂ dan NO₂, namun untuk kualitas air telah memenuhi parameter yang diperhitungkan saat ini, sebagaimana ketentuan. Dari evaluasi capaian target indikator IKLH tahun 2023 tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 79,52 dari skala 100 dari target 74,31 atau capaian sebesar 107,01 persen. Capaian ini di dukung oleh data yang akurat dan anggaran yang memadai yang digunakan untuk pemantauan kualitas air laut dan kualitas udara serta bantuan perhitungan nilai IKTL daerah sehingga membuat daerah dapat menghitung capaian nilai IKLH Provinsi Gorontalo Tahun 2023.

Meskipun IKLH Provinsi Gorontalo capaiannya di tahun 2023 melebihi target, namun dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang mencapai 79,79 yang berarti turun sebesar 0,27 poin. Olehnya IKLH Provinsi Gorontalo perlu terus ditingkatkan menuju yang lebih baik.

Terdapat hal-hal yang menghambat peningkatan nilai IKLH Provinsi Gorontalo adalah :

- 1). Belum optimalnya keterlibatan sektor lain/kolaborasi dalam berkontribusi pada kegiatan pengendalian dan perlindungan kualitas air sungai. Program sanitasi dan pengolahan air limbah masih difokuskan pada lokasi yang memiliki nilai IPM atau Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rendah dan belum menysasar pada lokus lokasi/daerah yang memiliki status mutu kualitas lingkungan yang rendah. Selain hal tersebut di atas faktor tekanan lingkungan yang semakin tinggi, ikut berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan sehingga pada akhirnya berpengaruh pada nilai IKLH Provinsi Gorontalo.
- 2). Dari 20 titik pantau kualitas air yang dilakukan Provinsi Gorontalo, 5 titik pantau pada wilayah Danau Limboto tidak diverifikasi disebabkan 2 parameter (kecerahan dan klorofil) tidak dilakukan pengujian karena laboratorium BBIHP Makassar belum dapat melakukan

analisis akibat kendala teknis, sehingga nilai IKA yang disampaikan pada tahun ini belum memperhitungkan hasil pemantauan pada lokasi Danau Limboto.

B. Upaya yang dilakukan

Dari kendala tersebut diatas, solusi yang dilakukan adalah:

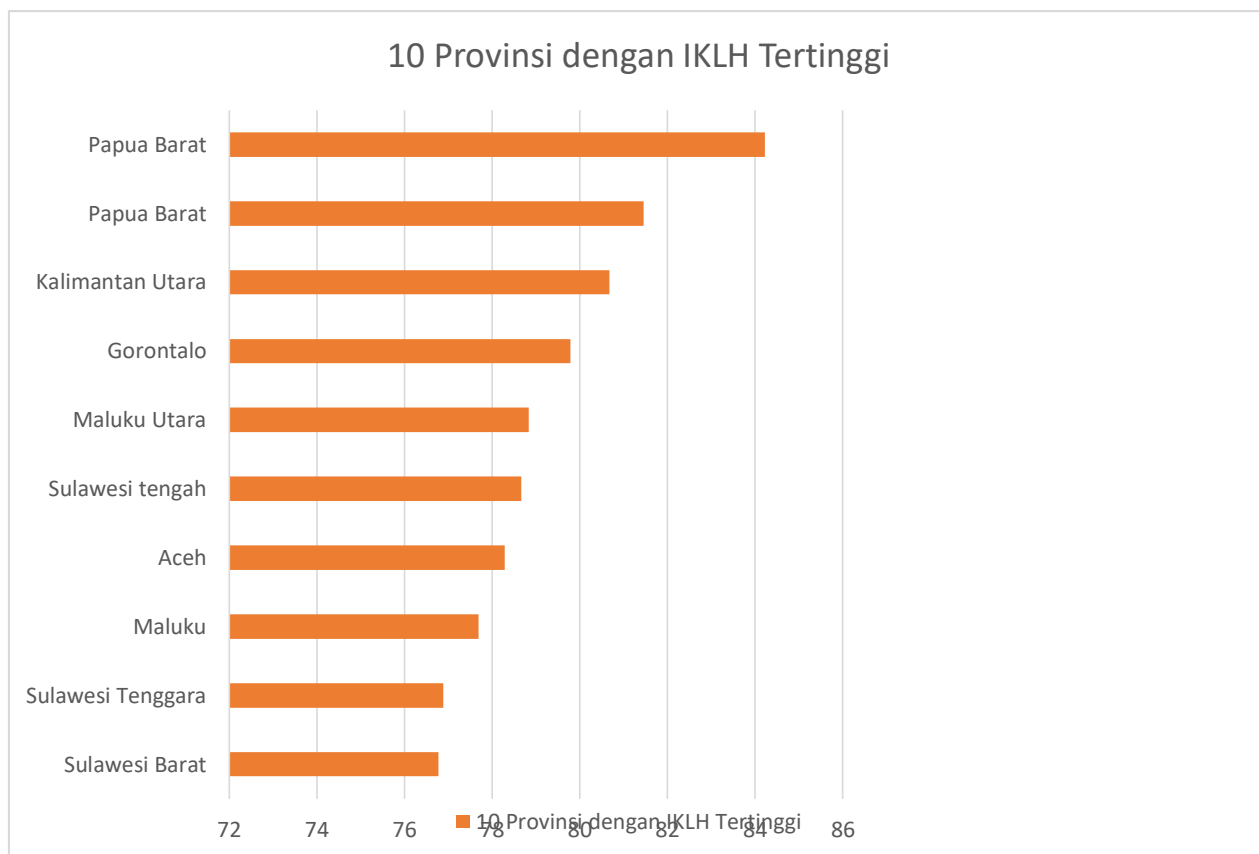
- 1) Pembentukan laboratorium lingkungan di Provinsi Gorontalo yang memenuhi persyaratan sebagai laboratorium uji kualitas lingkungan;
- 2) Pengujian sampel air Danau Limboto Tahun 2024 merekomendasikan agar menggunakan Laboratorium Lingkungan Mutu Agung Makassar dan/atau Water Laboratory Nusantara Manado untuk pengujian parameter klorofil dan kecerahan;
- 3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi serta berkolaborasi dengan semua stakeholder;
- 4) Selalu menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan lestari. Kontribusi kecil setiap anggota masyarakat maupun korporasi untuk menanam pohon merupakan sumbangan penting untuk mengurangi suhu udara panas, upaya ini juga untuk mengurangi pemanasan global. Untuk tidak melakukan eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan, sebab saat ini telah terjadi penurunan tutupan pohon terutama di wilayah perkotaan.
- 5) Meningkatkan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) dari fasilitas layanan kesehatan, menekan emisi gas rumah kaca, membudidayakan jamur untuk ketahanan pangan, melaksanakan program kampung iklim.

Jika dibandingkan dengan capaian IKLH Nasional di tahun 2023 yang mencapai 72,54 dari skala 100, maka IKLH Provinsi Gorontalo masih relatif tinggi. Sementara dibandingkan dengan nilai IKLH daerah lain, Provinsi Gorontalo menempati urutan ke 4 setelah Papua Barat, Papua dan Kalimantan Utara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, Papua Barat menjadi provinsi dengan skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tertinggi di Indonesia. Provinsi ini mencatat skor indeks sebesar 84,22. Selain Papua Barat yang menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan IKLH tertinggi, terdapat Provinsi Papua pada posisi kedua dengan skor 81,46. Selanjutnya terdapat Provinsi Kalimantan Utara dengan IKLH sebesar 80,67 dan diikuti Gorontalo sebesar 79,79. Terdapat pula Provinsi Maluku Utara dengan besaran IKLH 78,84 dan

disusul dengan Sulawesi Tengah sebesar 78,66. Mengekor Sulawesi Tengah, terdapat Aceh dan Maluku dengan skor IKLH masing-masing sebesar 78,29 dan 77,69. Dua provinsi lain dari Pulau Sulawesi juga turut menyumbang skor IKLH yang tinggi, yakni, Sulawesi Tenggara dengan 76,88 dan Sulawesi Barat dengan 76,77.

Gambar: 3.1.43
Provinsi dengan IKLH tertinggi tahun 2022



Sumber: BPS Tahun 2023

Realisasi kinerja tahun 2023 Provinsi Gorontalo terhadap capaian penurunan GRK dan peningkatan indeks KLH, dibandingkan dengan target Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.44
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Nasional	Capaian (%)
1	3	4	5	6
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,30 %	29%	94,14
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,52	69,48	114,45

Sumber Data : BPS dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

Dari tabel 3.1.44 diatas terlihat bahwa, capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 atas penurunan emisi gas rumah kaca dibandingkan target Nasional mencapai 94,14 persen. Sementara itu, terhadap indeks kualitas lingkungan hidup, dibandingkan dengan target Nasional mencapai 114,45 persen atau melebihi standar Nasional.

Selain indeks kualitas lingkungan hidup, kinerja utama penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Gorontalo juga di dukung oleh kinerja pendukung yaitu penurunan indeks resiko bencana. Kinerja ini tentunya sangat menentukan pencapaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Tabel 3.1.45
Capaian Kinerja Pendukung Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mendukung Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	123	116,71	105,11

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024



C. Efisiensi



Dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo, untuk mencapai kualitas lingkungan hidup, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan, maka persentase realisasi anggaran dihitung dari rata-rata realisasi anggaran program yang mendukung semua indikator tersebut. Sementara itu, capaian kinerja dihitung dari rata-rata capaian kinerja dari semua indikator kinerja tersebut.

Efisiensi dihitung dengan membandingkan antara capaian realisasi anggaran dengan capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dari rata-rata capaian indikator kinerja adalah 99,00 persen. Sementara itu, Alokasi anggaran terhadap program-program dalam mendukung kinerja ini adalah sebesar Rp. 17.720.683.193,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.501.277.199,00 atau 98,76 persen. Adapun program-program yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja ini adalah sebagai berikut: 1) program pengelolaan energi terbarukan, 2) program pengelolaan hutan, 3) program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, 4) program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, 5) program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), 6) program pengelolaan daerah aliran sungai, 7) program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 8) program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, 9) program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, 10). program pengelolaan system air limbah, 11) program pengelolaan persampahan, 12) program penyelenggaraan penataan ruang, 13) Program pengelolaan aspek kegeologian, 14) program pengembangan



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

kawasan transmigrasi, 15) program pengelolaan mineral dan batu bara, 16) program pengembangan kawasan transmigrasi, serta 17) program penanggulangan bencana.

Dengan demikian, jika dinilai dari sisi efisiensi anggaran, didapatkan nilai sebesar 0,99 persen poin yang berarti bahwa penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja ini telah "efisien" (nilai hasil perbandingan realisasi anggaran dengan nilai kinerja kurang dari 1 poin).



Terwujudnya Good and Clean Government

Dalam perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023, salah satu tujuan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pencapaian visi misi pemerintah daerah adalah mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan dan diukur dengan indikator pencapaian nilai MCP (Monitoring Center For Prevention) dan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai kinerja utama yang juga didukung oleh kinerja lain yaitu pencapaian opini atas pengelolaan keuangan daerah. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.46
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPD

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s.d Akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai MCP (Monitoring Center For Prevention)	89,72	82,60	92,65	81,50	87,96	98,51	82,73
2	Indeks Reformasi Birokrasi	66,33	69,61	65,10	77,75	119,43	66,90	116,22
3	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Sumber Data : Inspektorat, Badan Keuangan dan Biro Organisasi tahun 2023

Pada tabel 3.1.46 diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian MCP Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 81,50 poin. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian di tahun 2023 ini turun, dimana pada tahun 2022 MCP Provinsi Gorontalo mencapai 82,60, dan di tahun 2021 mencapai 89,72. Sementara jika capaian tahun 2023 ini dibandingkan dengan target akhir renstra, capaiannya sebesar 82,73 persen.

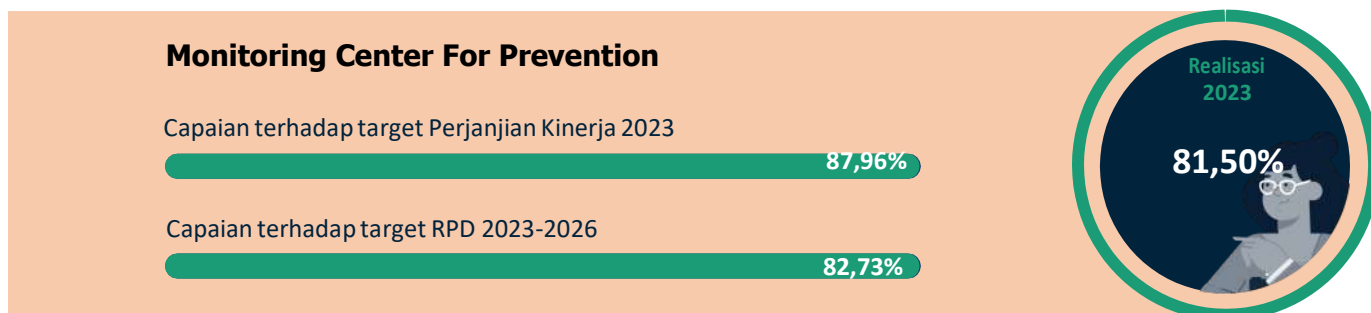
Selanjutnya, indeks Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Gorontalo terus naik dari tahun ke tahun. Pada tabel 3.1.46 diatas, indeks RB tahun 2023 kembali naik menjadi 77,75 poin atau

dengan kategori BB. Capaian di tahun 2023 naik sebesar 8,14 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dan naik 11,42 poin di bandingkan dengan capaian tahun 2021. Sementara itu, dibandingkan dengan target akhir renstra, capaiannya sebesar 116,22 persen.

Pada tabel 3.1.46 dapat dilihat pula bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh opini WTP atas pengelolaan keuangan daerah. Dari tabel di atas, tahun 2021 sampai dengan 2023 opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah itu tetap masih sama yaitu mendapat WTP.

Indikator MCP (Monitoring Center For Prevention)

A. Capaian Kinerja



Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi. Adapun area intervensinya meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang/jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan BMD. Tujuannya dari MCP untuk mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2023, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa nilai MCP Provinsi Gorontalo mencapai 81,50, turun 1,1 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Terkait penurunan skor tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti turunnya skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Gorontalo tahun 2023, sehingga diperlukan evaluasi dan penyusunan langkah-langkah akseleratif untuk perbaikan aksi pencegahan korupsi

di daerah. Adanya penurunan hasil, artinya perlu ada upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki area-area intervensi yang masih rentan. Pada tahun 2023, terdapat 546 Pemerintah Daerah (Pemda) yang berpartisipasi pada penilaian MCP 2023. Mayoritas Pemda telah berhasil mendapat skor 75-100 (tinggi) termasuk didalamnya Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dari 7 (tujuh) area yang diintervensi, nilai pengadaan barang dan jasa serta perizinan beroleh 100 persen, manajemen ASN 83,93 persen, perencanaan dan penganggaran APBD berada pada 73,88 persen, optimalisasi pajak daerah berada pada 73,69 persen, pengelolaan BMD mendapatkan 73,01 persen, dan yang terakhir terhadap pengawasan arsip mendapat 65,20 persen. Lebih lanjut digambarkan sebagaimana dibawah ini:

Tabel 3.1.47
Nilai MCP Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No.	Area	Komponen	Capaian per Komponen (%)	Nilai Area (%)
1	2	3	4	5
1	Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan pembangunan daerah	50,5	73,88
		Pencegahan Mark Up Anggaran	75	
		Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat	100	
		Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan APBD	70	
2	Perizinan	Transparansi dan Akuntabilitas	100	100,00
		Sarana dan Pkrasarana	100	
		Kemudahan Perizinan	100	
		Pengendalian dan Pengawasan	100	
3	Manajemen ASN	Sistem Merit	75	83,93
		Tata Kelola ASN	91,75	
		Peningkatan Integritas dan Kinerja ASN	85	
4	Pengelolaan BMD	Pengamanan Administrasi BMD	90,2	73,01
		Pengamanan Fisik dan Hukum BMD	59,5	
		Penertiban BMD	85	
		Pengendalian dan Pengawasan BMD	57,35	
5	Pengendalian Barang dan Jasa	Inovasi pelaksanaan Pengadaan	100	100,00
		Pengendalian Pengadaan	100	



		Penguatan Profesionalisme UKPBJ	100	
6	Pengawasan APIP	Kapasitas APIP	58,59	65,20
		Penguatan Kelembagaan	39,8	
		Pengendalian dan Pengawasan	97,4	
7	Optimalisasi Pajak Daerah	Penguatan Database Pajak	74,5	73,69
		Inovasi Peningkatan Pajak Daerah	44,86	
		Pengendalian dan Pengawasan	100	

Sumber Data : Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Dalam area perencanaan dan penganggaran, terdapat beberapa komponen yang dilakukan intervensi dan terdapat tiga sub komponen yang masih perlu dilakukan optimalisasi pencapaiannya yaitu:

1. Perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas:
 - a. Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD);
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
 - e. Renjana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Penencanaan pembangunan daerah masih belum mendapatkan nilai yang optimal yaitu 50,5 persen dari skala 100. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal serta upaya perbaikan yang dilakukan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pada tahapan perencanaan, berdasarkan Dokumen Laporan Monitor pokok pikiran DPRD (pokir) dalam SIPD Provinsi Gorontalo, terdapat 1.879 input pokir dengan rincian tepat waktu 1.868 dan tidak tepat waktu 11, (Musrenbang RKPD dilaksanakan tanggal 10 April 2023, batas akhir input pokir tanggal 3 April 2023);
- Penandatanganan Pakta Integritas baru dilaksanakan setelah KUA PPAS yang seharusnya dilaksanakan sebelum pelaksanaan dan penetapan KUA PPAS untuk dasar penyusunan APBD 2024.
- Upaya perbaikan di tahun 2024 adalah berkomitmen melaksanakan mekanisme tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan.



2. Pencegahan Mark up Anggaran.

Pencegahan Mark up Anggaran yang meliputi Pembengkakan anggaran (*mark up*) merupakan kegiatan pembiayaan yang tidak diinginkan dan melibatkan biaya yang tidak terduga. Melakukan *mark up* maka dana yang dibuat bisa dilebih-lebihkan atau diadadakan (dana fiktif). Umumnya, kegiatan ini kerap dilakukan pada proyek-proyek infrastruktur, bangunan, hingga teknologi. Pencegahan Mark up Anggaran masih belum mendapatkan nilai yang optimal yaitu 75 persen dari skala 100. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal serta upaya perbaikan yang dilakukan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Tidak adanya Kertas Kerja Penyesuaian Standar Harga Satuan (SHS) oleh Tim Penyusun SHS.
- Hasil reviu Inspektorat atas Implementasi Analisis Standar Biaya (ASB) yaitu standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran/Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) meliputi kesesuaian SHS dalam menu ASB/HSPK disusun tidak memperhatikan SHS.
- Screenshot menu dan hasil input ASB dalam aplikasi perencanaan Tahun Anggaran 2024 tidak sesuai.
- Implementasi ASB & HSPK kegiatan pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya dilaksanakan.

3. Pengendalian pengawasan penggunaan APBD. Pencapaian pada area inipun belum optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak adanya dokumen perencanaan dari Provinsi dalam memberikan bantuan keuangan provinsi kepada Kabupaten/ Kota.
- Tidak terdapat data realisasi bantuan keuangan.
- Evaluasi bantuan Provinsi/Hibah/Bansos oleh Inspektorat hanya sebagian dilaksanakan.
- Hasil reviu RKPD 2023 Inspektorat terkait dengan rekomendasi pemenuhan anggaran (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, Anggaran Pengawasan) tidak terpenuhi, (anggaran pengawasan yang tidak terpenuhi).

Pada area intervensi Pengawasan APIP terdapat 3 (tiga) sub indikator yang masih perlu optimalisasi pencapaiannya yaitu:

1. Kapabilitas APIP, belum optimal disebabkan beberapa hal yaitu:
 - Pemenuhan presentase diklat minimum 120 jam bagi setiap pengawas belum terpenuhi.
 - Alokasi anggaran pengawasan belum sesuai Permendagri 84 Tahun 2022 dan SE Kemendagri No 700.1.1/8737/SJ tanggal 09 Desember 2022 (hanya 0,27% dari total APBD).
 - Implementasi TPP APIP belum sesuai (seharusnya di atas OPD lain, dan di bawah Sekda secara berjenjang).
 - Level Kapabilitas APIP 3.
2. Penguatan Kelembagaan. Belum mencapai nilai optimal di sebabkan oleh:
 - Belum adanya Perkada terkait organisasi tata kerja (OTK) yang didalamnya berisi pengaturan tentang tugas/fungsi inspektur pembantu (khusus) yang melaksanakan PUTT.
 - Belum adanya Pengisian Jabatan inspektur pembantu khusus.
 - Inspektorat Provinsi hanya melakukan reuiu kecukupan SDM dan Anggaran Irban khusus di Kota Gorontalo (Tidak di semua Kab/Kota).
3. Pengendalian dan Pengawasan belum mencapai target 100 persen disebabkan tidak dilakukannya audit e-purchasing.

Selanjutnya, pada area intervensi Manajemen ASN, dengan 3 (tiga) sub indikator yang dinilai masing-masing adalah:

1. Sistem Merit. Belum optimalnya capaian nilai dari sub indikator ini disebabkan oleh Laporan Hasil Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Merit belum memadai.
2. Tata Kelola ASN. Belum optimalnya capaian nilai dari sub indikator ini disebabkan oleh belum adanya surat persetujuan Kemendagri/KemenPAN terkait Hasil Validasi Evaluasi/Kelas Jabatan.
3. Peningkatan Integritas & Kinerja ASN. Belum optimalnya capaian nilai dari sub indikator ini disebabkan oleh Peraturan Kepala Daerah tentang Perluasan Wajib Laport LHKPN terlambat disahkan.

Area intervensi selanjutnya adalah Optimalisasi Pajak Daerah. Dengan indikator-indikator yang masih memerlukan kerja keras dan komitmen bersama dalam mencapai kinerja yang optimal adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Data Base Pajak. Belum optimalnya pencapaian nilai terhadap indikator ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - Belum adanya bukti bahwa system/ aplikasi telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.
 - Substansi Database: belum menampilkan: menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, integrasi dengan unit terkait keuangan daerah dengan perijinan, integrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.
2. Inovasi Peningkatan Pajak Daerah. Belum optimalnya pencapaian nilai terhadap indikator ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - Efektivitas Upaya Inovasi Pajak belum memberikan dampak peningkatan pajak daerah
 - Belum ada laporan upaya penagihan pajak daerah.
 - Target Peningkatan Pajak Tahun berjalan belum tercapai.
 - Capaian realisasi hasil penagihan pajak 1,38%.

Area intervensi terakhir adalah area Manajemen Aset Daerah. Dengan 4 (empat) sub indikator yang masih memerlukan kerja keras dan komitmen bersama dalam mencapai kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Pengamanan Administrasi BMD. Sub indikator ini belum mencapai 100% disebabkan hal sbb :
 - Rekonsiliasi antara pengurus barang dengan pelaksana akuntansi di SKPD paling sedikit 6 bulan sekali atau setiap semester dalam periode tahun berjalan.
2. Pengamanan Fisik dan Hukum BMD belum mencapai nilai optimal yaitu 100% disebabkan oleh:
 - Belum ada dokumen terkait jumlah bidang asset yang telah didaftarkan kepada BPN (dokumen yang dilampirkan tidak sesuai).
 - Harap dilampirkan kembali timeline yang berisi target pensertifikatan beserta anggarannya mulai dari tahun 2023 sampai 2025. Capaian Sertifikasi, $110:564 \times 100 \times 60\% = 11,7$.
3. Penertiban BMD. Sub indikator ini belum mencapai nilai optimal disebabkan masih terdapat BMD tumpang tindih belum berhasil ditertibkan.

4. Pengendalian dan Pengawasan. Sub indikator ini belum mencapai nilai optimal disebabkan oleh:

- Laporan tindak lanjut atas hasil rekomendasi yang diberikan inspektorat belum ada.
- Belum ada berita acara tindak lanjut Reviu Tata Kelola BMD.
- Pakta Integritas Pemanfaatan BMD belum semua terpenuhi.

B. Upaya yang dilakukan

Upaya yang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi atas penilaian MCP tahun 2023 utamanya pada area yang capaiannya belum optimal atau masih di bawah 100 persen, adalah:

1. Pada area Perencanaan dan Penganggaran. Pada indikator area perencanaan dan penganggaran APBD terdapat dua indikator yang masih rendah, yaitu pengawasan bantuan pemerintah dan pengendalian pengawasan anggaran. Oleh karena itu, KPK merekomendasikan dan mengusulkan perencanaan dan anggaran perlu dipisahkan pada MCP pada 2024. Upaya lain guna perbaikan di tahun 2024 adalah berkomitmen melaksanakan mekanisme tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Terhadap pencegahan markup biaya dan pendapatan yang tidak wajar adalah perlu adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik. Hal tersebut akan ditempuh melalui langkah-langkah:

- Melaksanakan kegiatan PBJ dengan Implementasi ASB & HSPK.
- Melakukan analisis biaya yang teliti.
- Penetapan margin yang rasional.
- Transparansi dalam penetapan estimasi biaya.
- Melakukan review rutin.
- Pemantauan dan pelaporan yang teratur.

2. Pada area pengawasan APIP. Upaya – upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian MCP adalah sebagai berikut:

- Dalam pemenuhan persentase diklat minimum 120 jam, inspektorat Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 lebih banyak melaksanakan kegiatan pelatihan/bimtek/workshop



didalam daerah bekerjasama dengan perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dimana pelaksanaannya 1 kali dalam sebulan. selain itu juga dilaksanakan program pelatihan mandiri (PPM) oleh auditor dan PPUPD dilingkungan inspektorat daerah Provinsi Gorontalo.

- Untuk pemenuhan anggaran APIP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan implementasi TPP APIP diatas opd lain dan dibawah sekda secara berjenjang, inspektorat Provinsi Gorontalo akan terus menyampaikan hal tersebut pada rapat pimpinan dan rapat bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
 - Untuk penguatan kelembagaan, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo akan terus berkoordinasi terkait dengan revisi Peraturan Gubernur Gorontalo terkait organisasi tata kerja. dimana dalam revisin Pergub tersebut memuat tugas dan fungsi inspektur pembantu khusus. dengan adanya tugas dan fungsi inspektur pembantu khusus dan revisi Pergub tersebut selanjutnya dapat diangkat pejabat inspektur pembantu khusus.
3. Pada area Manajemen ASN. Upaya – upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan capain MCP adalah menindaklanjuti hasil penilaian MCP yaitu menyusun laporan penilaian mandiri implementasi sistem merit yang memadai serta memberikan bukti dukung untuk kelengkapan laporan. Melengkapi kekurangan dokumen pada aspek-aspek yang dinilai yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi kepegawaian.
4. Pada area Optimalisasi Pajak Daerah. Kinerja pengelolaan untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah dilakukan secara berkala untuk perbaikan yang berkelanjutan dengan strategi:
- a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan.
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak dan obyek retribusi baru dan pengembangan sistim operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
 - c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran.



- d. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat membayar pajak melalui drive thru, samsat keliling, samsat night dan pengembangan samsat online.
 - e. Penyebarluasan informasi pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
 - f. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
 - g. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan di tataran kebijakan, dengan Polri dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan asli daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil.
 - h. Kerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Dirjen Pajak untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat membayar pajak.
 - i. Penyesuaian cara pendataan, penagihan objek pajak daerah dengan memanfaatkan database dan lebih menekankan interaksi melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi, daripada interaksi tatap muka langsung dengan wajib pajak.
 - j. Lebih menginsentifkan pemanfaatan armada samsat keliling melakukan pelayanan kepada wajib pajak dan pembukaan samsat pembantu untuk penyelenggaraan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan untuk meningkatkan radius jangkauan pelayanan.
5. Manajemen Aset Daerah. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengelolaan manajemen asset di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk pengelolaan BMD tahun 2023 meliputi: inventarisasi asset, penilaian aset, pengurusan legalitas (bukti kepemilikan), penghapusan aset kondisi rusak berat. Untuk tahun 2024, upaya yang akan dilakukan yaitu menindaklanjuti hasil penilaian MCP, melengkapi bukti dukung pengelolaan BMD yaitu
- Menyusun dokumen terkait jumlah bidang asset yang telah didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 - Membuat timeline yang berisi target pensertifikatan beserta anggarannya mulai dari tahun 2023 sampai tahun 2025.

- Menyusun laporan tindak lanjut atas rekomendasi hasil reviu internal serta berita acara tindak lanjut hasil reviu tata kelola barang milik daerah.
- Mengoptimalkan penetapan pakta integritas pemanfaatan barang milik daerah.

Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

A. Capaian Kinerja

Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian terhadap target Perjanjian Kinerja 2023

119,43%

Capaian terhadap target RPD 2023-2026

116,22%



Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023 memperoleh indeks 77,75 dengan kategori BB. Capaian atas hasil evaluasi RB tahun 2023 ini bukan hanya terdapat kenaikan pada indeks tetapi juga naik dalam kategori dari B ditahun 2022 menjadi BB di tahun 2023. Dibawah ini akan diuraikan perolehan nilai implementasi RB Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 3.1.48
Rincian Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi
Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
A.	RB General	100	66,36
B.	RB Tematik	20	11,36
C.	Indeks RB	120	77,75
	Kategori		BB

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2023

Dari gambaran pada tabel 3.1.48 diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi atas RB General mencapai 66,36 dari bobot nilai sebesar 100. Untuk RB Tematik mencapai 11,39 dari bobot nilai 20 dan indeks RB mencapai 77,75 dari bobot sebesar 120 atau dengan kategori BB. Capaian tahun 2023 dibandingkan dengan capaian akhir RPD mencapai 116,22 persen.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo, meletakkan reformasi birokrasi sebagai tujuan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Berpijak dari tujuan tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Arah pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo dipandu dengan rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi yang termuat dalam *road map* reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo perubahan 2023-2024. Sampai dengan akhir tahun 2022 hingga tahun 2023, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan beberapa agenda kerja reformasi birokrasi yang terutama fokus pada pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya. Rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dijadikan landasan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo yang lebih baik dan berkualitas. Selain pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga fokus pada pelaksanaan RB tematik dalam upaya menjawab isu-isu strategis Nasional saat ini dan utamanya isu strategis daerah yaitu dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting dan pengendalian inflasi.

B. Upaya yang dilakukan

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Utamanya dalam mendorong pelaksanaan RB tematik melalui pelaksanaan rencana aksi. Langkah2 strategis yang tertuang dalam rencana aksi RB tematik yang selanjutnya diimplementasikan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Inflasi. Pada akhir tahun 2023, inflasi Gorontalo berada pada angka 3,88 persen. Target Nasional pada akhir tahun 2024 terhadap Inflasi adalah 3,2 persen. Upaya yang akan dilakukan di tahun 2024 dalam pelaksanaan RB tematik mengendalikan inflasi di Provinsi Gorontalo antara lain adalah :



- a. Membangun komunikasi yang efektif dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah yang sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017.
 - b. Melakukan pemetaan dan analisa kebutuhan komoditas, pangan daerah yang disandingkan dengan persebaran di daerah lainnya.
 - c. Menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana dalam penyaluran komoditas pangan antar daerah.
 - d. Mengoptimalkan platform fasilitasi distribusi pangan yang disediakan oleh pemerintah (pasar, took dan mitra lainnya).
 - e. Menciptakan inovasi untuk memangkas rantai distribusi.
 - f. Membentuk lembaga usaha pangan masyarakat (LUPM) yang mewadahi kelompok petani dan nelayan.
2. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan pada Penanganan Stunting. Pada akhir tahun 2023, prevalensi stunting Provinsi Gorontalo berada pada angka 23,8 dari target daerah sebesar 26 atau capaian sebesar 108,46 persen. Target Nasional pada akhir tahun 2024 sebesar 14 persen. Dalam upaya penanganan prevalensi stunting, tidak hanya terhadap penurunan prevalesi stunting saja tetapi lebih fokus pada digitalisasi administrasi pemerintah atau kualitas database dalam pengelolaan intervensi stunting. Upaya yang akan dilakukan di tahun 2024 dalam pelaksanaan RB tematik digitalisasi administrasi pada penanganan stunting di Provinsi Gorontalo antara lain adalah :
- a. Melaksanakan pemutahiran data ditingkat provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan dan kelurahan/Desa terkait stunting.
 - b. Menyusun manual book/pedoman penggunaan sistem informasi stunting di Provinsi Gorontalo.
 - c. Terlaksananya Pemetaan kebutuhan perangkat pendukung Sistem Informasi stunting.
 - d. Terlaksananya Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi.
 - e. Terlaksananya mitigasi risiko data sistem informasi.
3. Peningkatan Realisasi Investasi. Pada akhir tahun 2023, realisasi investasi Provinsi Gorontalo mencapai 5.515 Milyar Rupiah dari target daerah sebesar 2.600 Milyar Rupiah atau mencapai 212,12 persen. Meskipun realisasi investasi Provinsi Gorontalo terus naik dari tahun ke tahun,

tetapi terus dilakukan upaya-upaya strategis untuk terus meningkatkan investasi. Upaya yang akan dilakukan di tahun 2024 dalam pelaksanaan RB tematik peningkatan realisasi investasi di Provinsi Gorontalo antara lain adalah :

- a. Menyediakan peta potensi investasi yang factual yang mudah diakses.
 - b. Melakukan pemasaran investasi daerah yang efektif.
 - c. Meningkatkan kepatuhan pemenuhan kriteria penilaian kinerja layanan investasi
 - d. Meningkatkan hasil implementasi kebijakan pelayanan perizinan.
 - e. Membuat tata ruang yang selaras dengan kebutuhan berusaha.
 - f. Meningkatkan stabilitas keamanan.
 - g. Memberikan kemudahan aksesibilitas permodalan.
 - h. Meningkatkan jumlah pengusaha yang melaporkan kegiatan penanaman modal.
 - i. Meningkatkan ketepatan informasi laporan kegiatan penanaman modal.
4. Pengentasan Kemiskinan. Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada akhir tahun 2023 berada pada angka 15.15 persen atau sebesar 183,71 ribu orang. Target Nasional penurunan kemiskinan di tahun 2024 adalah sebesar 6,0-7,0 persen. Sementara untuk kemiskinan ekstrim, pada akhir tahun 2023, Pemerintah Provinsi Gorontalo berada pada angka 2,44 persen menurun 1,84 poin dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, dan target penurunan angka kemiskinan Nasional di tahun 2024 adalah 0 persen. Dalam mendukung target daerah dan target Nasional tersebut maka upaya yang akan dilakukan di tahun 2024 dalam pelaksanaan RB tematik pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo antara lain adalah:
- a. Menyusun Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan tepat sasaran dengan melibatkan Perangkat Daerah pengampuh lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.
 - b. Melakukan rekonsiliasi data penduduk miskin dan pemuktahiran data sasaran/lokus.
 - c. Melakukan profiling penduduk miskin.
 - d. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data sasaran/lokus penduduk miskin.
 - e. Menyusun standar prosedur persyaratan penerima bantuan masyarakat miskin.
 - f. Membuat komitmen dalam pengentasan kemiskinan.



5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Pada akhir tahun 2023, penggunaan produk dalam negeri Pemerintah Provinsi Gorontalo utamanya untuk belanja-belanja pemerintah, sudah mencapai 100 persen melalui dukungan aplikasi e-Purchasing dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan upaya-upaya guna optimalisasi penggunaan produk dalam negeri utamanya pada sistem teknologi informasi dalam menunjang proses pengadaan barang dan jasa. Untuk mendukung target daerah dan target Nasional maka upaya yang akan dilakukan di tahun 2024 dalam pelaksanaan RB tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Provinsi Gorontalo antara lain adalah:
- a. Melakukan peningkatan pada sistem aplikasi pengadaan barang dan jasa mulai dari proses tender dan kontrak.
 - b. Penerbitan regulasi daerah yang mendukung P3DN dan UMKM.
 - c. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dan UMKM local sehingga mampu memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa.
 - d. Melakukan MOU dengan UMKM dan pelaku usaha PDN.
 - e. Melakukan business matching antara UKPBJ, PD dengan pelaku usaha (penyedia).
 - f. Membuat MOU dengan perusahaan swasta/BUMN untuk memberikan program pelatihan keahlian kepada pelaku usaha UMKM.
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi e-katalog terkait harga (telah mencantumkan biaya tambahan seperti biaya kirim, biaya instalasi, dll) dan aktifitas penyedia (aktif atau tidak, bagaimana ratingnya).

Sementara itu, upaya perbaikan juga diarahkan untuk pencapaian target2 yang masuk pada RB general utamanya terhadap target-target kinerja yang di tahun 2023 belum sesuai dengan yang diharapkan atau masih memerlukan kerja lebih keras lagi. Adapun kinerja yang perlu optimalisasi pencapaiannya adalah:

1. Pelaksanaan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi.

Regulasi tentang penetapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi di Provinsi Gorontalo sudah memasuki tahapan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.

2. Pembangunan zona integritas.



Pembangunan zona integritas akan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kementerian PANRB selaku TPN dengan mengimplementasikan rencana aksi: 1). Melakukan pembangunan zona integritas berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 serta memperhatikan ketentuan-ketentuan mekanisme pengajuan ke TPN sehingga dapat meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas. 2). Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan enam area perubahan pembangunan zona integritas sehingga pelaksanaannya berjalan secara efektif yaitu meningkatkan integritas, pelayanan, dan kinerja, juga untuk memastikan unit kerja yang diajukan mendapatkan WBK dapat melengkapi data dukung yang cukup dan memenuhi kriteria unit kerja berpredikat WBK/WBBM. 3). Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sehingga dapat diketahui implementasi inovasi tersebut sesuai dengan tujuan pelaksanaan inovasi. 4). Mengoptimalkan peran Tim Penilai Internal (TPI) terutama dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi terkait peningkatan kualitas pembangunan zona integritas pada Perangkat Daerah yang sedang melakukan pembangunan zona integritas.

3. Peningkatan indeks kualitas kebijakan.

Upaya meningkatkan perbaikan hulu kebijakan pemerintah yaitu lewat penetapan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). IKK merupakan instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah yang dilihat dari proses pembuatan kebijakan, pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi. Pada tahun 2023, IKK Provinsi Gorontalo masih belum dievaluasi atau masih belum mendapatkan nilai. Hal ini salah satunya disebabkan oleh keterlambatan dalam penyampaian data dukung IKK. Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga saat ini sudah banyak melakukan upaya di semua sektor pembangunan guna memperbaiki kualitas kebijakan. Begitu pentingnya peran kebijakan public terhadap keberkangsungan pembangunan daerah yaitu sebagai alat atau instrumen untuk memecahkan masalah masyarakat atau publik yang tidak dapat dipecahkan sendiri-sendiri, sebagai transformatif dalam pemecahan masalah publik, dan sebagai instrumen leverage yang diharapkan mampu menopang masyarakat dan memenangkan kompetisi dibanding dengan daerah lain, olehnya, upaya yang akan dilakukan kedepan yaitu:



LKIP 2023

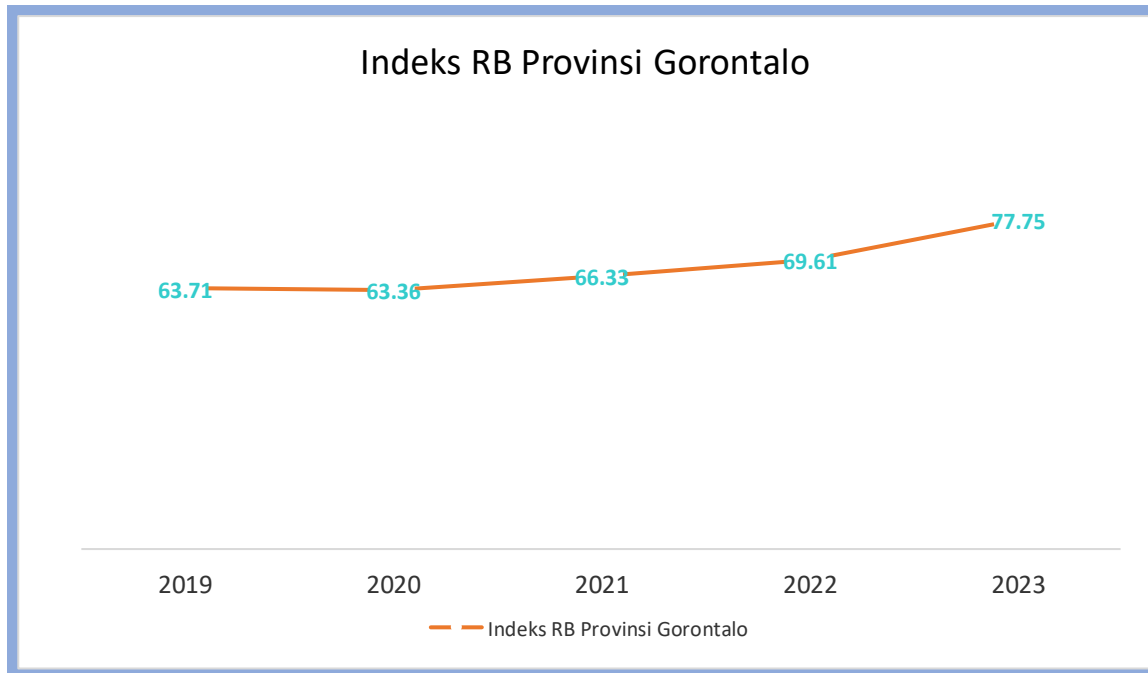
Provinsi Gorontalo

- a. Mengoptimalkan penyediaan data dukung IKK sesuai dengan ketentuan.
 - b. Meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dapat memberi dampak baik kepada masyarakat.
 - c. Melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan.
4. Peningkatan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.
- Kematangan penyelenggaraan statistic sectoral juga perlu optimalisasi implementasinya. Olehnya, upaya yang akan dilakukan di tahun 2024 antara lain adalah: 1). menetapkan standar/pedoman ataupun menyusun kebijakan yang berlaku untuk seluruh unit kerja di Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menerapkan seluruh Aspek Standar Data Statistik, 2). Membuat metadata Statistik, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk pada proses penyelenggaraan statistik sektoral, 3). Mengoptimalkan peran Walidata Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
5. Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR). Optimalisasi akan dilakukan dengan menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut dan komitmen dalam percepatan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Bahwa, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan pembenahan-pembenahan dan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan serta mulai membangun *e-government* mulai dari sistem perencanaan daerah sampai dengan penganggaran dan pelaporan serta evaluasi. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui pencapaian reformasi birokrasi tersebut, diharapkan dapat terus meningkatkan indeks reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi lebih baik dari tahun ke tahun sampai dengan terwujudnya birokrasi kelas dunia.

Dibawah ini adalah perkembangan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Gambar 3.1.49
Trend Peningkatan Indeks RB Provinsi Gorontalo
Tahun 2019-2023



Sumber: LHE RB Pemerintah Provinsi Gorontalo

Pada gambar 3.1.49 terlihat tren perkembangan indeks RB di Provinsi Gorontalo tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada kurun waktu lima tahun terakhir, indeks RB mengalami terus mengalami kenaikan, hanya di tahun 2020 terjadi penurunan indeks sebesar 0,35 poin. Kenaikan indeks RB tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 8,14 poin dan merubah kategori dari B menjadi BB.

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan perbandingan indeks reformasi birokrasi dengan daerah lain di Sulawesi dan perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Gambar 3.1.50

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo di Bandingkan dengan Daerah Lain Di Wilayah Sulawesi Tahun 2023



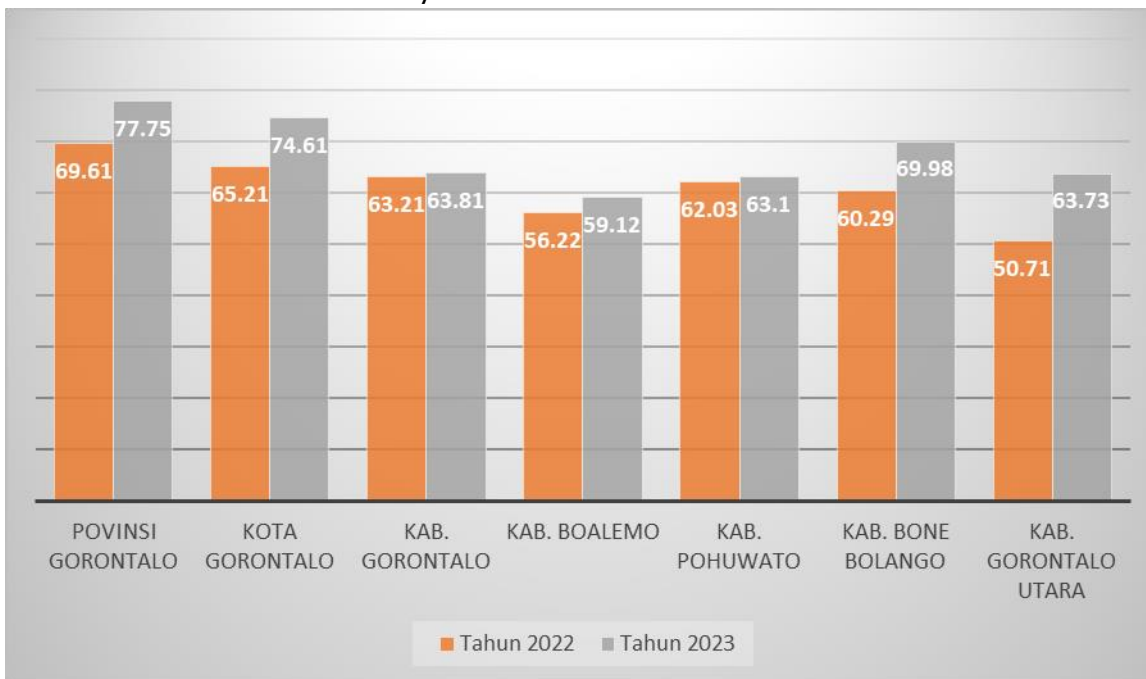
Sumber: Kementerian PANRB

Dari gambar 3.1.50 dapat dilihat bahwa indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi tahun 2023 tertinggi dari lima daerah lainnya se-Sulawesi. Sementara di urutan kedua ada Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tenggara, diikuti oleh Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, serta yang terakhir dan yang terendah adalah Sulawesi Utara dengan predikat CC.

Selanjutnya, indeks reformasi birokrasi perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Gambar 3.1.51

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo di Bandingkan dengan Kab/Kota Di Wilayah Gorontalo Tahun 2022-2023



Sumber: LHE RB Provinsi dan Kab/Kota

Dari gambar 3.1.51 diatas dapat dilihat bahwa, indeks reformasi birokrasi di Wilayah Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Meskipun demikian, masih perlu terus melakukan perbaikan-perbaikan kearah yang lebih baik utamanya untuk daerah yang belum memperoleh kategori baik yaitu Kabupaten Boalemo. Komitmen yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Wilayah Provinsi Gorontalo juga masih perlu terus ditingkatkan. Pada tahun 2022, terdapat kenaikan kategori untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bone Bolango, yaitu dari kategori CC menjadi B dengan kenaikan indeks sebesar 2,25 poin. Sedangkan di tahun 2023 terdapat 3 (tiga) daerah yang mengalami kenaikan kategori yaitu Provinsi Gorontalo dari B menjadi BB dengan kenaikan nilai sebesar 8,14 poin, Kota Gorontalo dari B menjadi BB dengan kenaikan nilai sebesar 9,40 poin dan Kabupaten Gorontalo Utara dari CC menjadi B, dengan kenaikan nilai sebesar 13,02 poin. Komitmen pimpinan tinggi serta sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan

kunci utama keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah Provinsi Gorontalo.

Indikator Kinerja Opini Pengelolaan Keuangan

A. Capaian Kinerja

Opini Pengelolaan Keuangan

Capaian terhadap target Perjanjian Kinerja 2023

100%

Capaian terhadap target RPD 2023-2026

100%



Target kinerja atas opini pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam RPD Tahun 2023 - 2026 adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Sebagai dasar pemberian opini atau pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari: 1) Kesesuaian, 2) Kecukupan, 3) Kepatuhan, 4) Efektivitas.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah SAP Berbasis Akrual yaitu yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Manfaat dari basis akrual ini adalah memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja

pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut meliputi komponen pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Untuk memenuhi capaian target WTP beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

1. Membangun komitmen daerah;
2. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK;
3. Membuat rencana aksi dan membentuk tim;
4. Mengantisipasi temuan baru tahun berjalan;
5. Mengaktifkan SPI (Sistem Pengendalian Intern);
6. Dukungan Regulasi (SAK/SIMBADA);
7. Dukungan IT Memadai;
8. Mengoptimalkan Peran APIP;
9. Meningkatkan Kualitas SDM;
10. Melakukan Monitoring dan Evaluasi;
11. Dukungan Anggaran.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghindari temuan yang berulang adalah sebagai berikut:

- Menjaga akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- Komitmen bersama;
- Penguatan pengendalian dan manajemen risiko;
- Monitoring evaluasi dilakukan secara berkala dan disiplin;

- Sistem dan mekanisme tindak lanjut harus memadai;
- Dibutuhkan komunikasi yang intens dan sinergitas antar entitas keuangan.

Selanjutnya, akan diuraikan kunci sukses Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendapatkan kewajaran atas laporan keuangan selama 11 kali berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK yaitu sejak tahun 2013 hingga tahun 2023 (untuk tahun 2023 adalah WTP atas LKPD tahun 2022), sebagai berikut:

- ✚ Melakukan opname Kas dan pencocokan dengan Silpa;
- ✚ Konfirmasi/inventarisasi piutang;
- ✚ Stock opname setiap akhir tahun khususnya terhadap SKPD yang memiliki persediaan signifikan;
- ✚ Inventarisasi dan penilaian aset tetap dan rekonsiliasi dengan daftar aset tetap;
- ✚ Disclosure atas segala hal material yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam menjalankan komitmen tersebut, dapat tergambar pula dalam prestasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Daerah dimana selama sepuluh tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Capaian tersebut adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan terlebih lagi di tahun 2014, 2016 dan 2018 menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang seluruh daerahnya meraih WTP atas Laporan Keuangannya (100 persen) dan pada tahun 2023 Provinsi Gorontalo kembali memperoleh opini WTP.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Catatan informasi keuangan suatu daerah pada tahun tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja atas alokasi anggaran daerah yang diperoleh. Capaian kinerja atas penyelenggaraan keuangan daerah atau penggunaan anggaran pada Pemerintah Provinsi Gorontalo terus ditorehkan, hal ini dapat terwujud salah satunya adalah karena adanya komitmen yang tinggi untuk melaksanakan rencana aksi dan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan BPK.

Capaian opini WTP 11 (sebelas) tahun berturut-turut yang diperoleh Pemerintah Provinsi Gorontalo ini membuktikan bahwa tetap terbangunnya kualitas pertanggungjawaban LKPD pemerintah daerah dari tahun ke tahun sebagai bentuk komitmen dalam mengelola tata

keuangan yang baik walaupun menghadapi situasi yang tidak terduga di tahun 2021 sampai tahun 2022 akibat pandemi Covid-19.

Setelah opini WTP diraih, apa manfaatnya bagi masyarakat. WTP yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo didapat melalui proses yang panjang. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan atau penatausahaan, dan pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran. Laporan keuangan berperan sebagai pintu akhir dalam siklus anggaran. Pada tahap pelaksanaan anggaran dilakukan berbagai kegiatan pemerintahan berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial yang tentunya untuk mendukung program pemerintahan. Anggaran yang dibelanjakan tersebut diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat Gorontalo sehingga menghasilkan pengaruh yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, pencapaian opini WTP merupakan sarana keterbukaan informasi kepada publik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Capaian opini WTP diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menarik investor. Dengan tertariknya investor untuk menanamkan modalnya diharapkan pendapatan asli daerah dapat bertambah sehingga kemandirian fiskal daerah dapat ditingkatkan.

Selanjutnya, opini WTP yang diraih merupakan salah satu kriteria utama pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Kriteria lainnya dalam pemberian DID yaitu penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu, pengadaan barang/jasa secara elektronik, aplikasi penganggaran berbasis elektronik, dan ketersediaan pelayanan terpadu satu pintu. Dimana di tahun 2023, berdasarkan hasil *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) oleh KPK, untuk pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Provinsi Gorontalo memperoleh capaian 100 persen. Opini WTP bermanfaat pula dalam mengawal tata kelola keuangan yang baik. Opini WTP diberikan oleh BPK dengan empat kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan kecukupan pengungkapan. Kesesuaian dengan SAP berarti laporan keuangan telah disusun dengan regulasi yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Sedangkan efektivitas SPI bertujuan agar dapat dicapainya program pemerintah sesuai sasaran dan mencegah terjadinya kecurangan maupun korupsi.

Dari beberapa manfaat diperolehnya opini WTP, pada akhirnya predikat opini WTP merupakan wujud pertanggungjawaban tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Upaya yang dilakukan

Di tahun 2024, sebagai rencana aksi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, akan ditempuh langkah-langkah strategis dalam upaya mempertahankan WTP Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

- ❖ Peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM menjadi sangat *urgent* dan perlu terus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Sasaran dari pengembangan kualitas SDM adalah untuk meningkatkan kinerja. Kualitas SDM yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas;
- ❖ Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi Keuangan Daerah;
- ❖ Meningkatkan sistem pengendalian internal, yang tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku;
- ❖ Mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas LKPD dengan Penguatan komitmen bersama dan penyatuan langkah yang dituangkan dan dikendalikan dalam rencana aksi yang didukung oleh seluruh Perangkat Daerah. Pembentukan dan penguatan peran konsultatif dan koordinasi satgas SPIP dan satlak SPIP-OPD;
- ❖ Pengelolaan aset terkait pencatatan dan pelaporan sehingga sesuai dengan ketentuan. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah;
- ❖ Memfasilitasi tindak lanjut temuan BPK, melalui pembuatan rencana aksi atas temuan dan rekomendasi BPK dan pembentukan tim agar temuan dan rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti;
- ❖ Terus melakukan antisipasi terhadap temuan baru tahun berjalan, dan menyusun LKPD tahun berikutnya dengan selalu memperhatikan rekomendasi BPK pada LKPD tahun-tahun sebelumnya.

- ❖ Menyusun *Action Plan* yang terintegrasi harus dalam setiap penyusunan rencana pembangunan;
- ❖ Meningkatkan evaluasi rutin dan pengawasan internal yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah, serta perbaikan terhadap tugas dan fungsi dan SOP dalam mendukung kewajiban implementasi SAP berbasis akrual;
- ❖ Melakukan Penetapan Perda APBD paling lambat Desember tahun sebelumnya (tepat waktu). Semua dokumen pelaksanaan anggaran dan penunjukkan pengelola keuangan dan panitia/pejabat pengadaan telah ditetapkan pada Desember tahun sebelumnya;
- ❖ Meningkatkan kualitas hasil bimbingan teknis/sosialisasi/supervise/ pendampingan tentang implementasi pengelolaan keuangan yang baik yang dilakukan kepada seluruh pengelola keuangan mulai dari pimpinan dan pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, terutama Bendaharawan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, sampai kepada para Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- ❖ Terus mendorong pelaksanaan dan penggunaan transaksi non tunai dalam setiap transaksi penggunaan anggaran/belanja daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya, pada tabel dibawah ini akan sajikan perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo atas sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dengan target Nasional, sebagai berikut:

Tabel 3.1.52
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Nasional	Capaian (%)
1	3	4	5	6
1	Nilai MCP (Monitoring Center For Prevention)	81,50	95	85,79
2	Indeks Reformasi Birokrasi	77,75	85	91,47
3	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	100

Sumber Data : RPJMN 2020-2024, Inspektorat, LHE RB Provinsi dan Badan Keuangan Tahun 2024

Selain opini pengelolaan keuangan, kinerja utama peningkatan nilai MCP dan indeks reformasi birokrasi, juga di dukung oleh beberapa indikator kinerja pendukung yang tentunya sangat menentukan pencapaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 3.1.53
Capaian Kinerja Pendukung Pemerintah Provinsi Gorontalo
yang mendukung Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai SAKIP	BB (70,01)	B (68,66)	98,07
2.	Indeks Sistem Merit	292	327	111,99
3.	Nilai Maturitas SPBE	2,82	3,22	114,18
4.	Indeks Demokrasi	72	73,74	102,42
5.	Nilai Pengawasan Kearsipan	62	63,47	102,37

Sumber: Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

C. Efisiensi



Dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo, untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, di tetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang di dukung dengan berbagai program dan kegiatan, maka persentase realisasi anggaran dihitung dari rata-rata realisasi anggaran program yang mendukung semua indikator tersebut. Sementara itu, capaian kinerja dihitung dari rata-rata capaian kinerja dari semua indikator kinerja tersebut.

Efisiensi dihitung dengan membandingkan antara capaian realisasi anggaran dengan capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, dari rata-rata capaian indikator kinerja adalah 102,46 persen. Sementara itu, Alokasi anggaran terhadap program-program yang telah dilaksanakan dalam mendukung kinerja ini adalah sebesar Rp. 325.318.055.411,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 298.265.286.714,00 atau 91,68 persen. Adapun program-program yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja ini adalah sebagai berikut: 1) program penyelenggaraan pengawasan, 2) program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 3) program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, 4) program pengelolaan aplikasi informatika, 5) program pengelolaan arsip, 6) program perlindungan dan penyelamatan arsip, 7) program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, 8) program pengembangan sumber daya manusia, 9) program pengelolaan keuangan daerah, 10). program pengelolaan barang milik daerah, 11) program pengelolaan pendapatan daerah, 12) program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, 13) program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, 14). program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, 15) program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, 16) program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik social, 17) program kepegawaian daerah, 18) program fasilitasi dan koordinasi hukum, 19) program penataan Organisasi, 20) program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa, 21) program perekonomian dan pembangunan, 22) program kebijakan administrasi pembangunan.

Dengan demikian, jika dinilai dari sisi efisiensi anggaran, didapatkan nilai sebesar 0,89 persen poin yang berarti bahwa penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja ini telah "efisien" (nilai hasil perbandingan realisasi anggaran dengan nilai kinerja kurang dari 1 poin).

3.2. REALISASI ANGGARAN

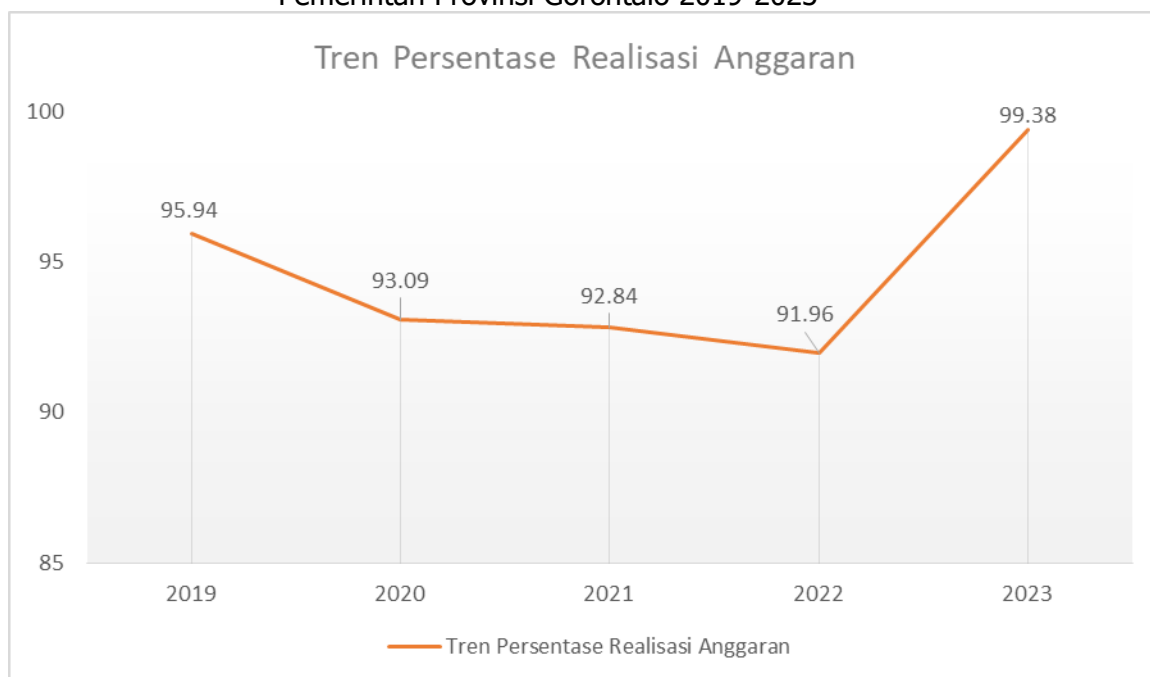
Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki struktur APBD yaitu pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta belanja daerah yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengalokasian anggaran ini untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2019, tingkat pagu belanja tercatat sebesar 2 Triliun yaitu Rp. 2.020.131.920.539,50 naik sebesar 11 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Kenaikan pagu anggaran belanja di tahun 2019 utamanya didorong oleh kenaikan pagu anggaran belanja operasi dan bagi hasil sebesar 16,4 persen dan 7,48 persen. Di sisi lain, terjadi penurunan pagu anggaran belanja modal yakni sebesar 7,35 persen yang didorong oleh penurunan belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 25,2 persen dan belanja bangunan gedung sebesar 18 persen. Sementara itu, realisasi penggunaan anggaran tahun 2019 sebesar 1.938.384.421.061,72 atau sebesar 95,94 persen. Peningkatan belanja operasi didorong oleh adanya peningkatan realisasi belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa masing-masing sebesar 7,4 persen dan 29,6 persen. Adapun jenis belanja pegawai yang dilakukan adalah kenaikan gaji tahunan PNS dan pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 kepada seluruh ASN serentak di Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo bersamaan dengan pembayaran gaji pada Bulan Juli 2019.

Pada tahun 2020 anggaran pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp.1.861.054.053.151,92 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.1.732.528.592.447,17 atau sebesar 93,09 persen. Pada tahun 2021, anggaran sejumlah Rp.2.010.882.300.876,37 dengan realisasi sebesar Rp.1.866.359.526.688,85 atau 92,84 persen. Dan pada tahun 2022, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo yaitu, Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.784.137.999.082,00, belanja daerah sebesar Rp. 2.122.278.456.084,- pembiayaan sebesar Rp. 338.140.457.002,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.848.237.161.017,83 atau sebesar 91,96 persen. Selanjutnya pada tahun 2023 ini, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo yaitu, Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.877.746.586.137,00, realisasi sebesar

Rp. 1.866.166.057.632,68,- atau 99,38 persen. Tren persentase realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai berikut

Tabel 3.2.53
Tren Persentase Realisasi Anggaran
Pemerintah Provinsi Gorontalo 2019-2023



Sumber: Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Persentase realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 90 persen lebih yaitu di rentang 91,96 sampai dengan 99,38 persen. Berdasarkan pelaksanaan program, realisasi anggaran beberapa Perangkat Daerah yang rata-rata diatas 95 persen bahkan lebih antara lain yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selengkapnya, di bawah ini akan disajikan realisasi anggaran per program yang mendukung kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.2.54
Realisasi Anggaran Menurut Urusan, Program, Organisasi
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIAT DAERAH			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	79.962.895.082,00	71.110.868.711,00	88,93
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.231.986.500,00	3.161.284.905,00	97,81
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.452.867.275,00	1.440.753.145,00	99,17
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.102.397.114,00	2.015.170.862,00	95,85
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	34.816.579.848,00	33.524.259.103,00	96,29
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.044.386.221,00	1.036.811.060,00	99,27
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.472.206.701,00	1.431.629.861,00	97,24
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	485.411.716,00	478.558.873,00	98,59
2	BADAN KEPEGAWAIAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.173.547.532,00	8.768.620.653,00	95,59
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.134.214.960,00	3.814.908.517,00	92,28
3	BADAN KESBANGPOL			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.045.536.571,00	6.825.808.188,00	96,88
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	281.167.547,00	270.369.035,00	96,16
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	49.602.869.178,00	49.408.948.922,00	99,61
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.290.266.592,00	2.289.769.608,00	99,98
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.112.705.703,00	1.110.646.438,00	99,81
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.650.601.885,00	2.501.610.201,00	94,38
4	BADAN KEUANGAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.617.046.097,00	61.374.204.275,00	93,53



	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	231.668.906.136,00	205.923.977.121,00	88,89
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.570.481.800,00	1.539.594.698,00	98,03
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.122.834.090,00	6.918.623.582,00	97,13
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.088.383.455,00	2.055.821.342,00	98,44
6	BADAN PENGHUBUNG			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.650.700.082,00	7.230.196.303,00	94,50
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.505.954.189,00	1.424.093.385,00	94,56
7	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.690.990.736,00	11.168.468.837,00	95,53
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.267.865.909,00	3.215.243.066,00	98,39
8	BAPPPEDA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.319.772.397,00	13.671.808.708,00	95,48
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.090.701.555,00	1.046.267.837,00	95,93
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.356.551.116,00	2.339.451.455,00	99,27
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.467.521.832,00	2.446.810.376,00	99,16
9	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.161.433.783,00	8.745.224.680,00	95,46
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	462.026.410,00	458.103.349,00	99,15
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	343.390.325,00	342.267.722,00	99,67
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	50.000.000,00	49.709.141,00	99,42
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	98.432.004,00	98.137.166,00	99,70
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.533.560.381,00	15.827.598.557,00	95,73
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	826.924.000,00	797.260.652,00	96,41
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.695.936.081,00	13.921.441.997,60	83,38
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.501.063.500,00	2.481.873.010,00	99,23
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.827.702.000,00	3.737.641.610,00	97,65



	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	6.370.731.240,00	6.232.623.847,02	97,83
11	DINAS KESEHATAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	103.177.155.809,00	97.204.047.334,65	94,21
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75.781.144.514,00	68.620.147.112,88	90,55
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	126.747.500,00	126.164.971,00	99,54
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	16.579.551.205,00	15.605.361.470,00	94,12
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	160.512.433,00	142.632.170,00	88,86
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	370.563.000,00	352.650.904,00	95,17
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.547.331.000,00	1.448.788.940,00	93,63
12	DINAS KOMINFO DAN STASTIK			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.839.131.144,00	9.683.585.678,00	98,42
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	706.794.620,00	705.390.724,00	99,80
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	239.315.200,00	238.630.271,00	99,71
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.968.833.000,00	4.899.384.216,00	98,60
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.247.287.500,00	4.164.158.021,00	98,04
13	DINAS KOPERASI, UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.040.115.641,00	13.666.150.434,00	97,34
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100.851.820,00	96.180.367,00	95,37
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.257.366.785,00	3.235.706.933,00	99,34
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	140.000.200,00	139.893.350,00	99,92
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	13.333.703.192,00	10.045.516.280,00	75,34
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	150.108.075,00	146.523.720,00	97,61
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.494.733.400,00	1.476.095.636,00	98,75
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	234.795.299,00	212.371.682,00	90,45
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	511.954.900,00	510.775.050,00	99,77



	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.761.813.855,00	2.711.597.768,00	98,18
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.858.867.200,00	1.847.359.972,00	99,38
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	16.003.422.900,00	15.962.538.638,00	99,74
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.306.052.592,00	27.360.926.014,00	96,66
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.684.008.323,00	5.675.387.423,91	99,85
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	575.814.304,00	573.361.010,00	99,57
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	330.479.762,00	328.575.457,00	99,42
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	68.942.600,00	47.014.477,00	68,19
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	270.188.706,00	267.596.694,00	99,04
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	963.930.075,00	963.668.382,00	99,97
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.055.974.900,00	1.035.998.184,00	98,11
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	215.873.318,00	215.776.545,00	99,96
15	DINAS KETAHANAN PANGAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.820.194.445,00	8.401.802.611,00	95,26
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.256.494.648,00	1.820.137.863,00	80,66
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.307.614.252,00	1.304.032.173,00	99,73
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	235.070.025,00	232.765.674,00	99,02
16	DINAS PARIWISATA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.536.616.350,00	8.836.734.956,00	92,66
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.403.214.587,00	3.287.473.984,00	96,60
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.723.439.581,00	2.697.485.727,00	99,05
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	748.964.761,00	742.028.611,00	99,07



	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	402.881.632,00	397.222.725,00	98,60
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.501.966.725,00	33.001.375.038,00	92,96
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	747.964.230,00	676.155.522,00	90,40
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	681.044.451,00	597.331.176,00	87,71
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.088.406.239,00	2.010.147.132,00	96,25
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	47.489.566.075,00	37.767.966.638,00	79,53
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.200.099.500,00	1.137.854.129,00	94,81
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1.504.025.420,00	1.245.185.137,00	82,79
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.997.133.608,00	1.792.942.243,00	89,78
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	90.777.100,00	79.197.576,00	87,24
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.522.260.772,00	2.407.975.479,00	95,47
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	19.277.607.571,00	17.902.084.234,00	92,86
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.844.073.258,00	3.388.459.906,00	69,95
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.308.802.524,00	1.238.661.401,00	94,64
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	91.804.781.181,00	78.208.642.690,00	85,19
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	798.802.530,00	759.623.336,00	95,10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.165.133.181,00	2.075.378.876,00	95,85
18	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	910.467.646,00	910.467.646,00	100,00
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.987.678.760,00	7.712.688.390,00	96,56
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	150.000.000,00	149.982.300,00	99,99
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	425.000.000,00	424.836.951,00	99,96
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	199.530.000,00	198.971.300,00	99,72
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	135.120.482,00	133.291.456,00	98,65
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.493.994.523,00	1.478.144.271,00	98,94



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.897.706.200,00	3.809.324.566,00	97,73
20	DINAS PENANAMAN MODAL ESDM DAN TRANSMIGRASI			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.332.087.183,00	7.674.604.049,00	92,11
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	150.000.000,00	149.773.230,00	99,85
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	146.440.100,00	146.376.076,00	99,96
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	300.000.000,00	299.116.913,00	99,71
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	477.701.000,00	477.271.532,00	99,91
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	985.801.200,00	955.371.908,00	96,91
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.886.111.404,00	6.398.046.189,00	92,91
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.193.894.600,00	1.069.575.397,00	89,59
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	14.146.551.298,00	14.140.114.619,00	99,95
22	DINAS PERHUBUNGAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.003.429.161,00	7.685.753.569,00	96,03
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.169.187.703,00	4.148.348.644,00	99,50
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	171.330.000,00	170.971.326,00	99,79
23	DINAS PERTANIAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.270.672.993,00	38.124.620.371,00	97,08
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	19.692.051.654,00	18.926.718.013,00	96,11
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9.410.401.000,00	8.270.171.492,00	87,88
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	962.337.682,00	946.496.066,00	98,35
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	998.499.500,00	900.756.216,00	90,21
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.495.717.681,00	2.411.066.088,00	96,61



24	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	390.317.771,00	378.363.578,00	96,94
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.181.649.495,00	8.014.654.386,00	97,96
25	SATPOL PP, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.589.606.932,00	16.118.873.857,00	97,16
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.271.354.431,00	5.204.938.566,00	98,74
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	419.730.848,00	413.996.627,00	98,63
26	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.289.389.068,00	10.744.765.868,00	95,18
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.981.147.960,00	1.960.019.961,00	98,93
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	550.000.000,00	550.000.000,00	100
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	160.560.000,00	139.572.788,00	86,93
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.937.926.479,00	2.874.426.642,00	97,84
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	23.547.356.059,00	18.374.514.065,00	78,03
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.147.348.985,00	577.992.275,00	50,38
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	941.360.800,00	931.966.345,00	99,00
27	INSPEKTORAT			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.320.379.580,00	16.638.812.290,00	96,06
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.381.539.700,00	2.378.006.891,00	99,85
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.284.510.830,00	1.272.894.702,00	99,10
28	SEKRETARIAT DPRD			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.177.796.752,00	47.113.081.167,00	97,79
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	50.718.116.711,00	50.355.559.531,00	99,29
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.231.986.500,00	3.161.284.905,00	97,81



29	DINAS TENAGA KERJA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.075.259.005,00	11.007.187.665,00	91,15
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	364.920.000,00	364.868.650,00	99,99
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.433.200.200,00	1.322.399.460,00	92,27
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	327.470.000,00	327.415.720,00	99,98
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	315.434.100,00	315.084.900,00	99,89
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	202.160.000,00	202.143.200,00	99,99
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	100.000.300,00	99.950.033,00	99,95
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	255.600.000,00	253.941.985,00	99,35
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	848.676.276,00	726.093.391,00	85,56
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	190.660.000,00	189.871.507,00	99,59
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.344.200.000,00	1.203.245.370,00	89,51
30	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.704.508.521,00	4.386.063.667,00	93,23
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.640.307.882,00	1.634.583.518,00	99,65
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	430.787.185,00	415.450.892,00	96,44
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	77.100.061,00	76.950.344,00	99,81
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	99.999.505,00	98.723.305,00	98,72
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	139.999.588,00	137.230.500,00	98,02
	ROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	435.821.265,00	424.124.962,00	97,32
31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	338.182.929.791,00	296.520.711.967,00	87,68
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	440.266.436,00	439.784.906,00	99,89
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.929.200,00	2.929.200,00	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	210.619.052.943,00	191.889.363.052,00	91,11
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	93.844.500,00	93.129.375,00	99,24
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	98.460.093,00	98.460.093,00	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.404.573.534,00	1.396.660.049,00	99,44
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	330.671.692,00	329.048.869,00	99,51
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.096.302.877,00	2.882.002.963,00	93,08



BAB 4

P E N U T U P

- **SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA**
- **LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DAN AKAN DITEMPUH DIMASA DATANG UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA**



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Gorontalo berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya serta sebagai bagian dari kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tahun 2023 merupakan tahun awal atau tahun pertama pelaksanaan RPD periode 2023-2026.

Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo menggambarkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana telah dilakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja pemerintah dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi pemerintah daerah, laporan kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, laporan kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung memadai yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2023), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun dan pencapaian target akhir RPD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 atau pada tahun pertama periode RPD ini dapat tercapai sebagaimana target yang telah ditetapkan atau dapat dicapai dengan sangat baik.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki 10 (sepuluh) indikator kinerja utama yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi;
2. Indeks Gini;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Tingkat PDRB Perkapita;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka;
6. Penurunan angka Kemiskinan;
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);



8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
9. Nilai MCP (Monitoring Center For Prevention);
10. Indeks Reformasi Birokrasi.

Dari hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa, kerja keras telah dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memastikan dan mewujudkan pencapaian kinerja prioritas pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga jangka menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPD maupun RKPD tahun 2023, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk dan aspek.

Dibawah ini adalah realisasi dan capaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kinerja lain yang mendukung tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi dan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo
sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pertumbuhan Ekonomi	5,17	4,50	87,04
	2. Indeks Gini	0,419	0,417	199,52
	3. Inflasi	3,29	3,88	82,07
	4. PDRB Perkapita	35,94	42,35	117,83
	5. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,49	3,06	112,32
	6. Persentase Angka Kemiskinan	15,29	15,15	100,92
Peningkatan Sumber Daya Manusia	7. Indeks Pembangunan Manusia	71,15	71,25	100,14



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	30	27,30	91,00
	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,31	79,52	107,01
Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	10. Nilai MCP (Monitoring Center For Prevention)	92,65	81,50	87,96
	11. Indeks Reformasi Birokrasi	65,1	77,75	119,43
	12. Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	100,00

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo, LHE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Dinas LHK Provinsi Gorontalo, Inspektorat Provinsi Gorontalo tahun 2023

Dari tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, semua target tercapai dengan baik bahkan capaiannya melebihi 100 persen, yang digambarkan dengan warna "hijau tua". Namun, masih terdapat tiga indikator kinerja yang capaiannya masih memerlukan komitmen dan kerja keras lagi dari semua pihak dan semua stakeholder agar target tercapai yaitu pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan peningkatan nilai MCP, yang digambarkan dengan warna "hijau muda".

Meskipun demikian, beberapa tantangan masih perlu menjadi fokus dan perhatian bagi perbaikan kinerja Pemerintah Povinsi Gorontalo ke depan utamanya dalam pencapaian kinerja prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu menuntaskan masalah Kemiskinan dan menekan laju inflasi.

Di bawah ini akan diuraikan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 serta perbandingan dengan target kinerja akhir RPD tahun 2026 sebagai berikut:



Tabel 4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s.d Akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,41%	4,04 %	5,17%	4,50%	87,04	7,1	63,38
2	Indeks Gini	0,409	0,423	0,419	0,417	199,52	0,390	93,08
3	PDRB Perkapita	37,46	39,87	35,94	42,35	117,83	37,68	112,39
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,28%	2,58 %	3,49%	3,06%	112,32	2,90	94,48
5	Inflasi	2,59%	5,15%	3,29%	3,88%	82,07	1,82	-13,19
6	Persentase Angka Kemiskinan	15,41%	15,51%	15,29%	15,15%	100,92	13,92	91,16
7	Indeks Pembangunan Manusia	69,00	70,62	71,15	71,25	100,14	72,17	98,72
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	-	-	30	27,30	91,00	30	91,00
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,32	79,79	74,31	79,52	107,01	75,83	104,87
10	Nilai MCP (Monitoring Center For Prevention)	89,72	82,60	92,65	81,50	87,96	98,51	82,73
11	Indeks Reformasi Birokrasi	66,33	69,61	65,10	77,75	119,43	66,90	116,22
12	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo dan PD Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Selanjutnya, dalam tabel 4.3 di bawah ini akan ungkapkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mendukung pencapaian kinerja utama tahun 2023. Kinerja ini merupakan kinerja pembangunan daerah yang pencapaiannya diukur melalui indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah termuat dalam RPD 2023-2026 sebagai berikut:



Tabel 4.3
Capaian Kinerja Pendukung Pemerintah Provinsi Gorontalo
Yang mendukung Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	38,14	37,75	98,98
2.	Indeks Ketahanan Pangan	80	80,35	100,43
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	104,46	104,97	111,32
4.	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	105,01	109,9	115,84
5.	Nilai Tukar Nelayan – Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	97,77	95,44	97,62
6.	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	5,27	4,42	83,87
7.	Nilai Ekspor (juta USD)	14.102.573	37.959.205	269,17
8.	Realisasi PMA/PMDN (milyar)	2.600	5.515	212,13
9.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,5	2,4	96,11
10.	Kemiskinan perdesaan (%)	23,5	23,75	98,93
11.	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	62,96	70,23	111,54
12.	Rasio Elektrifikasi	99,50	99,99	100,49
13.	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	25	4,6	18,40
14.	Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	59	79,31	134,00
15.	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,5	0,553	100,00
16.	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	91%	83,59%	91,86
17.	Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial	21	11,42	54,38
18.	Angka partisipasi sekolah	100%	86,05%	86,05
19.	Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B	100%	65,38	65,38
20.	Persentase Penyandang disabilitas yang bersekolah	100%	100%	100,00
21.	Angka harapan hidup	68,80	68,83	100,04
22.	Prevalensi Stunting	26,00	23,80	91,54
23.	Indeks pembangunan Gender	87,03	88,12	101,25
24.	Indeks Perlindungan Anak	67,47	66,36	98,35
25.	Indeks pembangunan literasi Masyarakat	59,20	70,39	118,90
26.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	123	116,71	105,11



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

27.	Nilai SAKIP	BB (70,01)	B (68,66)	98,07
28.	Indeks Sistem Merit	292	327	111,99
29.	Nilai Maturitas SPBE	2,82	3,22	114,18
30.	Indeks Demokrasi	72	73,74	102,42
31.	Nilai Pengawasan Kearsipan	62	63,47	102,37

Sumber Data: PD Lingkip Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024



B. LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DAN AKAN DITEMPUH MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam menyikapi berbagai tantangan dan isu strategis terhadap pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo, utamanya terhadap kinerja yang masih memerlukan perhatian dan komitmen tinggi untuk menuntaskannya, maka langkah-langkah yang akan dan sedang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo diungkapkan sebagai berikut:

- **Pertumbuhan ekonomi.** Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang pada tahun 2021 tumbuh sebesar 2,41 persen, berangsur mulai membaik di tahun 2022 yaitu sebesar 4,04 persen. Meskipun masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional, tetapi sudah terdapat geliat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, yang naik sebesar 1,63 poin dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 4,50 persen, naik 0,46 pon dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2022. Langkah yang ditempuh dalam upaya perbaikan pertumbuhan ekonomi yaitu perbaikan dan peningkatan kinerja ekspor luar negeri dalam hal ini adalah potensi ekspor komoditas jagung, perbaikan iklim investasi, pemenuhan terhadap tingkat permintaan masyarakat, konsumsi pemerintah dan meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha. Selain itu, meningkatkan kontribusi sektor pertanian, mengembangkan industri pengolahan, serta pengembangan sektor pariwisata utamanya terhadap peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pada obyek-obyek wisata.
- Terhadap faktor-faktor pemicu naiknya angka Kemiskinan dan menghadapi permasalahan kemiskinan di Provinsi Gorontalo ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. Program yang dianggap paling tepat yang mampu menurunkan kemiskinan adalah bantuan pangan, semisal Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) baik nasional maupun daerah. Program ini dianggap paling tepat mengingat lebih dari 75 persen pengeluaran penduduk miskin dihabiskan untuk pangan. Demikian halnya dengan bantuan non-pangan seperti bantuan Rumah layak huni, subsidi Listrik bagi



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

masyarakat miskin, beasiswa pendidikan serta bantuan akses kesehatan serta upaya-upaya lainnya masih terus ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo agar program/kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak lebih optimal. Upaya-upaya lain yang dilakukan sebagai langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan UMKM, pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan nelayan, pemberian layanan kesehatan gratis, upaya meningkatkan perlindungan sosial serta pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. Meningkatkan pendapatan rata-rata nelayan akan dicapai dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan, pemberian bantuan peralatan penangkap ikan dan pembudidaya ikan serta Pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok nelayan baik pembudidaya maupun nelayan tangkap, juga bantuan ternak terhadap kelompok-kelompok peternak.

Selain itu, upaya-upaya lain adalah menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran penyebab kemiskinan bisa berkurang, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok karena program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin / keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Selain program-program nasional penanggulangan kemiskinan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo pun telah melaksanakan program-program unggulan penanggulangan kemiskinan, yang juga dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, dungkapkan sebagai berikut:

1. Program penanganan daerah rawan pangan dengan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Bantuan kios akses pangan dengan jumlah penerima di tahun 2023 sebanyak 30 kios, juga bantuan pangan untuk daerah rawan pangan dengan jumlah penerima sebanyak 6.700 Kepala Keluarga;
2. Program penanganan daerah rawan pangan dengan memberikan bantuan pangan berupa paket-paket bahan pokok di daerah rawan pangan. Bantuan cadangan pangan pemerintah tahun 2023 sebesar 49,16 ton dengan jumlah



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

- penerima 4.916 Kepala Keluarga, juga bantuan pekarangan pangan harapan diberikan kepada 60 Kepala Keluarga;
3. Bantuan makanan tambahan untuk 225 anak juga diberikan dalam upaya pencegahan stunting;
 4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha berupa bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin;
 5. Bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo - BLP3G, Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial, Bantuan kepada Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Anak Terlantar);
 6. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif/UEP, dan Perempuan Kepala Keluarga/PEKKA);
 7. Penguatan Kelembagaan Sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin (Bantuan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat/WKSBM, Karang Taruna/KT, Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat/PSM);
 8. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat ditempuh melalui bantuan premi JKN, layanan mobil jenazah, dana talangan untuk pasien miskin, pemberian bantuan untuk pasien rujukan luar daerah;
 9. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). Bantuan Bahan Produksi bagi UMK setelah memperoleh Sertifikat Hak atas Tanah (SHAT) berupa bahan produksi;
 10. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM yaitu bantuan Bahan Produksi bagi UMKM Kios dan Aneka Minuman (9273 UMKM) @ Rp. 1.200.000. Bantuan



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

stimulan pengembangan bagi UMKM olahan Pangan sebesar 2.000.000/paket (228 UMKM);

11. Pengelolaan perikanan tangkap dengan tujuan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin pelaku usaha di bidang perikanan;
 12. Pengembangan ekonomi produktif masyarakat miskin, yaitu memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
 13. Program pengelolaan ketenagalistrikan yaitu bantuan listrik gratis terhadap masyarakat miskin;
 14. Penyediaan sarana prasarana pertanian yaitu bantuan benih padi dan jagung, bantuan ternak sapi, ayam, kambing untuk kelompok masyarakat kurang Mampu;
 15. Penyediaan bantuan prasarana pertanian yaitu bantuan penyediaan alat-alat mesin pertanian gratis untuk petani miskin/Gurem;
 16. Asuransi Usaha Tani Padi yang bertujuan untuk mengalihkan resiko akibat kegagalan panen yang dialami petani dan penggarap melalui skema pertanggung jawaban asuransi;
 17. Bantuan motor sayur bagi pedagang sayur miskin serta penyuluhan dan pemberdayaan petani utamanya petani miskin.
- Pengendalian Inflasi. Langkah-langkah dalam rangka pengendalian Inflasi di Gorontalo dalam rangka menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama KPw Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya terus bersinergi dan berkolaborasi dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menekan laju inflasi yaitu berupa Kerja Sama Antar Daerah (KAD):
- ✚ Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah dilakukan melalui Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi. Dengan menyediakan secara keseluruhan atau sebagian diantaranya yaitu komoditi



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

antara lain beras, minyak goreng dalam kemasan, gula Kristal putih bukan rafinasi, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan atau barang kebutuhan pokok masyarakat lainnya; Masyarakat Umum dalam rangka pengendalian inflasi, stabilisasi harga, dan pemenuhan kebutuhan bahan pokok.

- ✚ Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk komoditas bawang merah.
- ✚ Telah dilakukan penjajakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memfasilitasi KAD Gorontalo-Sulawesi Selatan secara G to G (government to government) dan telah dilaksanakan MoU secara B to B (business to business) antara UD Cindy (Kota Gorontalo) dan UD Rebi (Kota Makassar).
- Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Dari berbagai strategi dan tindakan yang telah dilakukan di tahun 2023, pada tahun 2024 langkah yang ditempuh untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan ini adalah:
 1. Melakukan pemetaan terhadap kinerja yang berdampak yang ada seluruh Perangkat Daerah serta terus meningkatkan komitmen bersama mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan level individu.
 2. Untuk mendukung hal tersebut, upaya yang dilakukan selanjutnya adalah mengoptimalkan peran agen perubahan di seluruh Perangkat Daerah sehingga mampu menggerakkan dan mampu menjadi tauladan dalam berinovasi untuk meningkatkan kinerja.
 3. Membangun sistem informasi dan aplikasi yang terintegrasi disemua lini.
 4. Membangun dan mengoptimalkan kinerja kolaborasi antar *leading sector* / pengampu pelaksanaan reformasi birokrasi (*crosscutting*).
 5. Meningkatkan kualitas monitoring Kabupaten/Kota, dimana monitoring yang dilakukan dalam rangka memantau perkembangan implementasi reformasi birokrasi tematik sehingga nantinya dapat diketahui apakah anggaran yang dialokasikan terhadap program/kegiatan benar-benar sesuai peruntukannya.



LKIP 2023

Provinsi Gorontalo

Selanjutnya, mendapat gambaran/kepastian bahwa program-program Pemerintah benar di rasakan oleh masyarakat (memberi dampak).

6. Mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, utamanya terhadap perangkat daerah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat.
7. Meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja baik pada level Instansi Pemerintah maupun di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, melalui penguatan sistem perencanaan yang selaras dengan penganggaran serta pengukuran dan monitoring kinerja secara berkala, sehingga kinerja organisasi dapat terukur dengan tepat.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan laporan kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya nyata untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan laporan kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan pelayanan publik yang semakin baik di Provinsi Gorontalo.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo ini yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 atau tahun pertama pelaksanaan RPD 2023-2026. Semoga Allah S.W.T, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya serta karunia sehat kepada para pemimpin dan seluruh masyarakat Gorontalo sehingga cita-cita dan harapan masyarakat di daerah tercinta ini bisa terwujud yaitu Masyarakat Gorontalo yang Maju dan Mandiri.

==== Terima Kasih ===